



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2016 – 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unit kerja/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional.
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan |
| BAB IV | Analisis Isu-Isu Strategis |
| BAB V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran |

| | |
|----------|--|
| BAB VI | Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VII | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah |
| BAB VIII | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan |
| BAB IX | Penetapan Indikator Kinerja Daerah |
| BAB X | Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan |

- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

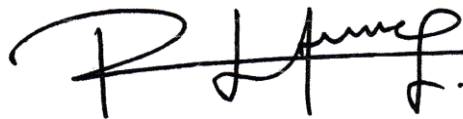
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



BENNY MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan/ kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, namun untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah pada tahun terakhir periode 2016-2021, maka Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD melalui mekanisme perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, maka penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan pembangunan. Yang tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih.

Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, agar selaras dengan program prioritas Bupati terpilih.

Ketiga, Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-PD yang menghasilkan rancangan RPJMD.

Keempat, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah, guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.

Kelima, Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Keenam, Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR...



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | I – 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | I – 1 |
| 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... | I – 2 |
| 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN | I – 3 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | I - 11 |
| 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN | I – 12 |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II – 1 |
| 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | II – 2 |
| 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | II – 7 |
| 2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah) .. | II - 8 |
| 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat..... | II -13 |
| 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga | II -14 |
| 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM | II-15 |
| 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib..... | II -15 |
| 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... | II -41 |
| 2.3.3 A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang | II- 46 |
| 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH | II-47 |
| BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN | III – 1 |
| 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU..... | III – 2 |
| 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU | III-15 |
| 3.3 PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAN (2016 S/D 2021)..... | III – 18 |
| BAB 4 ANALISA ISU-ISU STRATEGIS | IV – 1 |
| 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN | IV – 1 |
| 4.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA | IV – 7 |
| BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V – 1 |
| 5.1 VISI | V – 1 |
| 5.2 MISI..... | V – 2 |
| 5.3 TUJUAN DAN SASARAN | V – 2 |
| 5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN..... | V- 6 |
| 5.5 TEMA TAHUNAN..... | V - 7 |
| BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | VI – 1 |
| BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... | VII – 1 |
| 7.1 KEBIJAKAN UMUM | VII – 1 |
| 7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VII – 7 |
| BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN | VIII – 1 |

| | |
|---|------------------|
| BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | IX – 1 |
| 9.1 PENENTUAN INDIKATOR KINERJA | IX – 1 |
| 9.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA | IX – 2 |
| BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN | X – 1 |
| 10.1 PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN | X – 1 |
| 10.2 KAIDAH PELAKSANAAN | X – 2 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) jenis perencanaan yaitu rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai tahapan tersebut. Untuk pemerintah daerah, maka rencana jangka panjang tersebut telah dijalankan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk rencana jangka menengah pemerintah daerah berkewajiban dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk rencana tahunan dijalankan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun tiap tahunnya sebagai alat dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Disamping Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai acuan utama penyusunan dokumen perencanaan, dasar hukum lain yang wajib dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004) yang membawa perubahan paradigma dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang dijalankan oleh pemerintahan daerah, diantaranya bidang pembangunan daerah, keuangan daerah, kewenangan daerah, perangkat daerah serta aspek lainnya yang mempengaruhi kebijakan 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan 2 (dua) aturan hukum di atas, maka dengan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE sebagai Bupati dan Amrizal Datuk Rajo Medan, S.Sos sebagai Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatera Barat, maka tugas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjabarkan visi, misi dan program bupati/wakil bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-

2031, RPJM Nasional Tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/wakil bupati dilantik maka RPJMD ini telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih tersebut ke dalam dokumen RPJMD secara utuh, maka digunakan 5 (lima) pendekatan perencanaan, yaitu ; politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pelaksanaan pendekatan tersebut melibatkan seluruh elemen atau pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha maupun masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

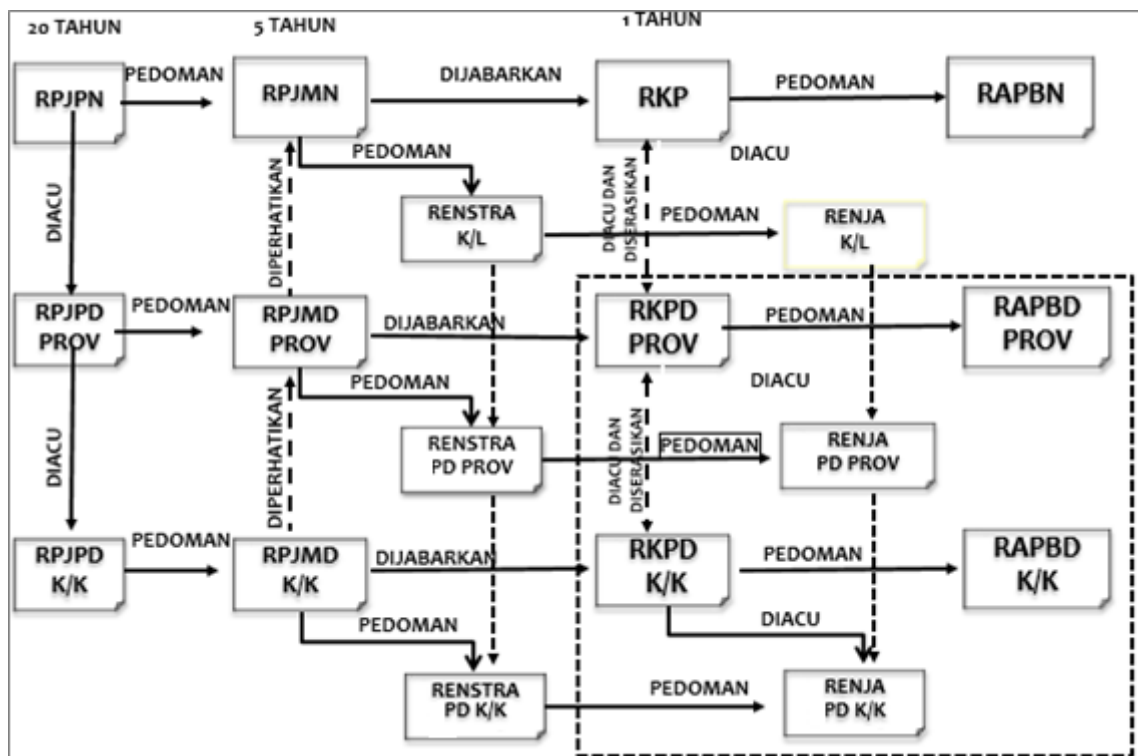
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

A. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan UU 25/2004 dan UU 23/2014, secara umum dalam proses penyusunannya maupun fungsinya, RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen lainnya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten mempedomani RPJPD Kabupaten sekaligus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang juga sedang disusun, sedangkan menurut Permendagri 54/2010, muatan lain yang juga perlu diperhatikan adalah RPJMD kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya. Setelah RPJMD ditetapkan melalui perda, maka RPJMD ini akan dijadikan pedoman dalam penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2021, selain itu RPJMD dapat dijadikan pedoman utama dalam menyusun dokumen perencanaan komplementer lainnya untuk percepatan pembangunan daerah, seperti masterplan, rencana induk maupun perencanaan strategis lainnya yang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen Perencanaan



Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya". Maju artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian daerah sejajar atau bahkan lebih baik dari daerah lain. Berbudaya artinya terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa serta norma adat.

Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, pembangunan Kabupaten Dharmasraya pertama kali dimulai dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dan kemudian secara bertahap menyiapkan landasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyiapkan landasan kelembagaan, infrastruktur dan tata kelola pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dan seterusnya selanjutnya mewujudkan nilai tambah ekonomi dan pemusatan aktifitas sosial ekonomi untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumbar.

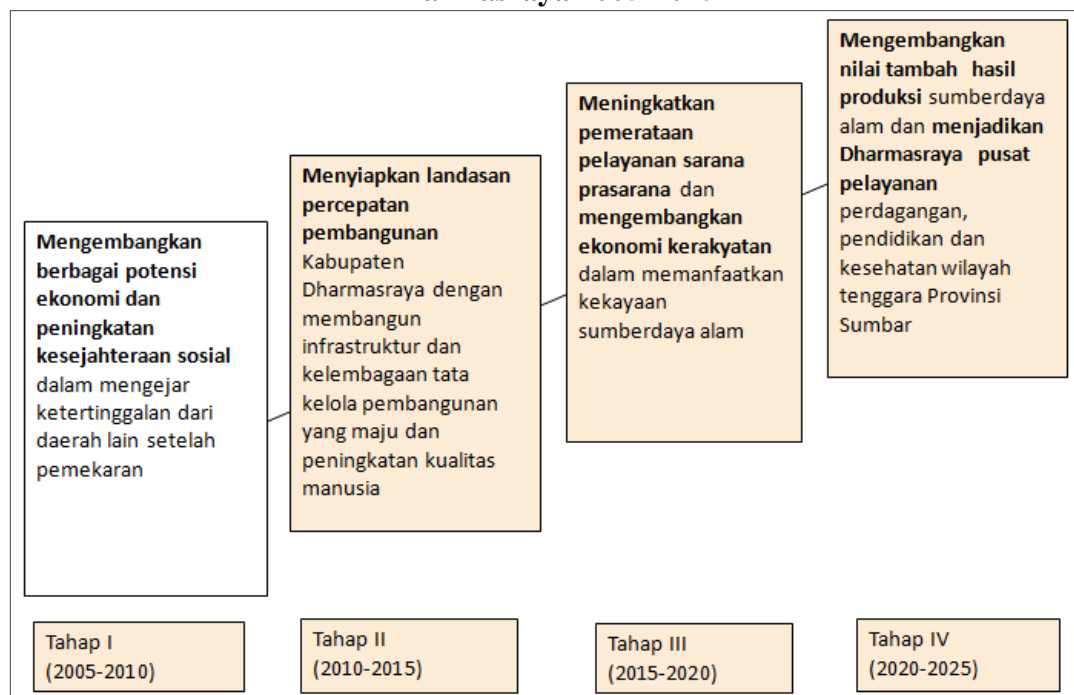
Prioritas pembangunan dalam tahap III RPJP Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah. Berikut dikutip fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III RPJP 2005-2025 :

- Membangun sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan sosial bagi penduduk dan peningkatan hasil produksi.
- Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- Membangun sarana pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan rencana jangka panjang, pembagian waktu dalam tahapan pembangunan bersifat ancar-ancar dan bukan batasan waktu yang tegas karena yang dipentingkan adalah bagaimana menjalankan tahapan pembangunan yang merupakan suatu skenario pembangunan untuk melangkah dari tahap awal menuju perwujudan pada tahap akhir pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan jangka menengah pembangunan.

Dengan tema RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang ditetapkan “menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya” maka RPJMD ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya tersebut yang menekankan perlunya meningkatkan pemerataan pelayanan sarana prasarana dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan nilai tambah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, serta masih perlunya dengan memanfaatkan teknologi IT untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif.

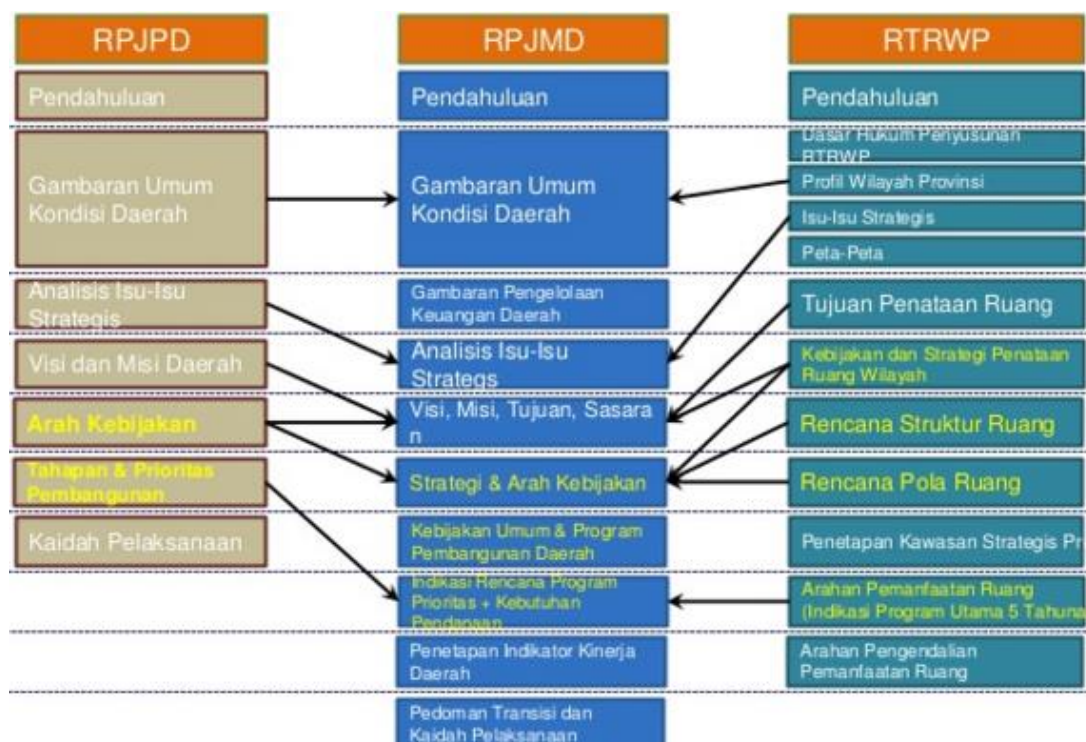
Tema/Agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025



B. Hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penataan ruang

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) tidak berjalan sendiri, karena didalam teori perencanaan, perencanaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah/keruangan. Dimana perencanaan pembangunan berjalan saling bersinergi dengan perencanaan wilayah.

Gambar 1.2. Keterkaitan muatan dokumen RPJPD, RPJMD dan RTRW



Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: “mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya”. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yang relevan untuk diacu dalam RPJMD yaitu:

- Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan ditunjang dengan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya dan mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang hari dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di

Kabupaten Dharmasraya. Dimasa depan Masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas hampir mencapai 5000 Ha. Sementara tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan.

- c. Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah dan pengembangan lebih lanjut industri pengolahan.
- d. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat dengan dilengkapi sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center. Pengembangan Kawasan Perikanan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung didukung peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan) dan pengembangan budidaya perikanan darat perairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.
- e. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi.
- f. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.
- g. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.
- h. Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster
- i. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.
- j. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupatendan interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; dan
- k. Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan

Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

Keterkaitan antara kebijakan dan program RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

| RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031 | RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA 2005-2025 |
|---|--|
| Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan | Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian Mengaktifkan pengadaan bibit padi dan saprodi ditingkat petani; Pengadaan bibit sawit dan karet bermutu. |
| Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat | Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan dengan meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; dan revitalisasi sawah |
| Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah | Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun dengan mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. |
| Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat | Meningkatkan produksi perikanan dengan meningkatkan produksi perikanan; mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan |
| Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan | Mengolah bahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya untuk memberi |

| RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031 | RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA 2005-2025 |
|---|---|
| kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi. | nilai tambah |
| Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan. | Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung; Revitalisasi los kios pasar nagari |
| Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata. | Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya; Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya |
| Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk; Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten |
| Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari. | Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial; Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten; Berkurangnya lahan kritis; Berkurangnya dampak pencemaran sungai Batang Hari |
| Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman | Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran; Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar; Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan; Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan; Peningkatansanitasi rumah dan perbaikan lingkungan |
| Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung; Revitalisasi los kios pasar nagari Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk pada pusat-pusat kegiatan. |

Disamping itu dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya ini juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten tetangga yaitu : RPJMD Kabupaten Sijunjung, RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, RPJMD Kabupaten Bungo, RPJMD Kabupaten Tebo, dan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berkaitan erat dengan program yang menangani daerah yang berbatasan langsung

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, ekonomis, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016–2021 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam bentuk dokumen RPJMD secara utuh. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Mendukung sinerginitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Nasional
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

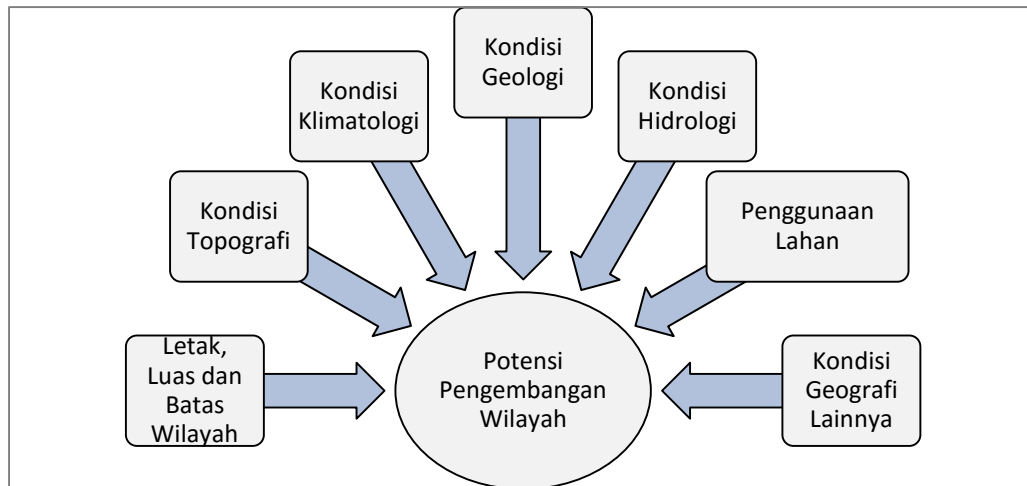
Penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi lapangan pada saat RPJMD ini disusun. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dan/atau sampai tahun 2015 tergantung pada ketersediaan data yang ada. Sedangkan jenis data yang disajikan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selama periode RPJMD ini masih mempedomani Permendagri 54/2010 serta indikator yang tersedia pada sasaran pokok RPJM Nasional 2015-2019, selain itu juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, hal ini untuk menjaga keterkaitan antar dokumen dan fungsi data sebagai tolok ukur capaian kinerja pembangunan daerah sekaligus sebagai patokan (*benchmark*) Kabupaten Dharmasraya dengan wilayah yang lebih luas. Namun salah satu kendala dalam penyajian data adalah belum keluarnya data statistik secara resmi dari BPS (publikasi data lambat), diantaranya Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2016 (DDA 2016) maupun Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) tahun 2016 maupun publikasi lainnya yang akan digunakan dalam penyajian data.

Dari pengukuran capaian pembangunan ini nantinya akan dijadikan sumber informasi utama dalam memfokuskan dalam peningkatan pelayanan dan kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan bidang-urusan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2016-2021.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Kondisi geografi

Gambar 2.1. Potensi Pengembangan wilayah



Untuk melihat gambaran fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Dharmasraya, yang disajikan berdasarkan unsur kondisi geografi yaitu :

- Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi $00^{\circ}48'25,4''$ - $1^{\circ}41'40,3''$ LS dan $101^{\circ}8'32,5''$ - $101^{\circ}53'30,2''$ BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu $2.961,13 \text{ Km}^2$ (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas $3.025,99 \text{ km}^2$ (302.599 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut

mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

| Klasifikasi Kelerengan Lahan | Lereng (derajat) | Luas | |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | (Ha) | (%) |
| Datar | 0-3 | 23.155 | 7,65 |
| Agak Landai | 3-8 | 68.786 | 22,73 |
| Landai | 8-15 | 72.339 | 23,91 |
| Agak Curam | 15-25 | 74.730 | 24,70 |
| Curam | 25-40 | 29.023 | 9,59 |
| Sangat Curam | 40-60 | 34.567 | 11,42 |
| Jumlah | | 302.599 | 100,00 |

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimate L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

- Kondisi geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil

- Kondisi hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. Sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran

tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumbang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.

(a) Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah,

seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai

- (b) Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

b. Kondisi demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (jiwa)**

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 98892 | 102.083 | 104.801 | 108.935 | 112.227 | 115.515 |
| 2 | Perempuan | 92.530 | 95.516 | 97.800 | 101.756 | 104.678 | 107.597 |
| Jumlah (jiwa) | | 191.422 | 197.599 | 202.601 | 210.691 | 216.905 | 223.112 |
| Rasio jenis kelamin (persen) | | 106,88 | 106,88 | 107,16 | 107,06 | 107,21 | 107,36 |
| Pertumbuhan penduduk (persen) | | 2,65 | 2,83 | 2,53 | 3,99 | 2,95 | 2,86 |
| Rata-rata pertumbuhan (persen) | | 2,97 | | | | | |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Persentase (%) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Persentase (%) | Kepadatan (Jiwa/Ha) |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Sungai Rumbai | 5106 | 1,69 | 21.512 | 9,64 | 4,21 |
| 3 | Koto Besar | 56057 | 18,53 | 26.071 | 11,69 | 0,47 |
| 2 | Asam Jujuhan | 48541 | 16,04 | 13.448 | 6,03 | 0,28 |
| 4 | Koto Baru | 22120 | 7,31 | 33.157 | 14,86 | 1,50 |
| 5 | Koto Salak | 12145 | 4,01 | 17.163 | 7,69 | 1,41 |
| 7 | Tiumang | 13443 | 4,44 | 12.499 | 5,60 | 0,93 |
| 6 | Padang Laweh | 6062 | 2,00 | 6.535 | 2,93 | 1,08 |
| 8 | Sitiung | 12457 | 4,12 | 26.367 | 11,82 | 2,12 |
| 9 | Timpeh | 32301 | 10,67 | 15.378 | 6,89 | 0,48 |
| 10 | Pulau Punjung | 44316 | 14,65 | 42.514 | 19,06 | 0,96 |
| 11 | IX Koto | 50050 | 16,54 | 8.468 | 3,80 | 0,17 |
| Kab. Dharmasraya | | 302599 | 100 | 223.112 | 100 | 0,74 |

Sumber : Perda No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, dan
BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari untuk komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dengan membandingkan capaian IPM Dharmasraya dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga IPM ini dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM merode baru yang berbeda dengan perhitungan IPM sebelumnya hingga tahun 2013. Mulai tahun 2014 indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam perhitungan IPM, namun diganti dengan indikator lain yaitu harapan lama sekolah. Adanya perbedaan indikator dan rumus perhitungan IPM juga tidak seperti IPM sebelumnya. IPM metode baru terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dngan indikator angka harapan hidup, kemudian dimensi pengetahuan yang diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapota disesuaikan. Untuk melihat posisi capaian IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kab/kota dan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

| No | Kab/Kota | Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Rata-rata lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000) | IPM | ranking |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 64,05 | 11,48 | 6,27 | 5,684 | 57,41 | 19 |
| 2 | Pesisir Selatan | 69,96 | 13,04 | 8,11 | 8,412 | 68,07 | 11 |
| 3 | Solok | 67,35 | 12,88 | 7,57 | 9,334 | 67,12 | 14 |
| 4 | Sijunjung | 65,22 | 11,94 | 7,33 | 9,796 | 65,30 | 16 |
| 5 | Tanah Datar | 68,75 | 13,35 | 7,93 | 10,103 | 69,49 | 10 |
| 6 | Padang Pariaman | 67,64 | 13,54 | 6,89 | 10,260 | 68,04 | 12 |
| 7 | Agam | 71,30 | 13,59 | 8,17 | 8,859 | 69,84 | 9 |
| 8 | Limapuluh Kota | 69,23 | 12,76 | 7,91 | 8,774 | 67,65 | 13 |
| 9 | Pasaman | 66,26 | 12,70 | 7,63 | 7,340 | 64,01 | 18 |
| 10 | Solok Selatan | 66,64 | 12,37 | 7,98 | 9,653 | 67,09 | 15 |
| 11 | Dharmasraya | 70,16 | 12,36 | 8,03 | 10,713 | 69,84 | 8 |
| 12 | Pasaman Barat | 67,03 | 12,30 | 7,83 | 8,109 | 65,26 | 17 |
| 13 | Kota Padang | 73,19 | 15,60 | 10,97 | 13,522 | 80,36 | 1 |
| 14 | Kota Solok | 72,74 | 14,27 | 10,77 | 11,350 | 76,83 | 4 |
| 15 | Kota Sawah Lunto | 69,27 | 12,69 | 9,66 | 8,931 | 69,87 | 7 |

| No | Kab/Kota | Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Rata-rata lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000) | IPM | ranking |
|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-------|---------|
| 16 | Kota Padang Panjang | 72,45 | 15,01 | 11,09 | 9,670 | 75,98 | 5 |
| 17 | Kota Bukit Tinggi | 73,52 | 14,92 | 10,79 | 12,330 | 78,72 | 2 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 72,93 | 14,21 | 10,29 | 12,622 | 77,42 | 3 |
| 19 | Kota Pariaman | 69,59 | 14,49 | 9,96 | 11,814 | 74,98 | 6 |
| | Sumatera Barat | 68,66 | 13,60 | 8,42 | 9,804 | 69,98 | |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2015 mencapai 69,84, naik dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 69,27, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 69,98. Dilihat dari perbandingan indikator pembentuk IPM, indikator angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan berada di atas provinsi, namun pada dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi.

Melihat kondisi tersebut, maka ke depannya, percepatan pembangunan bidang pendidikan mesti mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga Dharmasraya mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk menjelaskan data-data makro pada lingkup aspek kesejahteraan masyarakat, lebih menampilkan data dan analisis untuk memperlihatkan kondisi ekonomi makro daerah, yang terdiri dari perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun bidang lain yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah)

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah :

Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1. | Pertumbuhan PDRB | - | 6,56 | 6,19 | 6,50 | 6,24 | 5,80 |
| 1.2. | Laju inflasi provinsi | 7,84 | 5,37 | 4,16 | 10,87 | 11,58 | 1,08 |
| 1.3. | PDRB per kapita | 23.650.000 | 26.030.000 | 28.070.000 | 30.510.000 | 33.050.000 | 34.825.209 |
| 1.4. | Indeks Gini | - | 0,369 | 0,425 | 0,340 | 0,324 | n/a |
| 1.7. | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 10,56 | 10,09 | 8,82 | 7,74 | 6,97 | n/a |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Masing masing indikator di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK 2010)

Tabel 2.6 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015(Jutaan Rupiah)

| No | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.441.465,0 | 1.496.258,3 | 1.571.971,0 | 1.641.460,2 | 1.735.699,2 | 1.829.961,9 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 524.346,9 | 596.401,9 | 606.724,8 | 644.852,3 | 654.452,4 | 645.615,4 |
| C | Industri Pengolahan | 311.838,1 | 324.875,0 | 348.172,1 | 362.682,4 | 381.006,6 | 394.374,6 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 757,8 | 805,2 | 857,9 | 874,5 | 953,5 | 971,8 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 597,3 | 658,9 | 675,0 | 788,3 | 822,9 | 860,7 |
| F | Konstruksi | 498.122,1 | 526.216,1 | 569.473,8 | 624.084,0 | 678.472,2 | 748.673,8 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 552.251,0 | 586.614,8 | 634.470,9 | 689.735,9 | 746.242,2 | 792.820,3 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 245.253,8 | 259.460,8 | 282.388,6 | 309.046,0 | 338.030,9 | 367.215,9 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 35.613,6 | 37.535,7 | 39.883,0 | 42.488,2 | 45.414,8 | 47.998,1 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 246.404,9 | 270.479,4 | 303.798,8 | 339.883,7 | 377.181,1 | 420.857,8 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 96.507,3 | 103.221,7 | 112.456,8 | 120.481,0 | 128.878,0 | 134.403,4 |
| L | Real Estat | 94.283,3 | 101.496,0 | 108.287,3 | 114.085,6 | 120.339,3 | 128.101,1 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 873,8 | 935,8 | 1.003,6 | 1.078,4 | 1.158,4 | 1.245,4 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 303.725,5 | 330.004,9 | 335.712,3 | 343.165,3 | 348.660,3 | 367.069,6 |
| P | Jasa Pendidikan | 95.586,7 | 104.145,6 | 114.258,5 | 121.430,9 | 131.904,0 | 142.525,7 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 64.407,5 | 69.051,3 | 75.967,7 | 81.722,4 | 88.385,4 | 95.910,1 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 30.564,8 | 32.264,2 | 34.093,6 | 36.596,0 | 38.711,5 | 40.989,2 |
| TOTAL | | 4.542.599,4 | 4.840.425,6 | 5.140.195,7 | 5.474.455,1 | 5.816.312,7 | 6.118.296,7 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyumbang tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB dan nilainya selalu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan bukan karena turunnya nilai produksi/output dari sektor pertanian, namun lebih disebabkan oleh lebih tingginya perkembangan sektor lain dibanding dengan sektor pertanian ini. Hingga tahun 2015 harga komoditi juga masih belum berada pada titik yang diharapkan karena kondisi perekonomian regional yang belum sepenuhnya pulih sehingga menyebabkan harga komoditi utama terutama untuk sub sektor perkebunan yaitu komoditi karet dan sawit belum begitu menggairahkan.

Dilihat dari 17 sektor PDRB, maka 3 sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (11,58%), selanjutnya sektor konstruksi (10,35%) dan sektor ketiga adalah sektor transportasi dan pergudangan (8,63%), sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 5,43%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif 1,35% atau nilainya turun dibandingkan tahun

2014. Sektor lain yang memiliki peningkatan kontribusi adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor informasi dan komunikasi.

Untuk melihat posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya dengan provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah :

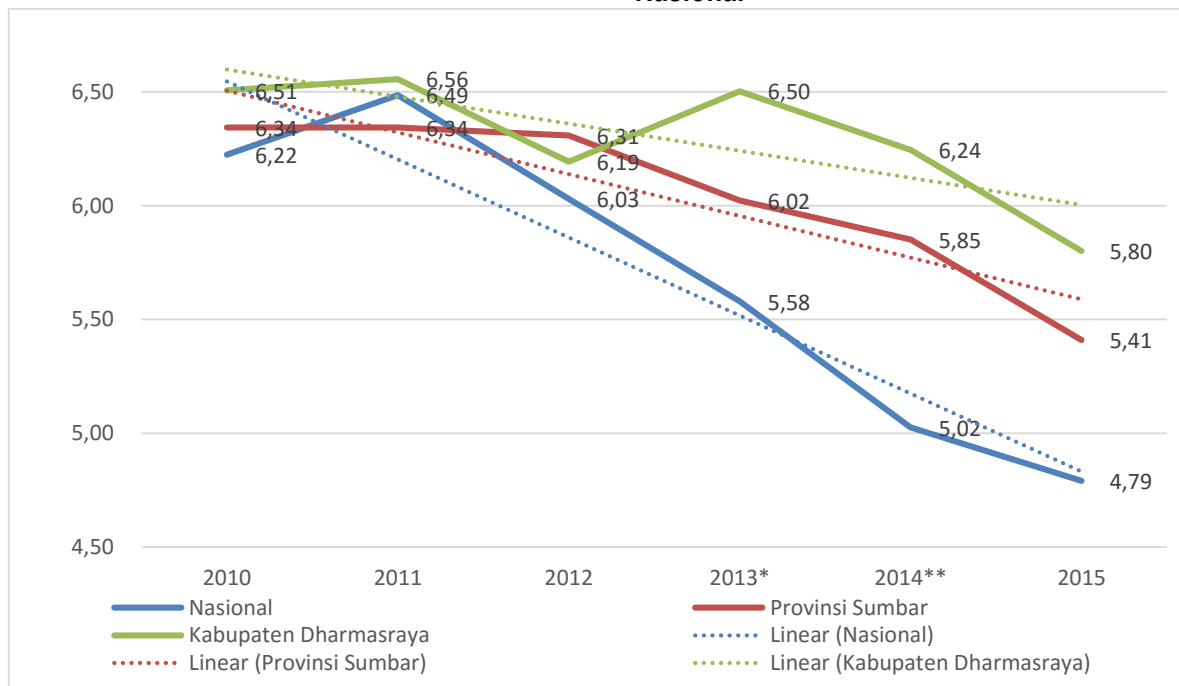
Tabel 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (ADHK Tahun 2010)

| No. | Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Pertumbuhan PDRB Dharmasraya | 6,51 | 6,56 | 6,19 | 6,50 | 6,24 | 5,80 |
| 2 | Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat | 6,34 | 6,34 | 6,31 | 6,02 | 5,85 | 5,41 |
| 3 | Pertumbuhan PDB Nasional | 6,22 | 6,49 | 6,03 | 5,58 | 5,02 | 4,79 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan data tahun 2010 sampai tahun 2015 pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung tinggi dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, hal ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Dilihat dari perbandingan 19 kab/kota, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya berada di urutan 9, turun dibandingkan ranking tahun sebelumnya yang berada di urutan 3.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Jika dilihat dari gambar, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, jika pada tahun 2011, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 6,34% hingga 6,56%, namun perkembangannya hingga tahun 2015, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki pertumbuhan di atas nasional.

2. Laju Inflasi provinsi

Untuk melihat kondisi kecenderungan fluktuasi harga barang pada umumnya, dengan belum adanya perhitungan inflasi Dharmasraya, meskipun fluktuasi harga provinsi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya mewakili fluktuasi harga kabupaten Dharmasraya, namun adanya keterkaitan ekonomi antar wilayah maka perlu mempedomani angka inflasi Provinsi Sumatera Barat, perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 tercatat sebesar 1,08%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan tercatat sebagai angka inflasi terendah se-Indonesia, berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

3. PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan besaran pendapatan yang diperoleh setiap orang berdasarkan perhitungan PDRB ADHB. Perkembangan PDRB perkapita terus mengalami kenaikan, jika pada tahun 2010 berada pada angka 23,64 juta rupiah, di tahun 2015 sudah berada pada 34,8 juta rupiah. Naiknya pendapatan perkapita ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.8 PDRB Perkapita ADHB tahun 2010 dan Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| Keterangan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| PDRB perkapita (rupiah) | 23.640.656,4 | 26.030.000 | 28.070.000 | 30.510.000 | 33.050.000 | 34.825.209,0 |
| PDRB ADHB (Juta rupiah) | 4.542.599,4 | 4.840.425,6 | 3.448.616 | 3.942.078 | 4.491.735 | 7.769.922,0 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 192152 | 198.298 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.112 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

4. Indeks Gini

Indeks Gini menentukan apakah kekayaan atau pendapatan wilayah tersebar merata di masyarakat atau hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Nilainya berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu), semakin mendekati nol maka ketimpangan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Dilihat dari perkembangan data ekonomi daerah, perbaikan pada indikator ekonomi khususnya pendapatan perkapita juga diiringi oleh semakin rendahnya indeks gini. Hal ini memberikan perkembangan ekonomi yang berkualitas. Artinya perbaikan tingkat kesejahteraan semakin dirasakan oleh banyak masyarakat Dharmasraya.

Tabel 2.9 PDRB Perkapita ADHK tahun 2010 dan Indeks Gini
Indikator Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

| Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Gini Dharmasraya | n/a | 0,369 | 0,425 | 0,340 | 0,324 | n/a |
| Indeks Gini SumateraBarat | n/a | 0,329 | 0,350 | 0,338 | 0,321 | 0,342 |
| Indeks Gini Nasional | n/a | 0,410 | 0,410 | 0,413 | 0,410 | 0,400 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Indek Gini Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, walaupun masih diatas rata-rata Sumatera Barat namun sampai tahun 2014 nilainya hampir mendekati Sumatra Barat, namun masih di bawah nasional yang masih di atas 0,410. Ketimpangan di Dharmasraya semakin mengecil dan termasuk ketimpangan rendah, karena berada dibawah angka 0,4. Artinya dengan turunnya nilai Gini, maka pendapatan masyarakat semakin merata'.

5. Tingkat kemiskinan

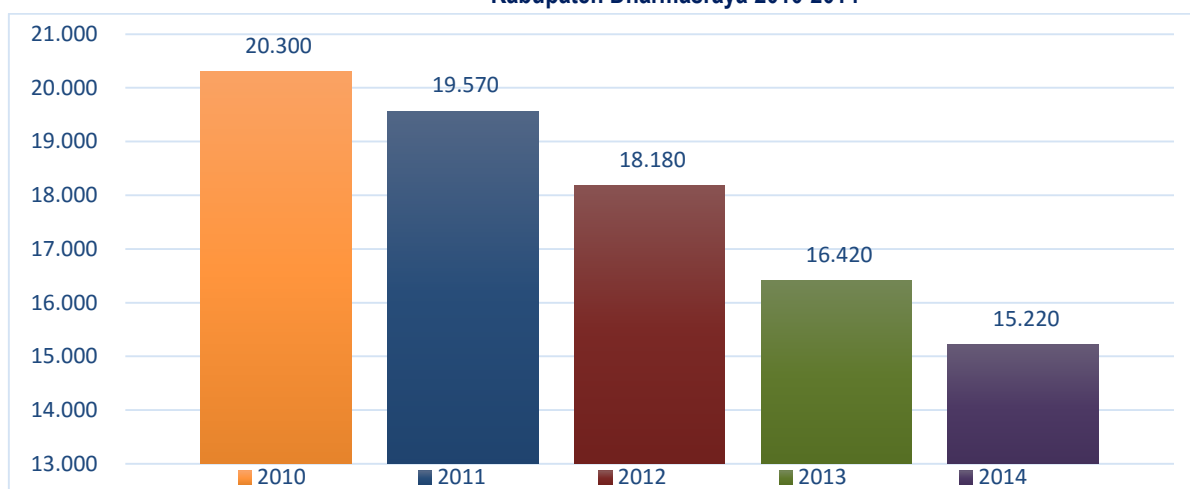
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,98 di tahun 2014. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2014

| Keterangan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tingkat Kemiskinan (persen) | 10,56 | 10,09 | 8,82 | 7,74 | 6,98 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 20.300 | 19.570 | 18.180 | 16.420 | 15.220 |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 192.100 | 198.273 | 204.510 | 210.686 | 216.905 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2010-2014



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2012-2014 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM merupakan menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

Tabel 2.11 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Angka melek huruf | 96,38 | 97,27 | 97,29 | 97,33 | 97,48 | 97,53* |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | | | | | 12,19 | 12,36 |
| 3 | Angka rata-rata lama sekolah | 7,77 | 8,24 | 8,24 | 8,26 | 7,99 | 8,03 |
| 4 | Angka partisipasi kasar | | | | | | |
| | - APK SD/MI | 110,99 | 103,99 | 110,38 | 109,14 | 110,38 | 108,61 |
| | - APK SMP/MTs | 71,3 | 79,13 | 73,52 | 70,93 | 80,98 | 90,93 |
| | - APK SMA/SMK/MA | 59,82 | 69,13 | 52,5 | 60,66 | 82,99 | 72,98 |
| 5 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | |
| | - APM SD/MI | 94,62 | 94,75 | 97,55 | 98,12 | 98,64 | 100,00 |
| | - APM SMP/MTs | 59,55 | 59,12 | 60,28 | 60,31 | 65,69 | 78,33 |
| | - APM SMA/SMK/MA | 47,47 | 44,14 | 40,68 | 51,74 | 63,34 | 57,21 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke

atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2011 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,29 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 3%.

Pada angka rata-rata lama sekolah, terjadi penurunan dari capaian tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 8,26 menjadi 7,99, perubahan ini sejalan dengan perubahan perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru, sedangkan di tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah kembali meningkat menjadi 8,03, angka ini sebanding dengan kelas 8 SMP/MTs.

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah yang berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 103,99 menjadi 110,23 di tahun 2015. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 79,13 di tahun 2011 menjadi 80,99 di tahun 2014. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan percepatan capaian APK dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2011 hanya sebesar 69,13 menjadi 82,99 di tahun 2014.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, , terakhir pada angka 98,64, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 65,69 dan 63,34. Sehingga kedua tingkatan pendidikan ini masih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan tingkat SD/MI.

Meningkatnya APK maupun APM tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selain didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan, juga didukung oleh program pusat maupun daerah dalam berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dukungan beasiswa dari badan amil zakat bagi siswa kurang mampu. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

Adanya selisih yang cukup besar antara capaian APK dengan APM untuk setiap tingkatan sekolah, menunjukkan adanya ketidak tepatan usia anak yang bersekolah dengan usia sekolah yang seharusnya. Selisih tertinggi ada pada tingkat sekolah SMA/SMK/MA, selisih terendah ada pada tingkat sekolah SD//MI. melihat hal ini maka kebijakan yang dilakukan mestinya adalah penerimaan siswa sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka kematian bayi (AKB) | 17,95 | 5,86 | 25,11 | 21,54 | 15,10 | 20,15 |
| <i>Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)</i> | 59 | 21 | 76 | 81 | 58 | 79 |
| <i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i> | 3,287 | 3.581 | 3.027 | 3.761 | 3.841 | 3.921 |
| Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 153 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2016

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 17,95 di tahun 2010, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Masih relatif tingginya AKB ini perlu menjadi perhatian khusus ke depan. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter) , penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga kesehatan.

- Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM.

Dilihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan cukup relevan dengan kondisi yang ada, naiknya capaian AHH ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IPM kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari perkembangannya, kenaikan tertinggi adalah dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 66,55 tahun menjadi 69,76 tahun

Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)

| No | Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Angka Harapan Hidup | 66,00 | 66,25 | 66,50 | 66,55 | 69,76 | 70,16 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multi-etnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. Dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

2. Pemuda dan Olahraga

Dampak Kab. Dharmasraya menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2014 menjadikan jumlah sarana dan prasarana olah raga semakin bertambah. Setiap tahun Kabupaten Dharmasraya juga tidak ketinggalan dalam kegiatan (*even*) Tour De Singkarak. Hal ini perlu diikuti dengan pembinaan olahraga semakin baik dari tahun ke tahun. Diharapkan dari tahun ke tahun hendaknya lahir atlet-atlet berprestasi di kancah Nasional ataupun Internasional.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum, bidang pelayanan pada masing-masing bidang urusan belum disesuaikan dengan bidang-urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

Dalam menganalisa kondisi umum daerah pada masing-masing urusan, maka disajikan berdasarkan ketersediaan data yang tersedia, baik data yang bersal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data yang berasal dari Perangkat daerah (PD) terkait.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

pelayanan dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

1. Bidang Pendidikan

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja.

a) Angka Partisipasi sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) maupun pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan. APS menunjukkan persentase penduduk yang dikelompokkan pada usia jenjang pendidikan yang diserap oleh sistem pendidikan berdasarkan kelompok umur tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. APS digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah | | | | | | |
| | - APS 7-12 Tahun | 97,77 | 99,30 | 98,74 | 98,68 | 99,63 | n/a |
| | - APS 13-15 Tahun | 80,3 | 84,68 | 86,69 | 86,40 | 94,51 | n/a |
| | - APS 16-18 Tahun | 56,41 | 54,69 | 52,86 | 59,91 | 77,68 | n/a |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,63, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 94,51, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masih terdapat lebih dari 5% penduduk usia sekolah belum tertampung oleh sistem pendidikan. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

Untuk APS 16-18 memiliki capaian yang masih rendah, dengan capaian sebesar 77,68 tersebut masih terdapat sekitar 22,32 persen penduduk usia sekolah tersebut belum mengenyam pendidikan pada jenjang formal.

- b) Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS)/ Penduduk Usia Sekolah
Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

**Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | RKS SD/MI | n/a | 57,91 | 56,76 | 56,39 | 61,66 | 61,58 |
| | Jumlah gedung sekolah SD/MI | n/a | 139 | 139 | 139 | 153 | 154 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | n/a | 24.004 | 24.487 | 24.649 | 24.812 | 24.976 |
| 2 | RKS SMP/MTs | n/a | 26,27 | 28,95 | 33,10 | 51,97 | 54,79 |
| | Jumlah gedung sekolah SMP/MTs | n/a | 31 | 31 | 31 | 49 | 55 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | n/a | 11.801 | 10.707 | 9.366 | 9.428 | 9.490 |
| 2 | RKS SMA/SMK/MA | n/a | 18 | 13,27 | 16,21 | 25,10 | 29,28 |
| | Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA | n/a | 12 | 12 | 17 | 25 | 30 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | n/a | 6.525 | 9.044 | 10.490 | 9.960 | 10.245 |

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan * = data tidak tersedia

Capaian RKS untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MS mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan sekolah sekolah SD/MI sebanyak 15, untuk tingkat SMP/MTs terlihat penambahan sebanyak 11 unit sekolah, sedangkan untuk tingkat SMA.SMK/MS terdapat penambahan sebanyak 18 unit sekolah. Dengan adanya penambahan unit sekolah tersebut berpengaruh pada naiknya capaian RKS untuk semua tingkatan sekolah

- c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio guru/murid tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami fluktuasi, namun secara umum tren mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah guru yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa seorang guru SD membina anak sebanyak 15 orang, dan untuk seorang guru SMP membina 14 siswa. Hal ini menggambarkan ketercukupan guru, tetapi perlu pemerataan guru secara proporsional.

**Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio Guru : Murid | | | | |
| | Rasio guru/murid SD/MI | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 14 | 1 : 14 |
| | Rasio guru/murid SMP/MTs | 1 : 9 | 1 : 11 | 1 : 14 | 1 : 14 |
| 2 | Rasio guru/ murid SD/MI (per 10.000) | 13.36 | 15.42 | 14.80 | 14.98 |
| | Jumlah guru SD/MI | 1.963 | 1.770 | 1.869 | 1.882 |
| | Jumlah Murid (SD/MI) | 26.833 | 27.288 | 27.671 | 28.201 |
| 3 | Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000) | 12.12 | 13.01 | 10.05 | 13.59 |
| | Jumlah guru SMP/MTs | 626 | 583 | 722 | 773 |
| | Jumlah Murid (SMP/MTs) | 6.840 | 7.587 | 9.776 | 10.508 |

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

d) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah kejadian putus sekolah untuk SD tercatat sebanyak 50 kasus, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tercatat sebanyak 41 kasus. Diantara 11 kecamatan, terdapat 3 kecamatan dengan tidak adanya kejadian putus sekolah, yaitu Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk Madrasah Ibtidayah (MI) tidak terlihat adanya putus sekolah di tahun 2013. Sedangkan kejadian putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar untuk tingkat SD maupun SMP/MTs dengan jumlah kejadian 31 siswa, diantaranya 11 untuk tingkat SD dan 21 untuk tingkat SD/MI,

Untuk menekan dan menanggulangi kejadian putus sekolah perlu dilakukan strategi melalui analisis penyebab kejadian yang ada, baik dari sisi kemiskinan, kenakalan remaja maupun faktor lainnya. Setelah ini baru dilakukan tindak lanjut, apakah ini dilakukan melalui pembinaan maupun melalui pemberian beasiswa.

**Tabel 2.17 Jumlah Siswa Putus Sekolah
Kabupaten Dharmasraya**

| No. | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | SD | MI | Jumlah | SMP | MTs | Jumlah |
| 1 | Sungai Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koto Besar | 11 | 0 | 11 | 16 | 4 | 20 |
| 3 | Asam Jujuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koto Baru | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Koto Salak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tiumang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Padang Laweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sitiung | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Timpeh | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Pulau Punjung | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | IX Koto | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 50 | 0 | 50 | 28 | 13 | 41 |

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Kesehatan

Untuk melihat perkembangan dan capaian pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator berikut :

a) Rasio posyandu per satuan balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui pendidikan gizi seimbang untuk keluarga. Peran masyarakat adalah dalam bentuk pembentukan kader Posyandu yang telah terbentuk hampir di setiap jorong. Pelayanan yang diberikan oleh Posyandu ini terutama bagi anak bawah lima tahun (Balita), serta pelayanan bagi ibu hamil. Sasaran yang dituju dari Posyandu adalah peningkatan gizi balita, penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, serta pelayanan KB.

**Tabel 2.18 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita) | 10,88 | 10,13 | 12,30 | 10,22 | 9,93 | 9,34 |
| | <i>Jumlah posyandu</i> | 198 | 230 | 257 | 257 | 257 | 243 |
| | <i>Jumlah balita</i> | 18.204 | 22.702 | 20.902 | 25.147 | 25.888 | 26.025 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, rasio posyandu terhadap balita cenderung mengalami sedikit penurunan, hal ini dipicu oleh tingginya pertambahan jumlah balita dibandingkan dengan perkembangan jumlah Posyandu yang ada. Jika di tahun 2010 rasionya sebesar 10,88 mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 9,34. Kebijakan yang penting disini adalah dalam bentuk revitalisasi peran posyandu, peningkatan aktivitas kader posyandu serta peran bidan desa dan puskesmas sebagai mitra kader di tingkat jorong. Revitalisasi posyandu ini dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan juga lansia.

b) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan jenis fasilitas tingkat pertama (FKTP) yang langsung melayani masyarakat pada lingkup pelayanan dasar. Program nasional yang terkait dengan ini yaitu berupa pemanfaatan dana BOK yang difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan SDGs bidang kesehatan. Selain dana BOK, operasional Puskesmas juga didukung langsung oleh dana APBD kabupaten

Untuk percepatan peningkatan mutu, pemerintah daerah juga telah mendorong seluruh Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu upaya peningkatan pelayanan di tingkat puskesmas

adalah pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang telah berjalan baik untuk rawat jalan dan/atau rawat inap Puskesmas.

Tabel 2.19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk | 0,281 | 0,277 | 0,318 | 0,361 | 0,369 | 0,363 |
| Jumlah Puskesmas | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Jumlah Poliklinik/Klinik | 0 | 0 | 10 | 19 | 23 | 24 |
| Jumlah Pustu | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Jumlah Penduduk | 192.100 | 198.298 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.120 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Saat ini Dharmasraya sudah memiliki 13 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung dan kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah ada sebanyak 44 unit. Disamping sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, juga terdapat 44 klinik yang dikelola oleh swasta.

c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2015 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Namun dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, maka telah dilakukan berbagai upaya, peningkatan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang inap, penambahan fasilitas alat kesehatan, sisi lain yang dilakukan adalah penataan manajemen, serta peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis dan paramedis. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada yaitu masih kurangnya ruang inap yang kurang mampu mengiringi penambahan jumlah pasien rawat inap masih menjadi permasalahan utama. Ke depan perlu jalan keluar yang lebih jelas seperti lanjutan pembangunan gedung RSUD yang baru.

Tabel 2.20 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
| | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Rumah Sakit Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah seluruh Rumah Sakit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Penduduk | 192.100 | 198.298 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.112 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang terletak di Pulau Punjung merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2010 menjadi 0,004 di tahun 2015.

d) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi diantaranya terdapatnya kasus anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah komplikasi kebidanan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian mulai tahun 2011 semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

**Tabel 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu | 608 | 361 | 390 | 559 | 822 | 838 |
| Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama | 735 | 361 | 390 | 559 | 822 | 838 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

e) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Perlunya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan guna meminimalisir penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 66 | 85 | 94 | 86 | 100 | 93 |
| Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu | 2.923 | 3.523 | 3.542 | 3.595 | 3.660 | 3.741 |
| Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama | 4.414 | 4.162 | 3.778 | 4.184 | 3.660 | 4070 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalian yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami kenaikan dari 66 persen di tahun 2010, di tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan cakupan menjadi 93 persen.

f) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT, setiap tahunnya jorong yang telah terlaksana UCI meningkat, dari 76 % di tahun 2010 menjadi 85% di tahun 2015. Sehingga secara umum terjadi peningkatan cakupan layanan sampai tahun 2015.

**Tabel 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 76 | 67 | 63 | 60 | 70 | 85 |
| | Jumlah Desa / Kelurahan UCI | 197 | 174 | 165 | 155 | 183 | 220 |
| | Jumlah Desa / Kelurahan | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

g) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi anak balita. secara komitmen global (SUN-Scaling Up Nutrition) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 3 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi. Pada tahun 2012 belum semua balita yang mengalami gizi buruk tertangani, mulai tahun 2013 terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah balita gizi buruk dan semua balita gizi buruk sudah tertangani.

Tabel 2.24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu | 5 | 101 | 82 | 53 | 53 | 14 |
| Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama | 5 | 101 | 98 | 53 | 53 | 14 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

h) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC BTA dan DBD)

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

Jenis penyakit yang tergolong penyakit menular adalah DBD, TB dan malaria. Pada akhir tahun 2015 Dharmasraya mengalami KLB kasus DBD dengan telah jatuhnya korban meninggal dunia. Untuk itu dalam rangka menanggulangi dampak yang lebih buruk, maka dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan melakukan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh.

Sedangkan untuk kasus TBC BTA, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan keengganan pasien suspect TBC yang tidak melapor dan datang ke Puskesmas sehingga dilakukan kunjungan rumah ke rumah, sehingga pada tahun 2015, 100% pasien TBC yang terlayani termasuk juga kasus DBD. Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini perlu adanya peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagi masyarakat, terutama di lingkungan yang ada masyarakat kasus TBC BTA.

Tabel 2.25 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun | 114 | 146 | 168 | 140 | 147 | 188 |
| | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama | 299 | 146 | 168 | 140 | 147 | 188 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun | n/a | 23 | 45 | 109 | 35 | 135 |
| | Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama | n/a | 23 | 45 | 109 | 35 | 135 |

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari tahun 2010 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 73,49% menjadi 173,43%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah kunjungan pasien miskin, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Program JKN ini dilaksanakan melalui pemberian kartu BPJS dan kartu Indonesia sehat. Dengan adanya pemberian kartu BPJS dan KIS kepada masyarakat miskin, maka berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien miskin ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah sakit, diharapkan hal ini juga adanya peningkatan layanan masyarakat miskin pada klinik swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Lalu dari tahun ke tahun peserta JKN dari Penerima Bantuan iuran (PBI) Daerah dilakukan validasi sehingga penerima kartu BPJS dan KIS yang dibiayai oleh pemerintah tepat sasaran.

Tabel 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 86 | 73,49 | 70,50 | 190,10 | 140,60 | 173,43 |
| | Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 | 27.503 | 14.382 | 12.817 | 31.215 | 21.400 | 24.480 |
| | Jumlah seluruh penduduk miskin | 32.032 | 19.570 | 18.180 | 16.420 | 15.220 | 14.115 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

j) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Facilities health Puskesmas and Pustu already good, from 11 kecamatan, at this time already there are 13 Puskesmas, while for Pustu, not all nagari have Pustu.

Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Cakupan puskesmas | 91 | 109 | 109 | 118 | 118 | 118 |
| | Jumlah Puskesmas | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| | Jumlah seluruh Kecamatan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. | Cakupan pembantu puskesmas | 88 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| | Jumlah Pustu | 46 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| | Jumlah Desa / Kelurahan | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

3.1. Pekerjaan Umum

- Proporsi Jalan Mantap

Development of public works sector more focused on infrastructure building which consists of transportation and public works. Works related to building roads, bridges, waste management, irrigation and environment planning. Based on basic data roads, Kabupaten Dharmasraya divided into 3 classes namely: national road with length 60,62 km; provincial road length 83,50 km; kabupaten road 1035,72 km, so the total length of roads that are in Kabupaten Dharmasraya amount to 1179,84 km.

Tabel 2.28 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|---------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 1. | Proporsi panjang jaringan jalan mantap | 47,59 | 63,44 | 74,05 | 75,89 | 76,14 | 66,70 |
| | Panjang jalan kondisi baik | 623 | 860 | 874 | 895 | 898 | 787 |
| | Panjang Jalan(Km) | 1.308,9 | 1.356,00 | 1.179,84 | 1.179,84 | 1.179,84 | 1.180 |
| 2. | Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap (> 40 KM/Jam) | 42,49 | 52,23 | 83,01 | 83,01 | 86,39 | 86,71 |
| | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 505,7 | 632 | 860 | 860 | 895 | 898 |
| | Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut | 1.189,9 | 1.210 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

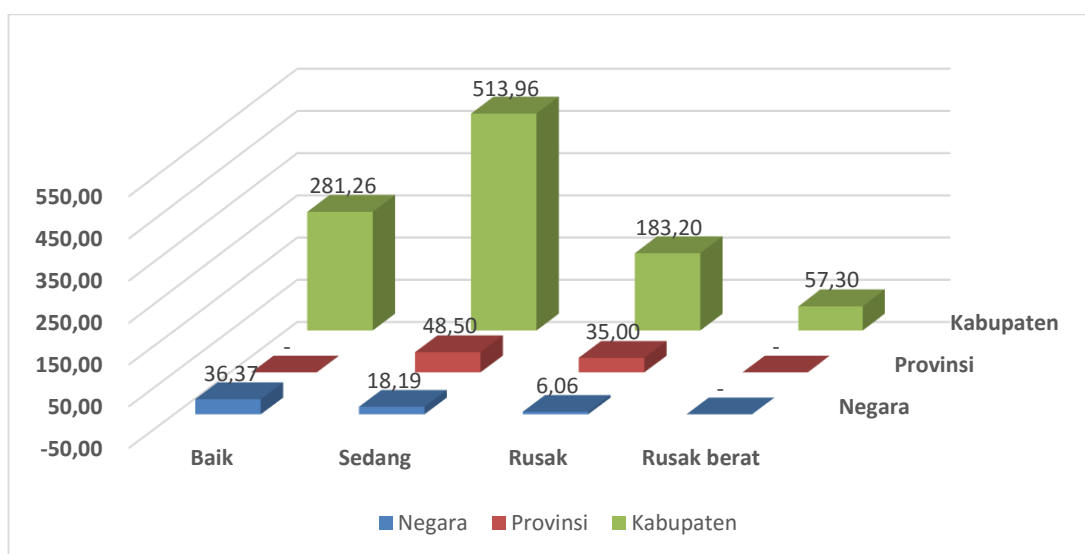
Condition of roads in good condition, good kabupaten roads even overall class of roads that are showing an increase that is quite good. Proportion of road length kabupaten that is good shows a higher number than the proportion of road length overall. For more details can be seen in the table below

Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

| Kondisi Jalan | Status | | | Jumlah |
|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| | Negara | Provinsi | Kabupaten | |
| Baik | 36,37 | 0 | 281,26 | 317,63 |
| Sedang | 18,19 | 48,50 | 513,96 | 580,65 |
| Rusak | 6,06 | 35,00 | 183,20 | 224,26 |
| Rusak berat | 0 | 0 | 57,30 | 57,30 |
| Total | 60,62 | 83,5 | 1035,72 | 1179,84 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.4. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tabel 2.30 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | n/a | n/a | 0,21 | 0,43 | 0,36 | 1,43 |
| Jumlah daya tampung TPS (m ³) | n/a | n/a | 42 | 90 | 78 | 320 |
| Jumlah penduduk | 192.100 | 198.298 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.120 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan rasio TPS perseribu penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kondisi jumlah TPS yang belum ideal. Idealnya 250 penduduk terdapat 1 (satu) TPS dalam bentuk kontainer dengan kapasitas 5 m³. Karena rasio tersebut membandingkan dengan jumlah penduduk tanpa membedakan penduduk wilayah perkotaan dan pedesaan, maka masih terdapat banyak kekurangan jumlah kontainer terutamanya wilayah di perkotaan.

3.2. Bidang Penataan Ruang

Penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ruang pembangunan. Saat ini hal-hal yang terkait dengan tata ruang dilakukan lintas sektoral dalam wadah yang disebut dengan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang telah aktif dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Perda tata ruang (RTRW), namun kegiatan ini masih dalam lingkup peta skala kecil oleh sebab itu masih diperlukan pendetilan skala peta agar arahan pembangunan penataan ruang lebih sempurna. Sampai tahun 2015 telah dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebanyak 2 lokasi yaitu kota Pulau Punjung dan Kota Koto Baru yang saat ini dalam proses mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dimasa yang akan datang agar Kabupaten Dharmasraya mampu mengelola ruang dengan baik dibutuhkan citra resolusi tinggi untuk seluruh wilayah Kabupaten sebagai input perencanaan tata ruang.

**Tabel 2.31 Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Usaha untuk membuat rencana tata ruang sudah dilakukan sejak tahun 2011 dengan adanya dokumen perencanaan kawasan strategis provinsi Sungai rumbai yang selanjutnya disusul dengan tersusunnya dokumen RTRW Kabupaten yang telah diperdakan tahun 2012. Sampai tahun 2015 dokumen rencanan penataan ruang sudah tersedia sebanyak 4 dokumen, yang terdiri dari RTRW Kabupaten, Zoning Regulation Kawasan Strategi Sungai Rumbai, RDTR Kawasan Pulau Punjung, dan RDTR Kawasan Koto Baru.

4. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Hingga tahun 2014, cakupan rumah tangga yang teraliri listrik mengalami peningkatan yang cukup baik, dari 83% di tahun 2012 menjadi 91% di tahun 2014, salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rentang waktu tersebut adalah telah dilakukannya penambahan jaringan listrik untuk 2 kecamatan yaitu Kec. Asam Jujuhan dan Kec. IX Koto, sehingga di tahun 2012 semua kecamatan sudah teraliri listrik, serta penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) maupun penambahan jaringan tegangan rendah (JTM) untuk melayani rumah tangga yang belum teraliri listrik. Sedangkan untuk rumah tangga bersanitasi baru mencapai 67%, sehingga di masa mendatang capaian ini perlu ditingkatkan lagi.

**Tabel 2.32 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Rumah tangga pengguna listrik | 71 | 75 | 83 | 84 | 91 | 91,5 |
| | Jumlah rumah tangga pengguna listrik | 33.140 | 36.327 | 40.420 | 41.350 | 45.623 | 45.882 |
| | Jumlah rumah tangga | 46.438 | 48.385 | 48.681 | 49.373 | 49.877 | 50.137 |
| 2. | Rumah tangga ber-Sanitasi | n/a | n/a | n/a | n/a | 67 | n/a |
| | Jumlah rumah tangga ber sanitasi | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.661 | n/a |
| | Jumlah rumah tangga | 46.438 | n/a | 48.681 | 49.373 | 49.877 | n/a |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Dinas ESDM Kab. Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Kesadaran berbangsa, keikutsertaan dalam pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam bentuk organisasi baik berupa LSM, ormas dan OKP. Pembinaan bagi kegiatan keorganisasiaan tersebut dilakukan oleh bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Politik yang berkeadaban perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya, dan agen-agen pembangunan berupa LSM perlu mendapat tempat untuk menjadi jembatan perubahan menuju masyarakat yang madani. Organisasi massa yang saat ini berkembang berlatar belakang pendidikan, kepemudaan dan agama perlu dibina sebagai aset pembangunan daerah.

**Tabel 2.33 Indikator Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Sosial

Masyarakat penderita masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih banyak di Kabupaten Dharmasraya. Bantuan sosial yang diberikan setiap tahunnya cenderung naik, sehingga jumlah cakupan PMKS juga menurun. Saat ini telah ada panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 3 buah, Namun dari segi cakupan pelayanan yang rendah tahun 2014 maka sejalan dengan kegiatan pembangunan maka diperlukan program-program kemandirian sehingga para PMKS dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat dan hidupnya lebih mandiri. Ini memerlukan program pembinaan dengan kader-kader pembina sosial yang perlu ditingkatkan jumlahnya.

**Tabel 2.34 Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1. | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | n/a | 30,34 | 27,05 | 74,53 | 40,79 | 74,53 |
| | Jumlah PMKS yg diberikan bantuan | n/a | 850 | 1.827 | 9.566 | 5.235 | 9.566 |
| | Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan | n/a | 2.802 | 6.755 | 12.835 | 12.835 | 12.835 |
| 3. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | n/a | 13,34 | 17,34 | 74,53 | 40,79 | 74,53 |
| | Jumlah PMKS yg tertangani | n/a | 1.078 | 1.400 | 9.566 | 5.235 | 9.566 |
| | Jumlah PMKS yg ada | n/a | 8.078 | 8.076 | 12.835 | 12.835 | 12.835 |

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

A.2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Bidang Tenaga kerja

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70 % dengan tingkat pengangguran 2,05% pada tahun 2014. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2011 yang berjumlah 6,21 % merupakan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berkembangnya perekonomian Dharmasraya, pusat-pusat perkotaan dan perkebunan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Angka partisipasi angkatan kerja | 69,21 | 68,93 | 72,01 | 69,54 | 69,59 | 65,88 |
| | Angkatan kerja 15 tahun keatas | 90.963 | 90.816 | 96.355 | 97.243 | 105.322 | 102.851 |
| | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | 131340 | 131.755 | 133.807 | 139.828 | 151.347 | 156.118 |
| 2. | Tingkat Pengangguran | 2,7 | n/a | 6,21 | 5,13 | 2,05 | 3,51 |

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap nagari telah diakui keberadaannya (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada, begitu juga halnya dengan PKK.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terjadi kenaikan kasus pada Tahun 2015 sedangkan yang tertangani semakin sedikit.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, KDRT dapat ditangani seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat KDRT lagi dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa KDRT ini merupakan puncak gunung es yang sewaktu-waktu dapat meletus. Oleh sebab itu bidang yang menangani harus proaktif melakukan sosialisasi akan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.36 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | | 82,40 | 82,40 | 83,04 | 77,87 | 67,66 |
| | Pekerja perempuan di lembaga pemerintah | | 2.434 | 2.434 | 2.453 | 2.453 | 2.368 |
| | Jumlah pekerja perempuan | | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 3.150 | 3.500 |
| 2 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | | 170 | 268 | 265 | 249 | 224 |
| | Pekerja perempuan di lembaga swasta | | 5.030 | | | | |
| | Jumlah pekerja perempuan | | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 3.150 | 3.500 |
| 3. | Rasio KDRT | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| | Jumlah KDRT | | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| | Jumlah rumah tangga | | 48.385 | 48.681 | 49.373 | 49.877 | 59.490 |
| 4 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | | n/a | 83 | 79 | 52 | 32 |
| | Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan | | n/a | 35 | 74 | 25 | 7 |
| | Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak | | n/a | 54 | 94 | 48 | 56 |

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan terjadinya penurunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2011-2015 menjadi 67,66%, sedangkan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami fluktuasi. Dilihat berdasarkan data rasio KDRT dari tahun 2011-2015 juga mengalami penurunan begitu juga dengan tingkat penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 menjadi 32 kasus.

3. Bidang Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sudah menjadi isu nasional untuk ditetapkan areanya. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Bendungan Batanghari dengan debit 30.000 meter kubik diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Oleh sebab itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi areal LP2B. Saat ini telah terinventarisir 2079, 4 Ha lahan yang terpetakan untuk dijadikan LP2B, 4698,5 Ha yang sudah terdata, sehingga ada 2590,3 Ha lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dari 33.766 Ha lahan potensi yang bisa dikembangkan dari lahan kering dan rawa. Penetapan ini

nantinya dikukuhkan melalui perda. Oleh sebab itu perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mensosialisasikannya.

4. Bidang Pertanahan

Kepastian akan hak tanah bagi masyarakat merupakan salah satu unsur keamanan, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat beberapa kasus pertanahan membutuhkan penanganan yang baik, namun kasus tersebut makin lama makin menurun. Oleh sebab itu bidang pertanahan harus proaktif dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikasi lahan bagi masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi program nasional, karena masih terdapat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat.

**Tabel 2.37 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 0,07 | 1,23 | 0,93 | 0,91 | 1,98 | 0,22 |
| | Jumlah Luas Lahan bersertifikat | 125 | 2.433 | 1.892 | 1.907 | 4.286 | 499 |
| | Jumlah penduduk | 192.100 | 198.298 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.731 |
| 2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | n/a | 33 | 33 | 60 | n/a | n/a |
| | Jumlah kasus yang diselesaikan | n/a | 4 | 4 | 3 | n/a | n/a |
| | Jumlah kasus yang terdaftar | n/a | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 |

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Lingkungan hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian, perlu mendapat perhatian utama dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.38 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Persentase penanganan sampah | n/a | n/a | 0,95 | 1,78 | 1,81 | 2,07 |
| | Volume sampah yang ditangani (ton) | n/a | n/a | 1.860 | 3.720 | 3.840 | 4.416 |
| | Volume produksi sampah (ton) | n/a | n/a | 195.435 | 209.520 | 211.637 | 213.776 |
| 2. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | | | 0,21 | 0,43 | 0,36 | 0,43 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|---------|---------|---------|---------|
| | Jumlah daya tampung TPS (m3) | | | 42 | 90 | 78 | 96 |
| | Jumlah penduduk | | | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.120 |
| 4. | Penegakan hukum lingkungan | | 100 | 100 | 77,78 | 60,00 | 100 |
| | Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda | | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| | Jumlah kasus lingk.yang ada | | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 |

Sumber : BLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Jika dilihat dari indikator lingkungan hidup, salah satu sumber pencemaran adalah besarnya volume sampah yang tidak tertangani. Walaupun kondisinya volume sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, namun masih diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi volume sampah akhir dalam bentuk kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga jumlah pada Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) akan semakin berkurang. Dimasa yang akan datang perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup perlu penanganan 3R yang terpadu dikembangkan di setiap kecamatan.

Penegakan hukum lingkungan juga menjadi hal yang sudah menjadi perhatian perangkat daerah, tahun 2011 dengan jumlah 4 kasus lingkungan tertangani seluruhnya, walaupun tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi penurunan penyelesaian kasus, namun di tahun 2015 semua kasus kembali tertangani dengan baik.

6. Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Jenis layanan yang dilaksanakan untuk bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengeluarkan 4 (empat) jenis dokumen kependudukan, diantaranya Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Keempat dokumen ini menggambarkan peristiwa penting bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan adanya terdatanya status kependudukan ini akan memperjelas kondisi dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan.

Mulai tahun 2016, data kependudukan ini juga akan dijadikan data dasar yang berhubungan dengan kependudukan misalnya jumlah penduduk, penduduk berdasarkan kelompok umur, dsb. Dalam pelaksanaannya maka perangkat daerah yang melaksanakan bidang ini dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keagamaan Kabupaten Dharmasraya khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Hal ini guna pemutakhiran data terkait dengan data bidang kependudukan.

**Tabel 2.39 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga | | n/a | 80 | 91 | 99 | 100 |
| 2. | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | | 88,00 | 89,00 | 91,00 | 91,00 | 90,93 |
| | Jumlah penduduk usia>17 yang berKTP | | 115.885 | 119.613 | 123.230 | 124.450 | 125.266 |
| | Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah | | 131.688 | 134.397 | 135.418 | 136.758 | 137.758 |
| 3. | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | | 218,08 | 6,04 | 8,62 | 11,18 | 13 |
| | Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran | | 8.433 | 12.358 | 18.158 | 24.245 | 28.187 |
| | Jumlah penduduk | | 3.867 | 204.480 | 210.689 | 216.905 | 223.731 |
| 4. | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | | ada | ada | Ada | ada | ada |
| 5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pelayanan identitas warga negara berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio penduduk yang memiliki KK dan KTP di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun kepemilikan KK sudah mencapai 100 persen di tahun 2015, namun kepemilikan KTP belum mencaspai 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama yang baru memasuki umur 17 tahun untuk mengurus kepemilikan KTP, namun demikian terjadi peningkatan rasio kepemilikan KTP dari tahun 2011 sebesar 88 % meningkat hingga tahun 2015 telah mencakup sebanyak 90,93%. Hal ini ditunjang oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

Namun pada penerbitan akta kelahiran masih menunjukkan angka yang rendah. Hal tersebut karena masih rendahnya keinginan masyarakat melakukan pencatatan akta kelahiran. Dimasa yang akan datang sosialisasi pentingnya akta kelahiran termasuk akta kematian sebagai data dasar kependudukan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi negara khususnya keakuratan data kependudukan.

7. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dirlitan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada disetiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 63 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibina hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam

pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di perdesaan.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu hamil, balita dan bayi saat ini berjumlah 257 buah. Posyandu sangat penting artinya bersama sarana kesehatan lainnya untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi serta gizi buruk. Pada tahun 2015 jumlah posyandu aktif sebanyak 77% dan yang tidak aktif sebanyak 23%. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan yang pada sebagian wilayah di Kabupaten Dharmasraya masih dirasa kurang.

Tabel 2.40 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah kelompok binaan LPM | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Jumlah LPM | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | n/a | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| | Jumlah kelompok binaan PKK | | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah PKK | | n/a | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 3. | PKK aktif (%) | | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah PKK aktif | | n/a | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | Jumlah PKK | | n/a | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 4. | Posyandu aktif (%) | | n/a | 59 | 74 | 77 | 77 |
| | Jumlah Posyandu aktif | | n/a | 152 | 190 | 198 | 198 |
| | Jumlah posyandu | | n/a | 257 | 257 | 257 | 257 |

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Menindaklanjuti relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya angka kelahiran, maka diperlukan koordinasi antara penyuluh KB dan tenaga kesehatan di nagari termasuk sosialisasi pentingnya KB.

Peserta KB yang tidak mendapat pelayanan (*unmet need*) masih banyak terdapat. Oleh sebab itu peran kader dan penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) terutama mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkala maupun secara mandiri.

Keluarga sehat, keluarga pra sejahtera I jumlahnya semakin menurun namun masih dalam persentase yang tinggi. Oleh sebab itu program-program yang terkait dengan pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.41 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | 1,29 | 1,12 | 1,19 | 1,02 | 1,10 |
| | Jumlah anak | | 63.326 | 53.899 | 61.511 | 53.816 | 61.511 |
| | Jumlah keluarga | | 48.990 | 47.989 | 51.540 | 52.881 | 56.071 |
| 2. | Rasio akseptor KB | | 83 | 129,18 | 77,01 | 68,41 | 65,30 |
| | Jumlah akseptor KB | | 28.968 | 48.948 | 31.690 | 30.572 | 31.690 |
| | Jumlah pasangan usia subur | | 34.890 | 37.891 | 41.150 | 44.690 | 48.533 |
| 3. | Cakupan peserta KB aktif | | 15,37 | 18,90 | 15,68 | 14,44 | 13,30 |
| | Jumlah peserta program KB aktif | | 5.363 | 7.163 | 6.454 | 6.454 | 6.454 |
| | Jumlah pasangan usia subur | | 34.890 | 37.891 | 41.150 | 44.690 | 48.533 |
| 4. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | | 26,63 | 28,73 | 27,72 | 16,04 | 15,13 |
| | Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I | | 13.047 | 13.788 | 14.287 | 8.484 | 8.484 |
| | Jumlah keluarga | | 48.990 | 47.989 | 51.540 | 52.881 | 56.071 |

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

9. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terkait dengan kelancaran arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas yang tinggi seiring dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya menuntut Bidang perhubungan menyediakan rambu-rambu dan peraturan untuk keselamatan para penumpang, pengemudi dan pejalan kaki. Dengan adanya kelengkapan rambu-rambu tersebut, pemeriksaan secara reguler faktor keamanan berlalu lintas terutama kendaraan yang melaju di jalan negara, provinsi dan kabupaten bersama-sama kepolisian diharapkan bisa menekan angka kecelakaan sekaligus mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas.

10. Bidang Komunikasi dan informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini harus terkait dengan bidang-bidang lainnya sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

**Tabel 2.42 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Web site milik pemerintah daerah | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Pameran/ expo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Sumber : Dinas HUBKOMINFOPARBUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

11. Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Terkait dengan arah kebijakan nasional bahwa koperasi dan UKM dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, maka koperasi yang aktif setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahun 2011 semakin meningkat. Kesadaran untuk hidup bersama secara gotong royong menumbuhkan semakin banyaknya koperasi yang aktif kembali. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam pembinaan. Namun dari jumlah koperasi yang ada belum setengahnya yang aktif, sehingga dimasa yang akan datang jika benar-benar koperasi menjadi soko guru perekonomian maka kegiatan untuk mengaktifkan kembali koperasi dengan manajemen yang baik perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya.

Usaha mikro dan kecil yang terdata sampai tahun 2014 adalah sebanyak 2.419 buah. Jumlah ini tetap/stagnan dari tahun 2013. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UKMK yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UKMK dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data, jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 176 koperasi menjadi 200 koperasi. Sementara pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif hanya 93 koperasi atau 47% dari total koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.43 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Persentase koperasi aktif | | 30 | 32 | 34 | 45 | 47 |
| | Jumlah koperasi aktif | | 52 | 57 | 64 | 87 | 93 |
| | Jumlah seluruh koperasi | | 176 | 179 | 186 | 194 | 200 |

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

12. Bidang Penanaman modal

Modal yang ditanam di Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat pesat yang dibuktikan dengan pembangunan oleh pihak swasta melebihi pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pada lokasi-lokasi strategis yaitu di kiri-kanan jalan negara. Potensi Dharmasraya dengan kendala lahan yang kecil menyebabkan Dharmasraya sangat diminati oleh para investor terutama dalam bidang pertanian, dan jasa. Penanaman modal dimasa yang akan datang diharapkan muncul dari berbagai komponen masyarakat dalam bentuk ventura maupun sharing dengan pihak-pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat berupa koperasi dan badan usaha milik desa/nagari.

**Tabel 2.44 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/ Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Nilai realisasi investasi | 41.539.451.000. | 50.764.331.000 | 288.567.107.000 | 144.240.000.000 |
| 2. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 18 | 30 | 14 | 11 |

Sumber : BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

13. Bidang Kepemudaan dan olah raga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2011 sampai 2015. Ke depan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunann dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.45 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah organisasi pemuda | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Jumlah organisasi olahraga | | 18 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 3. | Jumlah kegiatan kepemudaan | | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Jumlah kegiatan olahraga | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Jumlah lapangan olahraga | | 100 | 100 | 100 | 88 | 78 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

14. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya. sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.46 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | ada | ada | ada |
| 2. | Buku "PDRB kabupaten" | ada | Ada | Ada | ada | ada | belum |

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

15. Bidang Persandian

Bidang persandian merupakan bidang urusan pemerintahan yang lahir berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang 23/2014. Bidang persandian bertujuan untuk Pengamanan Informasi pemerintah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat daerah kabupaten/kota yang akan diselenggarakan mulai tahun 2017.

16. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sjarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan budaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Kebudayaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Sumber : Dinas Hubkominfoarbud Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

17. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengindikasikan Budaya membaca saat ini kurang. Hal ini terasa dengan semakin sedikitnya waktu yang digunakan untuk membaca terutama anak-anak dan remaja dibanding waktu yang digunakan untuk hal lain terutama gadget dan teknologi informasi. Keberadaan pustaka yang menarik bagi anak-anak dan remaja maupun dewasa dan orang tua penting artinya dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat. Saat ini jumlah kunjungan-kunjungan ke perpustakaan daerah sangat rendah. Walaupun terjadi peningkatan dalam

kunjungan pada tahun 2015. Oleh sebab itu koleksi buku, faktor pelayanan di perpustakaan, dan kenyamanan selama diperpustakaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Jumlah perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | | 1,49 | 1,42 | 1,33 | 11,54 | 1,25 |
| | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun | | 448 | 426 | 614 | 5.333 | 16.232 |
| | Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | | 300 | 300 | 462 | 462 | 13.000 |
| 3 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | | 8.755 | 8.755 | 9.704 | 9.074 | 10.075 |

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

18. Bidang Kearsipan

Pengelolaan bidang kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 2 perangkat daerah. Dalam hal ini bukan berarti perangkat daerah lainnya belum sepenuhnya mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan kata lain penyimpanan dilakukan di perangkat daerah masing-masing, oleh sebab itu bidang kearsipan strategi agar seluruh perangkat daerah dapat mengelola arsip secara baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | Pengelolaan arsip secara baku | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 89,19 |
| | Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| | Jumlah perangkat daerah | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 5,41% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya menjadi 89,19% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan adanya sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini hanya 4 (empat) perangkat daerah yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

B. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan : adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

1. Bidang Kelautan dan perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup pesat, terlihat berdasarkan data pada tahun 2012 sebanyak 5.355 meningkat tajam hingga tahun 2014 menjadi 21.55 ton meski dibandingkan tahun berikutnya turun menjadi 19.909 ton. Pada indikator lainnya terlihat bahwa potensi perikanan darat sangat tinggi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah produksi perikanan terus meningkat. Walaupun belum memenuhi target namun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan). Seperti bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.50 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Produksi perikanan | 24 | 45 | 60 | 73 | |
| | Jumlah Produksi Ikan (Ton) | 1.533 | 5.355 | 11.348 | 21.565 | 19.909 |
| | Target produksi ikan Daerah (Ton) | 6.263 | 11.901 | 18.959 | 29.520 | |
| 2 | Konsumsi ikan | 96 | 95 | 100 | 97 | 99 |
| | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| | Target konsumsi Daerah (Kg) | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| 3 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 18,14 | 6,02 | 3,95 | 2,54 | 1 |
| | Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan | 338 | 343 | 467 | 561 | 340 |
| | Jumlah produksi ikan di daerah | 1.861 | 5.698 | 11.815 | 22.126 | 24.307 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Pariwisata

Kepariwisata masih belum berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Potensi-potensi wisata belum dikelola secara maksimal. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama di kiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

Dengan pendapatan per kapita yang tinggi maka kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin meningkat. Oleh sebab itu peningkatan objek wisata dapat mengurangi kebocoran keuangan daerah sehingga kemakmuran berputar kembali ke wilayah Dharmasraya.

3. Bidang Pertanian

Perkembangan bidang pertanian dapat dilihat dari nilai dan kontribusi produk yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto bidang pertanian menampilkan jumlah produksi pertanian bari berbagai sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dicermati bahwa nilai produksi setiap sub sektor selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dikarenakan faktor ekstensifikasi atau intensifikasi pertanian karena pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan.

**Tabel 2.51 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| No | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Nilai PDRB (juta) | | | | | | |
| | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.441.465,0 | 1.496.258,3 | 1.571.971,0 | 1.641.460,2 | 1.735.699,2 | 1.829.961,9 |
| | 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 1.290.694,5 | 1.338.792,3 | 1.408.559,6 | 1.467.424,2 | 1.556.692,4 | 1.637.881,7 |
| | a. Tanaman Pangan | 175.540,3 | 181.886,9 | 189.061,3 | 188.659,6 | 193.304,0 | 198.619,9 |
| | b. Tanaman Hortikultura | 18.873,9 | 19.808,8 | 19.653,3 | 19.907,2 | 21.396,1 | 22.394,5 |
| | c. Tanaman Perkebunan | 980.618,6 | 1.016.157,7 | 1.071.298,9 | 1.126.030,6 | 1.206.155,5 | 1.276.893,6 |
| | d. Peternakan | 86.516,8 | 91.260,6 | 98.215,8 | 101.759,8 | 103.937,2 | 107.200,8 |
| | e. Jasa Pertanian dan Perburuan | 29.144,9 | 29.678,3 | 30.330,3 | 31.067,0 | 31.899,6 | 32.772,9 |
| | 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu | 80.430,6 | 84.045,5 | 86.004,1 | 92.340,4 | 93.079,6 | 101.624,6 |
| | 3. Perikanan | 70.339,9 | 73.420,5 | 77.407,3 | 81.695,6 | 85.927,2 | 90.455,6 |
| | TOTAL PDRB | 4.542.599,4 | 4.840.425,6 | 5.140.195,7 | 5.474.455,1 | 5.816.312,7 | 6.118.296,7 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang terkendala misalnya kawasan lindung sangat sedikit terdapat di Dharmasraya. Sumber daya lahan telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari tabel kontribusi terlihat bahwa sumbangan setiap sub sektor hampir sama setiap tahun, namun jika dibanding dengan sektor lainnya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan jumlah produksi pada masing-masing sub sektor sekaligus konsentrasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang

-sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2010 sampai tahun 2015. Langkah menetapkan lahan pangan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmasraya sebagai lumbung

padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.52 Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| Keterangan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produksi | | | | | | |
| - Produksi GKP(ton) | 58.065 | 50.367 | 59.892 | 54.943 | 61.839 | 70.169 |
| - Konversi GKP-GKG | 86,02% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,82% |
| - Produksi GKG | 49.948 | 42.721 | 50.800 | 46.602 | 52.452 | 59.517 |
| - Konversi GKG-beras | 62,74% | 62,74% | 62,74% | 62,74% | 62,74% | 62,74% |
| - Produksi beras | 31.337 | 26.803 | 31.872 | 29.238 | 32.908 | 37.341 |
| Konsumsi lokal | | | | | | |
| - Jumlah penduduk | 192.100 | 198.273 | 198.273 | 210.686 | 216.905 | 223.120 |
| Tingkat konsumsi beras/ - tahun(kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - Konsumsi beras (ton) | 21.056 | 21.810 | 21.810 | 23.175 | 23.860 | 24.543 |
| Surplus/defisit beras | 10.281 | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 9.049 | 12.798 |

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

-sub sektor perkebunan

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

**Tabel 2.53 Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| Komoditi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Karet | 28.237,98 | 39.974,58 | 34.160,26 | 34.876,83 | 34.739,35 | 32.784,5 |
| Sawit | 371.413,19 | 400.822,76 | 360.079,27 | 313.955,57 | 349.285,31 | 74020 |
| Coklat | 603,66 | 716,85 | 894,76 | 1.124,52 | 1.148,30 | 1.208,04 |

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

-sub sektor peternakan

Dari delapan komoditi sub sektor peternakan, hampir semua komoditi mengalami perkembangan populasi positif, dan hanya itik yang tidak terjadi pengurangan. Perkembangan sapi potong didorong oleh berkembangnya integrasi sapi-sawit serta adanya berbagai skim kredit dari perbankan dan juga didukung kebijakan pemerintah untuk terus mendorong perkembangan sapi. Untuk populasi ayam

petelur maupun buras juga terjadi peningkatan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peternakan ayam, khususnya ayam pedaging

Tabel 2.54 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

| No | Komoditi | satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rerata tumbuh |
|----|-------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | Sapi potong | ekor | 36.293 | 26,945 | 31,449 | 34,593 | 39,512 | 40,785 | 7.42% |
| 2 | Kerbau | ekor | 12 | 4,402 | 4,881 | 3,476 | 5,716 | 5,973 | 7.14% |
| 3 | Kambing | ekor | 11.804 | 12,496 | 14,845 | 15,405 | 16,204 | 15,574 | 4.93% |
| 4 | Domba | ekor | | 187 | 195 | 215 | 277 | 312 | 13.37% |
| 5 | Ayam Buras | ekor | 67.637 | 97,357 | 104,194 | 126,197 | 134,774 | 139,485 | 8,65 % |
| 6 | Ayam Ras Petelur | ekor | n/a | 10,352 | 26,793 | 28,334 | 25,500 | 44,000 | 65% |
| 7 | Ayam Ras Pedaging | ekor | 477.640 | 3,478,800 | 2,720,082 | 3,531,798 | 4,737,000 | 4,301,600 | 4.73% |
| 8 | Itik | ekor | n/a | 32,033 | 20,100 | 17,785 | 18,410 | 18,948 | -8.17% |

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

4. Bidang Kehutanan

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan bidang pertanian yang juga berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan potensi hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap maka sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dapat menjadi andalan. Data menunjukkan terdapat peningkatan produksi kehutanan dan penebangan kayu dari tahun ke tahun. Isu yang terkait dengan masalah kehutanan terutama pemanasan global harus dikelola dengan baik sehingga tebang pilih dan tebang tanam menjadi pilihan pada sub sektor ini. Pada lahan-lahan yang kritis perlu dilakukan kegiatan RLKT (rehabilitasi lahan dan konservasi tanah) sehingga terdapat keseimbangan antara yang ditebang dengan yang ditanam. Tenaga pelaksana dilapangan seperti polisi hutan perlu di perkuat peranannya dan sosialisasi kemasyarakat untuk mengelola hutan lestari dapat ditingkatkan.

Tapal batas antar kawasan hutan saat ini masih dalam bentuk peta skala kecil, oleh sebab itu perlu peta skala besar untuk pendelinasian kawasan kehutanan, disamping itu daerah dapat memanfaatkan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-P) untuk mengelola kekayaan hutannya agar memberi manfaat lebih kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

5. Bidang Energi dan sumber daya mineral

Sumber daya mineral menghasilkan kontribusi hampir 11 % dari kontribusi keseluruhan sektor (14 sektor) produksi daerah. di dalam RTRW sudah di alokasikan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan, namun saat ini masih ada juga kegiatan penambangan liar. Penambangan liar yang baru tertangani adalah rata-rata 2 kasus setiap tahun tetapi pertumbuhan pertambahan liar tidak sebanding dengan jumlah penanganannya. Dampak

lingkungan pertambangan harus diminimalisir terutama pada kawasan hulu Sungai Batanghari. Walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi namun perlu kehati-hatian dalam mengelolanya karena sektor ini sensitif terhadap kerusakan lingkungan jika tidak diterapkan aturan-aturan yang berlaku.

Bidang Energi dan sumber daya mineral juga menangani permasalahan energi terutama ketersediaan arus listrik. Saat 85 % jorong yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah terlayani arus listrik, sehingga dimasa yang akan datang angka tersebut diharapkan menjadi 100 %.

**Tabel 2.55 Indikator Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pertambangan tanpa ijin | n/a | 50 | 67 | 10 | 10 | 0 |
| | Luas Penambangan Liar yang ditertibkan | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | Luas area penambangan yang liar | n/a | 4 | 3 | 20 | 20 | 3.400 |
| 2 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 11,5 | 12,2 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 9,81 |
| | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan | 524.346 | 627.943 | 678.993 | 741.044 | 783.142 | 762.109 |
| | Jumlah PDRB | 4.542.599 | 5.161.330 | 5.741.294 | 6.429.082 | 7.169.488 | 7.769.922 |

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang sekitar 12 s/d 13 % terhadap total PDRB pada tahun 2010 sampai 2015 atau kontribusinya mengalami kenaikan kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya (lihat tabel berikut). Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Pengembangan UKM dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan komitmen pemerintah untuk merenovasi pasar-pasar tradisional di setiap nagari atau kecamatan dan pelarangan pemodal besar masuk pada sektor *retail* (eceran). Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevilalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.56 Indikator Bidang Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 12,16 | 12,38 | 12,61 | 12,68 | 12,63 | 13,09 |
| | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan | 552.251 | 638.893 | 724.191 | 814.887 | 905.204 | 1.017.072 |
| | Jumlah PDRB | 4.542.599 | 5.161.330 | 5.741.294 | 6.429.082 | 7.169.488 | 7.769.922 |

Sumber : Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

7. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2011 sampai 2015 meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan yang lebih tinggi dari jumlah PDRB keseluruhan, sehingga kontribusi sektor industri terlihat menurun. Perkembangan industri hilir berbahan baku sumber daya alam yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya perlu didorong sehingga terjadi peningkatan nilai tambah yang besar dari kegiatan hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.57 Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 6,86 | 6,81 | 6,67 | 6,27 | 6,01 | 5,85 |
| | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri | 311.838,1 | 351.378 | 383.213 | 403.148 | 431.046 | 454.621,7 |
| | Jumlah PDRB | 4.542.599 | 5.161.330 | 5.741.295 | 6.429.083 | 7.169.488 | 7.769.922 |
| 2 | Pertumbuhan Industri. | n/a | 12 | 11 | 53 | n/a | 2 |
| | Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1) | n/a | 30 | 30 | 306 | n/a | 14 |
| | Jumlah Industri s/d Tahun n | n/a | 245 | 275 | 581 | 581 | 595 |
| 3 | Cakupan bina kelompok pengrajin | n/a | 19 | 13 | 17 | 48 | 42 |
| | Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n | n/a | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| | Jumlah kelompok pengrajin | n/a | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, dan BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai lokasi di Pulau Jawa. Saat ini program tersebut sudah selesai dilakukan dan lokasi-lokasi transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya ke Pemerintah Kabupaten. Berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya, maka masih tersedia alokasi lahan seluas 1000 hektar yang dapat digunakan untuk transmigrasi dan selebihnya dapat digunakan untuk relokasi penduduk yang mendiami kawasan lindung.

C. Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang perencanaan

Di tahun 2015, dari 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah terpenuhi, namun dokumen perencanaan yang diacu oleh dokumen rencana di bawahnya terutama untuk kesesuaian program dalam RPJMD dengan RKPD belum sepenuhnya sesuai. Sehingga ke depan perlu adanya usaha untuk peningkatan kualitas dokumen serta menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, sehingga program yang ada di dalam RPJMD dapat dilaksanakan dan terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.58 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Belum | belum | belum | belum | belum | Ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | Ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas. Pengeluaran ini termasuk juga pembelian barang yang tidak dapat diproduksi kembali seperti hasil karya seni dan barang antik. Barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan juga meubel yang digunakan untuk usaha rumah tangga harus dialokasikan secara proporsional.

**Tabel 2.59 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013**

| Bidang Urusan/Indikator | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta) | 34 | 36 | 41 |
| Total Pengeluaran RT (juta) | 1.635.468 | 1.775.727 | 2.045.232 |
| Jumlah rumah tangga | 48.385 | 48.681 | 49.373 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dilihat dari ketersediaan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bahwa perkembangan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami peningkatan sesuai dengan kenaikan total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu dari 34 juta rupiah menjadi 41 juta rupiah di tahun 2013

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

**Tabel 2.60 Nilai Tukar Petani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

| Bidang Urusan/Indikator | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|--------|--------|
| Nilai tukar petani | 102,06 | 100,94 |
| Indeks yang diterima petani | 105,11 | 103,52 |
| Indeks yang dibayar petani (lb) | 102,99 | 102,56 |

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dari hasil perhitungan nilai tukar petani di tahun 2012 dan tahun 2013 memperlihatkan adanya penurunan dari 102, 06 menjadi 100,94, hal ini lebih disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petanidari 105,11 menjadi 103,52. Melihat masih belum memadainya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian petani dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani.

2.4.3. Rasio ketersediaan listrik

Dengan adanya ketersediaan listrik di tingkat rumah tangga diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dan secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.

**Tabel 2.61 Rasio ketersediaan listrik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio ketersediaan daya listrik | n/a | 75 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| | Daya listrik terpasang | n/a | 39.142 | 43.552 | 44.554 | 45.793 | 47.140 |
| | Jumlah kebutuhan | n/a | 52.533 | 52.822 | 52.902 | 54.059 | 54.265 |

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Melihat pada perkembangan rasio ketersediaan listrik dari tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 75% menjadi 87% dengan pertumbuhan daya listrik terpasang sekitar 4,82% pertahunnya. Daya listrik terpasang pada tahun 2015 baru mencapai 47.140 kwh, angka ini lebih rendah dari jumlah kebutuhan seharusnya sebesar 54.265. sehingga ke depan masih membutuhkan penambahan pemasangan daya listrik

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka APBD ini ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah yaitu **efektif, efisien, transparan dan akuntabel**.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan, sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaansesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu (realisasi APBD), sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, diantaranya ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Terkait dengan isu strategis bidang pengelolaan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana isu strategis ini terkait dengan aturan turunan terkait yang akan muncul yang akan mengatur mengenai kebijakan keuangan maupun penganggaran di masa mendatang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan diatur melalui undang-undang
- (2) supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK,
- (3) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (4) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah
- (5) pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (6) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (8) Dana desa dan alokasi dana desa yang akan mengalami kenaikan secara signifikan hingga tahun 2019.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menjelaskan mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja serta pembiayaan daerah selama periode 2010 sampai dengan tahun 2015. Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari perkembangan nilai APBD, realisasi APBD terhadap perubahan APBD serta proporsi APBD.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Secara keseluruhan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 432,48 milyar di tahun 2010 menjadi 794,42 milyar di tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar 361,93 Milyar..

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015

| Kode Rek | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 432.488.449.352 | 505.671.150.963 | 518.496.319.806 | 595.137.456.697 | 687.279.316.499 | 794.425.975.047 | 16,74 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 25.541.706.459 | 34.511.853.042 | 39.200.742.610 | 32.902.332.260 | 52.811.257.415 | 56.694.339.206 | 24,39 |
| 4.1.1. | Hasil Pajak Daerah ¹⁾ | 4.051.589.756 | 5.809.882.466 | 6.351.542.897 | 6.846.731.838 | 10.419.529.313 | 10.643.026.951 | 32,54 |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah ¹⁾ | 10.248.647.179 | 10.961.396.172 | 11.438.254.287 | 12.229.401.811 | 24.150.243.783 | 7.148.667.913 | -6,05 |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.068.043.895 | 5.115.188.436 | 4.777.943.948 | 5.618.214.642 | 5.144.409.428 | 4.793.094.913 | 11,25 |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 8.173.425.629 | 12.625.385.968 | 16.633.001.478 | 8.207.983.969 | 13.097.074.891 | 34.109.549.429 | 63,46 |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 333.450.451.531 | 363.128.458.014 | 417.947.507.976 | 482.875.326.556 | 543.756.231.129 | 604.520.411.648 | 16,26 |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 29.789.530.331 | 27.826.375.150 | 30.096.431.976 | 27.939.498.556 | 27.747.425.470 | 23.905.825.648 | -3,95 |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | 266.175.621.200 | 297.587.682.864 | 351.295.616.000 | 400.374.128.000 | 445.128.175.659 | 477.807.496.000 | 15,90 |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 37.485.300.000 | 37.714.400.000 | 36.555.460.000 | 54.561.700.000 | 70.880.630.000 | 102.807.090.000 | 34,85 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 73.496.291.362 | 108.030.839.907 | 61.348.069.220 | 79.359.797.881 | 90.711.827.955 | 133.211.224.193 | 16,25 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | - | - | 884.890.220 | 1.883.418.650 | 3.449.929.943 | 2.088.016.102 | 45,32 |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 16.162.451.460 | 27.330.301.147 | 26.158.425.000 | 26.810.898.000 | 29.600.639.012 | 39.477.535.091 | 28,85 |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 57.245.639.902 | 78.722.818.760 | 34.304.754.000 | 43.740.254.000 | 53.281.259.000 | 86.570.673.000 | 10,25 |
| 4.3.5. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 88.200.000 | 1.977.720.000 | - | 6.925.227.231 | 4.380.000.000 | 5.075.000.000 | 1.130,79 |

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Besaran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat dijadikan ukuran kemandirian fiskal, jika semakin tahun semakin besar peranan PAD maka tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan maupun sumber lain akan semakin berkurang.

Dilihat dari perkembangan nilai PAD dari tahun 2010 hingga tahun 2015, nilai PAD cenderung mengalami kenaikan, meski pada tahun 2013 terlihat adanya penurunan dibanding tahun 2012. Jika pada tahun 2012 nilai PAD tercatat sebesar 39,2 milyar rupiah naik menjadi 56,69 milyar di tahun 2015 atau naik sekitar 17,49 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 24,39%.

- **hasil pajak daerah**, secara definisi, berdasarkan UU 28/2009 bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (*budegtary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.

Dilihat dari perkembangan terakhir, di tahun 2015 dari 13 jenis pajak yang dilaksanakan, hanya 2 jenis pajak yang mencapai tingkat realisaasi tinggi di atas 90%, yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi cukup besar yaitu 72,8% terhadap total pajak daerah , sedangkan 9 jenis pajak lainnya masih realisasinya berada di bawah 50%. Pada jenis pajak lain, seperti PBB-P2 dari 3,62 milyar yang ditargetkan hanya terealisasi sebesar 1,54 milyar atau sebesar 42,63%, maka untuk meningkatkan jumlah serta capaian PBB-P2 maka pada tahun 2016 pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB-P2, diharapkan dengan adanya pendataan ulang tersebut maka akan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan besaran PDBB-P2 ke depannya. Bukan hanya PBB-P2, diharapkan jenis pajak lain juga didata agar capaian realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

- **hasil retribusi daerah**, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dilihat dari perkembangannya, nilai penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 nilainya terus mengalami kenaikan dari 10,24 milyar menjadi 24,15 milyar, namun di tahun 2015 turun drastis, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan status Puskesmas dan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengelolaan keuangannya, dari sisi penerimaan jika sebelumnya dihitung sebagai jenis retribusi

pelayanan kesehatan pada retribusi jasa umum berpindah rekening menjadi pendapatan BLUD pada lain-lain PAD yang sah.

Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target yang telah ditetapkan bisa dikatakan bagus, terutama pada objek jasa umum dan retribusi perizinan tertentu masing-masing 94,9 % dan 105,64% (melampaui target) sedangkan pada jasa usaha nilai capaiannya cukup baik sebesar 77,82%. Meskipun demikian masih terdapat jenis retribusi yang mengalami realisasi rendah yaitu retribusi parkir dan retribusi rumah potong hewan yang realisasinya juga di bawah 50%.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, sumber pendapatan berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyertaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR. Jumlah bagian laba yang diperoleh daerah cukup fluktuatif bervariasi antara 4,77 milyar hingga 5,62 milyar. Selain mengharapkan laba, penyertaan modal yang dilakukan daerah dapat mendorong berkembangnya sektor riil melalui pinjaman produktif masyarakat baik melalui perorangan serta UMKM yang ada di Dharmasraya
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, jenis pendapatan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Perkembangan nilai lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan jenis PAD yang lain cukup dominan dan selalu melebihi 3 (tiga) sumber PAD lainnya. Nilainya pun cenderung mengalami kenaikan, dari 8,17 milyar di tahun 2010 naik menjadi 34, 11 milyar di tahun 2015.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dilhat dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, meskipun nilai dana perimbangan terus meningkat, namun proporsinya cenderung menurun, jika di tahun 2010 sebesar 77,10%, terakhir di tahun 2015 naik menjadi 76,10%. Artinya tingkat ketergantungan Dharmasraya terhadap dana pusat semakin berkurang. Besaran alokasi dana perimbangan mulai tahun 2015 ditetapkan melalui peraturan presiden setelah UU APBN ditetapkan.

- **DBH pajak/bukan pajak**, DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Pendapatan daerah dari DBH mulai tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami penurunan, turunnya penerimaan daerah dari DBH salah satunya dipicu oleh turunnya harga minyak dunia yang menyebabkan menyebabkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) Migas yang akan dibagikan turun cukup signifikan, begitu pula beberapa komponen lain DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah DBH PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak bumi dan bangunan, dan DBH migas. Penurunan terbesar terjadi pada DBH migas dari Rp 42 triliun rupiah menjadi Rp 17 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan pada APBN perubahan tahun 2015 Anggaran DBH turun menjadi Rp 112,6 triliun dari sebelumnya Rp 127,7 triliun.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Begitu juga dengan proporsi DAU antara provinsi dengan kab/kota masing-masing 10% dan 90%.

Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.07/2016, Dharmasraya termasuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal sedang yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,81. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU mulai tahun 2016, bahwa kemenkeu tidak lagi menggunakan data penduduk BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil untuk menentukan jumlah penduduk.

Sesuai dengan peningkatan iklim ekonomi nasional maupun realisasi APBN, maka penerimaan DAU yang diterima oleh Dharmasraya dari tahun ke tahun juga terus meningkat, rata-rata meningkat sekitar 15,90% tiap tahunnya, di tahun 2010 nilainya sebesar 266,17 milyar meningkat menjadi 477,8 milyar di tahun 2015. Namun persentase kenaikan di tahun 2015 maupun tahun 2016 kenaikan DAU tidak sebesar tahun sebelumnya karena pemerintah mulai memperbesar alokasi untuk dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6/2014 tentang desa, sehingga proporsi DAU secara keseluruhan juga terpengaruh.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Program/kegiatan pada bidang DAK diusulkan oleh Bappeda melalui aplikasi e-Musrenbang yang dikooordinasikan oleh Bappenas dan Bappeda Provinsi yang selanjutnya dibahas secara teknis pada forum Musrenbang provinsi selanjutnya forum Musrenbangnas.

Dilihat dari alokasi DAK yang diterima Dharmasraya selalu meningkat sesuai dengan usulan yang disetujui pusat. Tahun 2010 nilainya masih berada pada angka 37,48 milyar meningkat pesat menjadi 102,8 milyar di tahun 2015.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2010 sampai 2015 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

- **Pendapatan hibah**, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya. Nilainya pendapatan hibah dari tahun 2012 hingga tahun 2014 selalu meningkat, namun di tahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Faktor penyebabnya adalah turunnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan sawit yang mendominasi industri dan perkebunan besar di Dharmasraya.
- **Bagi hasil pajak dari provinsi**, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu : pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok . perkembangan penerimaan bagi hasil dari provinsi selalu meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari 29,6 milyar menjadi 39,47 milyar, atau naik hampir 10 milyar rupiah, hal ini didorong oleh perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, baik kendaraan baru maupun kendaraan mutasi dari luar daerah.
- **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. alokasi dana penyesuaian tersebut yang telah ada yaitu penyaluran tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, bantuan keuangan

kepada desa/nagari dalam bentuk dana desa. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang beraal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Kebijakan ini secara nasional akan diberlakukan sesuai dengan roadmap dana desa 2015-2019 sesuai dengan kebijakan pusat dalam meningkatkan dana desa secara signifikan akan berdampak pada peningkatan dana penyesuaian yang akan diterima. Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.

- **Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya**, merupakan dana yang diterima dari pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengalikasinya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari perkembangannya maka besaran dana ini cukup fluktuatif, . alokasi terbesar tercatat di tahun 2013 sebesar Rp 6,92 milyar dan kondisi 2015 tercatat sebesar Rp 5,07 milyar.

Selama periode Tahun Anggaran 2010–2015, realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan terjadi peningkatan, yaitu di tahun 2010 mencapai 94,76, dan di 2011 menjadi 95,72, dan mulai tahun 2012 angka ini cukup tinggi berkisar antara 97 s/d 98%, namun hal ini belum diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal terlihat dari masih rendahnya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah atau masih berada di bawah 10%, yaitu dari 5,91% di tahun 2010 meningkat hingga 7,14% di tahun 2015, namun pada dana perimbangan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 877,10 di tahun 2010, sempat naik menjadi 81,14 di tahun 2013 namun angka ini kembali turun menjadi 76,10 di tahun 2015. Perubahan proporsi ini lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari. proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah :

Tabel 3.2 proporsi pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan

| Kode Rek | Jenis Penerimaan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.1. | Pendapatan asli daerah | 5,91 | 6,82 | 7,56 | 5,53 | 7,68 | 7,14 |
| 4.2. | Dana perimbangan | 77,10 | 71,81 | 80,61 | 81,14 | 79,12 | 76,10 |
| 4.3. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 16,99 | 21,36 | 11,83 | 13,33 | 13,20 | 16,77 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Melihat masih kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih berada di bawah 10%, meskipun terlihat proporsinya cenderung meningkat hingga tahun 2015, oleh sebab itu dibutuhkan berbagai strategi dan usaha ke depan agar PAD dapat meningkat secara proporsional melalui :

(1) Intensifikasi pendapatan daerah

Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber pendapatan daerah
 - b. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak
 - b. Melaksanakan inventarisasi pemutahiran data objek dan subjek pajak dan retribusi.
 - a. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Supremasi Hukum)
 - b. Pelaksanaan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan adanya pembayaran tepat waktu
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PAD.
- (2) Extensifikasi, strategi ini dilakukan melalui penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Jumlah belanja daerah yang teralisasi hingga tahun 2015 nilainya selalu meningkat, dibandingkan dengan tahun 2010 hanya sebesar Rp 453,18 milyar, di tahun 2015 sudah naik menjadi 800,45 milyar dengan tingkat realisasi keuangan berkisar 93 hingga 94 persen dari belanja yang dianggarkan. Dilihat dari struktur belanja daerah, persentase belanja tidak langsung (BTL) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 masih melebihi 50%, atau berada di kisaran 52 hingga 54% dari total belanja yang diing dilakukan. Atau dengan kata lain belanja program kegiatan lebih kecil dari belanja pendukung yang dilaksanakan oleh daerah pemerintah daerah. Tapi di tahun 2015 proporsi belanja langsung melebihi dari belanja tidak langsung, masing-masing terealisasi sebesar 406,99 miliar untuk belanja langsung dan 393 untuk BTL. adanya kecenderungan meningkatnya belanja langsung dibandingkan dengan BTL memberikan semakin baiknya kinerja daerah dalam pengalokasian anggaran sehingga ini mengindikasikan APBD semakin efektif atau mampu dalam mencapai tujuan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang dilakukan mulai tahun 2015 adalah pelaksanaan anggaran berbasis akrual.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015

| Kode Rek. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | |
| 5. | BELANJA DAERAH | 453.188.540.605 | 478.352.253.109 | 544.859.577.070 | 581.131.015.967 | 681.316.609.306 | 800.456.674.229 | 15,33 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 247.210.332.939 | 264.949.605.042 | 293.612.592.158 | 303.015.014.882 | 360.849.544.710 | 393.459.759.449 | 11,83 |
| 5.1.1. | Belanja pegawai | 211.747.733.756 | 221.719.545.209 | 253.510.960.388 | 273.158.637.933 | 301.815.811.433 | 330.596.248.085 | 11,23 |
| 5.1.2. | Belanja bunga | - | - | 2.097.503.462 | 703.743.183 | - | - | |
| 5.1.4. | Belanja hibah | 19.509.940.000 | 22.064.665.900 | 20.948.211.000 | 4.128.945.126 | 28.121.032.781 | 13.899.139.000 | (5,75) |
| 5.1.5. | Belanja bantuan sosial | 2.815.433.183 | 3.521.459.808 | 420.000.000 | 3.764.305.000 | 1.559.300.000 | - | (11,15) |
| 5.1.7. | Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik | 12.863.226.000 | 17.196.152.000 | 16.516.963.308 | 20.644.815.000 | 29.345.949.496 | 48.415.994.946 | 55,28 |
| 5.1.8. | Belanja tidak terduga | 274.000.000 | 447.782.125 | 118.954.000 | 614.568.640 | 7.451.000 | 548.377.418 | 20,03 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 205.978.207.666 | 213.402.648.067 | 251.246.984.912 | 278.116.001.085 | 320.467.064.596 | 406.996.914.780 | 19,52 |
| 5.2.1. | Belanja pegawai | 22.655.637.850 | 25.249.272.866 | 27.427.063.416 | 31.360.230.631 | 27.101.036.900 | 2.537.167.000 | (17,76) |
| 5.2.2. | Belanja barang dan jasa | 71.126.957.561 | 75.183.862.443 | 78.317.826.078 | 89.631.458.145 | 109.747.275.954 | 139.913.157.469 | 19,34 |
| 5.2.3. | Belanja modal | 112.195.612.255 | 112.969.512.758 | 145.502.095.418 | 157.124.312.309 | 183.618.751.742 | 264.546.590.311 | 27,16 |

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

Tabel 3.4. Persentase proporsi belanja daerah berdasarkan jenis belanja

| Kode Rek | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| 5. | BELANJA DAERAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 54,55 | 55,39 | 53,89 | 52,14 | 52,96 | 49,15 |
| 5.1.1. | Belanja pegawai | 46,72 | 46,35 | 46,53 | 47,00 | 44,30 | 41,30 |
| 5.1.2. | Belanja bunga | - | - | 0,38 | 0,12 | - | - |
| 5.1.4. | Belanja hibah | 4,31 | 4,61 | 3,84 | 0,71 | 4,13 | 1,74 |
| 5.1.5. | Belanja bantuan sosial | 0,62 | 0,74 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | - |
| 5.1.7. | Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik | 2,84 | 3,59 | 3,03 | 3,55 | 4,31 | 6,05 |
| 5.1.8. | Belanja tidak terduga | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,07 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 45,45 | 44,61 | 46,11 | 47,86 | 47,04 | 50,85 |
| 5.2.1. | Belanja pegawai | 5,00 | 5,28 | 5,03 | 5,40 | 3,98 | 0,32 |
| 5.2.2. | Belanja barang dan jasa | 15,69 | 15,72 | 14,37 | 15,42 | 16,11 | 17,48 |
| 5.2.3. | Belanja modal | 24,76 | 23,62 | 26,70 | 27,04 | 26,95 | 33,05 |

c. Pembiayaan daerah dan Silpa tahun berjalan

- **Pembiayaan daerah**, Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dikelola oleh daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung menurun. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman sebesar 22,15 milyar rupiah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan tahun 2011, namun di sisi lain di tahun yang sama terdapatnya nilai silpa yang cukup besar yaitu Rp 71,74 milyar rupiah, sehingga dengan adanya silpa yang besar tersebut terlihat adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya di tahun 2012 dan tahun 2013 daerah melakukan pembayaran pokok hutang sebesar 11,075 milyar rupiah per tahun.
- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Berkenaan**, meskipun di tahun 2011 tercatat Silpa sebesar 71,74 milyar rupiah, namun secara umum nilai Silpa dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan penurunan, dengan adanya penurunan nilai Silpa ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas belanja daerah.

Tabel 3.5.
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 42.610.246.896 | 44.421.303.329 | 57.325.034.679 | 14.486.777.418 | 28.493.218.148 | 34.455.925.341 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 42.610.246.896 | 44.421.303.329 | 71.736.034.683 | 30.961.777.414 | 28.493.218.148 | 34.455.925.341 |
| Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya | 42.610.246.896 | 22.271.303.329 | 71.736.034.683 | 30.961.777.414 | 28.493.218.148 | 34.455.925.341 |

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | 22.150.000.000 | | - | - | - |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | - | - | 14.411.000.004 | 16.474.999.996 | - | - |
| Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah | - | - | 3.336.000.000 | 5.400.000.000 | - | - |
| Pembayaran Pokok Utang | - | - | 11.075.000.004 | 11.074.999.996 | - | - |
| Silpa Tahun Berkenaan | 21.910.155.643 | 71.740.201.183 | 30.961.777.414 | 28.493.218.148 | 34.455.925.341 | 28.425.226.159 |

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Ketiga unsur dari neraca tersebut dapat disajikan dalam suatu persamaan seperti dibawah :

$$Aset = Kewajiban + ekuitas$$

Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah baik berupa pendapatan ataupun dalam bentuk penghematan belanja. Sedangkan kewajiban/hutang merupakan yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. kewajiban adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Unsur ketiga dari neraca yaitu ekuitas, ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah, dengan kata lain ekuitas meruoakan nilai selisih antara aset dengan kewajiban.

Berikut dapat ditampilkan perkembangan aset, kewajiban dan ekutas daerah yang tercantum dalam neraca aset daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Neraca Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015 (juta rupiah)

| Kode Rek. | URAIAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | rata-rata petumbuhan(%) |
|------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ASET | 861.513.153.505 | 1.023.868.708.780 | 1.133.474.055.787 | 1.323.627.965.536 | 1.463.957.910.212 | 1.867.848.423.389 | 23,36 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 29.392.234.234 | 77.981.168.926 | 38.428.383.711 | 44.455.930.649 | 72.425.857.365 | 85.282.734.140 | 38,03 |
| 1.1.1 | Kas | 21.966.918.332 | 71.817.797.203 | 31.054.692.502 | 29.191.250.057 | 35.483.827.861 | 28.600.793.386 | 6,04 |
| 1.1.3 | Piutang | - | 1.583.252.317 | 1.183.630.304 | 3.367.520.609 | 17.790.566.707 | 23.174.765.758 | 340,94 |
| 1.1.4 | Piutang Lain-lain | - | - | - | - | - | 8.872.125.390 | |
| 1.1.5 | Persediaan | 7.425.315.902 | 4.465.119.406 | 6.077.560.908 | 11.767.076.650 | 19.042.595.345 | 24.635.049.605 | 46,35 |
| 1.2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 11.000.000.000 | 12.500.000.000 | 15.836.000.000 | 21.236.000.000 | 21.236.000.000 | 21.236.000.000 | 18,61 |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | 11.000.000.000 | 12.500.000.000 | 15.836.000.000 | 21.236.000.000 | 21.236.000.000 | 21.236.000.000 | 18,61 |
| 1.3 | ASET TETAP | 821.120.919.271 | 933.183.219.854 | 1.070.881.341.357 | 1.203.312.859.967 | 1.353.065.031.062 | 1.740.092.188.043 | 22,38 |
| 1.3.1 | Tanah | 95.657.991.000 | 98.836.794.010 | 99.575.994.010 | 107.456.894.477 | 104.167.863.528 | 605.374.946.762 | 106,57 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 103.502.067.496 | 122.590.111.040 | 131.768.879.029 | 155.855.770.473 | 152.795.095.773 | 57.212.301.138 | (8,94) |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 188.167.407.483 | 205.631.739.033 | 225.848.808.074 | 288.912.420.630 | 418.808.695.579 | 438.897.394.752 | 26,65 |
| 1.3.4 | Jalan, Jaringan dan instalasi | 358.336.702.104 | 389.012.646.238 | 510.327.234.131 | 522.068.098.026 | 615.429.279.334 | 544.860.267.012 | 10,41 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 4.237.092.706 | 9.713.118.606 | 10.305.312.276 | 10.894.669.716 | 8.092.950.997 | 14.946.795.569 | 50,55 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 71.219.658.482 | 107.398.810.927 | 93.055.113.837 | 118.125.006.645 | 53.771.145.851 | 78.800.482.810 | 2,13 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | - | 204.320.000 | 8.328.330.719 | 54.623.174.920 | 17.231.021.785 | 21.237.501.206 | 2.573,56 |
| 1.5.2 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | - | - | - | - | - | 287.907.729 | #DI/0! |
| 1.5.4 | Aset Tidak Berwujud | - | 204.320.000 | 204.320.000 | 204.320.000 | 663.645.000 | 1.928.470.576 | 210,96 |
| 1.5.5 | Aset Lain-lain | - | - | 8.124.010.719 | 54.418.854.920 | 16.567.376.785 | 19.021.122.901 | 44,71 |
| 2 | KEWAJIBAN | 45.059.776 | 32.689.073.358 | 22.131.773.073 | 13.561.168.032 | 22.156.020.315 | 40.997.130.881 | 18.176,78 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 45.059.776 | 20.884.969.191 | 22.131.773.073 | 13.561.168.032 | 15.067.857.858 | 29.051.701.688 | 12.874,74 |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 45.059.776 | 32.918.747 | 2.538.617.378 | 5.860.118.458 | 15.022.872.004 | 7.301.405.683 | 3.220,76 |
| 2.1.2 | Utang Bunga | - | 2.083.330.556 | 729.104.167 | - | - | - | |
| 2.1.3 | Utang Pajak | - | - | - | - | 29.799.554 | - | |
| 2.1.4 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | 18.768.719.888 | 18.864.051.528 | 7.693.719.888 | - | - | |

| Kode Rek. | URAIAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | rata-rata pertumbuhan(%) |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 2.1.5 | Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | - | - | - | 19.462.232 | |
| 2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | - | 7.329.686 | 15.186.300 | 2.827.311.745 | |
| 2.1.xx | utang belanja | | | | | | 18.903.522.028 | |
| 2.2 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | 11.804.104.167 | - | - | 7.088.162.457 | 11.945.429.193 | 0,24 |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri | - | 11.804.104.167 | - | - | 7.088.162.457 | 11.945.429.193 | 0,24 |
| | | | | | | | | |
| 3 | EKUITAS DANA | 861.468.093.729 | 991.179.635.422 | 1.111.342.282.714 | 1.310.066.797.504 | 1.441.801.889.897 | 1.826.851.292.508 | 22,41 |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 861.513.153.505 | 1.023.868.708.780 | 1.133.474.055.787 | 1.323.627.965.536 | 1.463.957.910.212 | 1.867.848.423.389 | 23,36 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat, perkembangan aset pemerintah Kabupaten Dharmasraya meningkat, hal ini terlihat dari peningkatan nilai aset dari 861 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 1.86 trilyun rupiah di tahun 2015, atau nilainya meningkat rata-rata sebesar 23,36% per tahunnya. Bagian aset terbesar adalah ada pada aset tetap, baik dalam bentuk tanah, bangunan, Jalan, Jaringan dan instalasi maupun bentuk aset tetap penunjang operasional kegiatan pemerintah seperti peralatan dan mesin. Sebagian dari aset ini merupakan hibah dari kabupaten induk, maupun bentuk hibah dari pemerintah pusat, provinsi maupun pihak ketiga, sedangkan sumber peningkatan nilai aset ini juga berasal dari belanja yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Dharmasraya sendiri dalam bentuk belanja, khususnya belanja modal serta belanja lainnya yang mempengaruhi nilai aset. dalam hal pengelolaan aset, dengan berbagai upaya dalam optimalisasi pendataan dan penguasaan nilai aset juga memberikan pengaruh dalam nilai aset yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui konsolidasi dengan pengelola aset yang berada di perangkat daerah. Sehingga pada beberapa kasus, teridentifikasi aset berdasarkan kondisinya diantaranya aset yang dalam kondisi rusak atau tidak dimanfaatkan lagi dan selanjutnya aset ini berubah dari aset tetap menjadi aset lainnya.

Sedangkan pada investasi jangka panjang, merupakan nilai aset yang dimiliki dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang berbentuk badan usaha, seperti bank nagari dan BPR yang ada di Dharmasraya. Sedangkan aset lancar merupakan aset yang memiliki liabilitas kurang dari 12 bulan atau dalam bentuk kas atau setara kas.

Pada kewajiban/hutang, juga terjadi peningkatan nilai, di tahun 2010 nilainya hanya sebesar 45 juta rupiah naik di tahun 2011 menjadi 32,68 milyar rupiah, di tahun 2015 nilainya sudah mencapai 29,05 milyar, meskipun nilainya setiap tahun tidak tetap atau mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jenis kewajiban pada masing-masing rincian pengeluaran yang harus dibayar pada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Selanjutnya pada ekuitas, nilai ekuitas berasal dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, sejalan dengan peningkatan nilai aset yang melebihi pertambahan kewajiban mengakibatkan kenaikan pada nilai ekuitas. Perkembangan nilai ekuitas dari tahun 2010 ke tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sekitar 22,41.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010 sampai tahun 2015 secara umum terlihat pada pelaksanaan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik didorong oleh adanya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun kebijakan yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun pengelolaan pembiayaan daerah. Penganggaran yang baik, akan menghasilkan tekstur keuangan yang ideal dan optimal untuk dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang ada di lapangan guna pencapaian target pembangunan. oleh sebab itu azas pokok yang perlu dicapai dalam penganggaran ini adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin efisien penganggaran daerah maka akan semakin efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 s/d 2015 sebagaimana tergambar dari pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka PAD memiliki sumber utama yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain pajak dan retribusi daerah juga terdapat lain-lain PAD yang sah. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah juga telah didukung oleh regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah diantaranya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah serta beberapa peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang retribusi daerah. Selain didasari oleh peraturan yang ada, juga telah dilakukan berbagai upaya dan strategi lainnya seperti peningkatan kemampuan SDM pengelola pendapatan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat/APBN. Meskipun perkembangan dana perimbangan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun hal ini tidak sepenuhnya ditentukan kebijakan pusat dalam pengalokasiannya ke daerah, tapi juga ditentukan oleh upaya daerah dalam berbagai bentuk, dalam rangka optimalisasi penerimaan dana pusat juga membutuhkan berbagai upaya agar dana ini selalu dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya adalah :

- Optimalisasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi mengenai berbagai data teknis dan potensi wilayah yang ada serta kebutuhan informasi lainnya ke pemerintah pusat, serta pemberlakuan reward and punishment terhadap penggunaan DBH tahun sebelumnya
- Untuk besaran dana Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah ditentukan oleh pusat berdasarkan perkembangan APBN sesuai dengan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, capaian nilai IPM dan indikator lain yang ditentukan untuk setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah akan menerima jumlah dan ayang berbeda sesuai dengan perkembangan indikator-indikator tersebut
- Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK), besaran dana DAK ini ditentukan oleh penyediaan data teknis serta usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Dimana setiap tahunnya kriteria ini mengalami perubahan sesuai dengan prioritas pembangunan tahunan nasional. Penyampaian usulan dan data teknis ini dilakukan melalui Musrenbang provinsi dan nasional serta aplikasi e-musrenbang yang dikordinasikan oleh Bappeda Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Bappenas melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga disini selain Bappeda, peran aktif perangkat daerah terkait juga sangat menentukan besaran alokasi dana yang akan diterima.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selama periode 2010 hingga 2015, jenis pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan hibah yang diterima daerah berasal dari hibah yang diterima dari pihak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dimana perusahaan-perusahaan besar tersebut sebagian besar bergerak pada perkebunan sawit, CPO dan pengolahan karet, berdasarkan realisasi tahun 2010 hingga tahun 2015, pendapatan hibah terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,45 milyar rupiah. Besarnya pendapatan hibah ini dipengaruhi oleh komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan pendapatan hibah ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang ada

Selain hibah, bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan. Seiring dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, maka hal ini juga berdampak pada penambahan kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, hal ini juga memberikan pengaruh pada penerimaan daerah dalam bagi hasil pajak yang diterima dari tahun ke tahun. baik dari kendaraan baru maupun kendaraan yang dibeban balik nama.

3.2.2. Kebijakan belanja daerah

Dilihat dari strukturnya, belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja, besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya :

- Mengutamakan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perangkat daerah serta belanja bagi hasil ke pemerintah nagari
-

Tabel 3.7. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

| Tahun | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp) | Persentase |
|--------------|--|--|-------------------|
| 2010 | 234.403.371.606 | 453.188.540.605 | 51,72 |
| 2011 | 246.968.818.075 | 478.352.253.109 | 51,63 |
| 2012 | 280.938.023.804 | 559.270.577.074 | 50,23 |
| 2013 | 304.518.868.564 | 597.606.015.963 | 50,96 |
| 2014 | 328.916.848.333 | 681.316.609.306 | 48,28 |
| 2015 | 333.133.415.085 | 800.456.674.229 | 41,62 |

Berdasarkan tabel di atas, meskipun terjadi peningkatan dalam belanja aparatur, namun persentasenya relatif menurun, hal ini disebabkan oleh perubahan belanja daerah melebihi perubahan belanja aparatur

- Pelaksanaan belanja berbasis kinerja (performance based), meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja/ pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada RPJMD periode tahun 2010-2015.
- Pemenuhan alokasi alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pemenuhan alokasi 20 % untuk pendidikan, 10% untuk pendidikan serta pendampingan dana DAK yang diterima daerah setiap tahunnya sebesar 10% dari total DAK yang diterima.
- Mulai tahun 2014 dan tahun 2015, maka salah satu kewajiban daerah sudah diarahkan untuk pencapaian alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan (tidak termasuk dana DAK), dimana alokasi dana desa ini disalurkan ke nagari melalui bantuan keuangan kepada pemerintah nagari.

3.2.3. Kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015 penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, kecuali di tahun 2011 penerimaan melakukan pinjaman daerah sebesar 22,15 milyar rupiah. Sedangkan di tahun 2012 dan tahun 2013, dengan adanya pinjaman daerah di tahun 2011 tersebut, maka pembayaran dilakukan secara berturut-turut sebesar 11,075 milyar.

3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN (2016 S/D 2021)

Berdasarkan kajian pengelolaan keuangan masa lalu (2012 s/d 2015) baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun terkait dengan kebijakan provinsi dan nasional, maka proyeksi kerangka pendanaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Proyeksi kerangka pendanaan (APBD)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d Tahun 2021

| Kode Rek. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 919.929 | 1.020.279 | 1.146.826 | 1.302.538 | 1.495.398 | 1.735.656 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 68.773 | 69.460 | 70.155 | 70.857 | 71.565 | 72.281 |
| 4.1.1. | Hasil Pajak Daerah ¹⁾ | 19.260 | 19.452 | 19.647 | 19.843 | 20.042 | 20.242 |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah ¹⁾ | 6.027 | 6.088 | 6.148 | 6.210 | 6.272 | 6.335 |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.144 | 5.196 | 5.248 | 5.300 | 5.353 | 5.407 |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 38.342 | 38.725 | 39.112 | 39.503 | 39.898 | 40.297 |
| | | | | | | | |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 772.554 | 866.753 | 983.723 | 1.128.151 | 1.307.678 | 1.532.148 |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi | 22.609 | 22.836 | 23.064 | 23.295 | 23.528 | 23.763 |

| Kode Rek. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hasil Bukan Pajak | | | | | | |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | 507.913 | 533.309 | 559.974 | 587.973 | 617.372 | 648.240 |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 242.032 | 310.608 | 400.685 | 516.883 | 666.779 | 860.145 |
| | | | | | | | |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 78.602 | 84.066 | 92.948 | 103.531 | 116.155 | 131.227 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.3.2. | Dana Darurat | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 39.244 | 39.637 | 40.033 | 40.434 | 40.838 | 41.246 |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 35.357 | 42.429 | 50.915 | 61.097 | 73.317 | 87.980 |
| 4.3.5. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 5. | BELANJA DAERAH | 942.638 | 1.020.279 | 1.146.826 | 1.302.538 | 1.495.398 | 1.735.656 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 475.961 | 523.520 | 546.786 | 571.213 | 596.859 | 623.786 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 391.447 | 411.019 | 431.570 | 453.149 | 475.806 | 499.596 |
| 5.1.2. | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3. | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 6.715 | - | - | - | - | - |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik | 77.099 | 111.001 | 113.715 | 116.564 | 119.553 | 122.690 |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 466.677 | 496.759 | 600.040 | 731.326 | 898.539 | 1.111.869 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 973 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 186.294 | 232.867 | 291.084 | 363.855 | 454.819 | 568.524 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 279.410 | 262.899 | 307.963 | 366.478 | 442.727 | 542.353 |
| | | | | | | | |
| | SURPLUS/ DEFISIT | (22.709) | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | 22.709 | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 26.709 | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 26.709 | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |

| Kode Rek. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.6. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4.000 | - | - | - | - | - |
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah | 4.000 | - | - | - | - | - |
| 6.2.3. | Pembayaran Pokok Utang | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.4. | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 6.3. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 0 | - | - | - | - | - |

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis terkait dengan permasalahan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari Isu global, nasional dan regional akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Isu-isu strategis ditelaah dari permasalahan pembangunan Kabupaten dharmasraya saat ini yang akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dan akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kemajuan suatu daerah amat ditentukan oleh seberapa besar kecakapan, keahlian, dan sikap budaya orang-orang yang ada di daerah itu menuju produktivitas kerja, inovasi dan berbudi luhur serta berakhlak mulia dalam kehidupan sesama. Interaksi sosial dengan sikap baik, toleransi akan menciptakan keharmonisan masyarakat, dan dengan itulah kemajuan daerah akan tercapai dengan baik.

Kehidupan global yang membuat interaksi antar warga, daerah dan pemerintahan kawasan, regional akan semakin intensif dimasa mendatang. Sementara itu daerah memiliki potensi Sumberdaya alam yang memiliki tinggi menjadikan daerah ini menarik untuk didatangi dan berinvestasi. Seiring dengan itu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif memerlukan keunggulan dalam persaingan dan tantangan. Termasuk juga kebutuhan akan kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian air, kemandirian layanan publik (*basic need*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mengharuskan generasi mendatang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap budaya yang mantap untuk beradaptasi dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat global yang kompetitif. Efek dari kondisi itu memungkinkan sekelompok orang unggul sementara yang lain terdegradasi pada kemiskinan dan kebodohan. Maka disinilah peran pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan pelayanan bagi warga masyarakat dan menyediakan prasyarat minimal untuk mereka hidup dikemudian hari.

Menciptakan pelayanan publik yang bermutu memerlukan SDM aparatur yang berkualitas, dan sistem pelayanan yang modern dan profesional, dalam hal ini diperlukan tenaga-tenaga fungsional yang berperan langsung

dalam pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur membuat alokasi anggaran proporsinya harus lebih banyak untuk program langsung pada kedua aspek tersebut yakni biaya langsung bagi kehidupan rakyat dalam bentuk penyediaan barang publik dan layanan administrasi publik. Meningkatnya anggaran untuk pelayanan publik akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga sehingga inilah yang dikatakan sebagai kemandirian daerah untuk kepastian layanan dan kualitas pelayanan publik dan pembangunan belanja modal dalam bentuk infrastruktur daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber-sumber kemajuan daerah maka inovasi daerah dan riset-riset terapan dan adopsi teknologi menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan surplus produksi dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam melakukan transformasi pertanian dan menghidupkan industri-industri yang berbasis pada sumberdaya (bahan baku) lokal.

Pembanguna lintas daerah dengan sinergi dengan daerah-daerah Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan menghubungkan jalur transportasi darat kereta api antara pantai barat dan Timur Sumatera juga harus didorong dan distimulasi untuk terciptanya daerah pertumbuhan Sumatera Barat bagian Tenggara sebagai kontribusi dalam menghubungkan kawasan ekonomi Sumatera Tengah yang terhubung dengan kawasan dan masyarakat ASEAN jalur kereta Api ke Singapura dan Malaysia, dan mendorong pembangunan jalur bawah tanah melewati bukit barisan ke Kota Padang dari Kota Solok.

Terdapat 3 pokok permasalahan daerah (1) Optimalisasi Sumberdaya daya baik manusia maupun alam secara berkelanjutan. (2) Keterbatasan infrastruktur daerah, (3) Miniatur Indonesia dengan keragaman budaya.

Optimalisasi Sumberdaya manusia dan alam, Manusia atau penduduk merupakan modal utama yang aktif dalam proses pembangunan sehingga kepintaran dan inovasi yang dihasilkan merupakan kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah. Rendahnya kualitas SDM, rendahnya daya cipta dan inovasi daerah menyebabkan sumber-sumber kemajuan menjadi rendah dan inilah yang mendorong terjadinya kelemahan, rendahnya kewibawaan daerah. Sumberdaya alam yang kaya namun jika tidak diperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem lingkungan akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan dikemudian hari. Maka pola pengelolaan sumberdaya alam jangan sampai memberikan mudorot yang lebih banyak dikemudian hari bagi generasi mendatang.

Keterbatasan infrastruktur daerah, Daerah memerlukan prasarana dan sarana untuk memastikan kehidupan sosial, alam dan lingkungan terjaga dengan baik. Sanitasi lingkungan, energi, sumberdaya air, transportasi dan sarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olahraga menjadi penting dipecahkan dalam 5 tahun ke-depan.

Keberagaman budaya dan pembangunan multikultural, Berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi spirit eksistensi kebangsaan yang dianut oleh

kehidupan negara. Krisis kepribadian bangsa pelemahan sendi-sendi dasar kehidupan sosial dan ekonomi menjadi hal yang patut diperhitungkan. Kesenjangan antar wilayah, antar suku, kemiskinan, dan penyeragaman menjadi mengikis dasar budaya bangsa yang bersumber dari budaya daerah. Adaptasi, akulturasi budaya dan toleransi menjadi nilai bersama bahwa masing-masing budaya memiliki martabat yang tinggi dan perlu juga menghargai budaya asli yang menjadi nilai historis menjadi nilai dasar untuk dijadikan patokan untuk mengembangkan budaya daerah dimasa mendatang. Budaya lokal dengan sumber dari budaya asli masing-masing orang dan komunitas tentu harus tetap dijaga sebagai upaya untuk menjadi inspirasi kehidupan sosial dimasa datang. Sehingga terlahir keharmonisan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bersama.

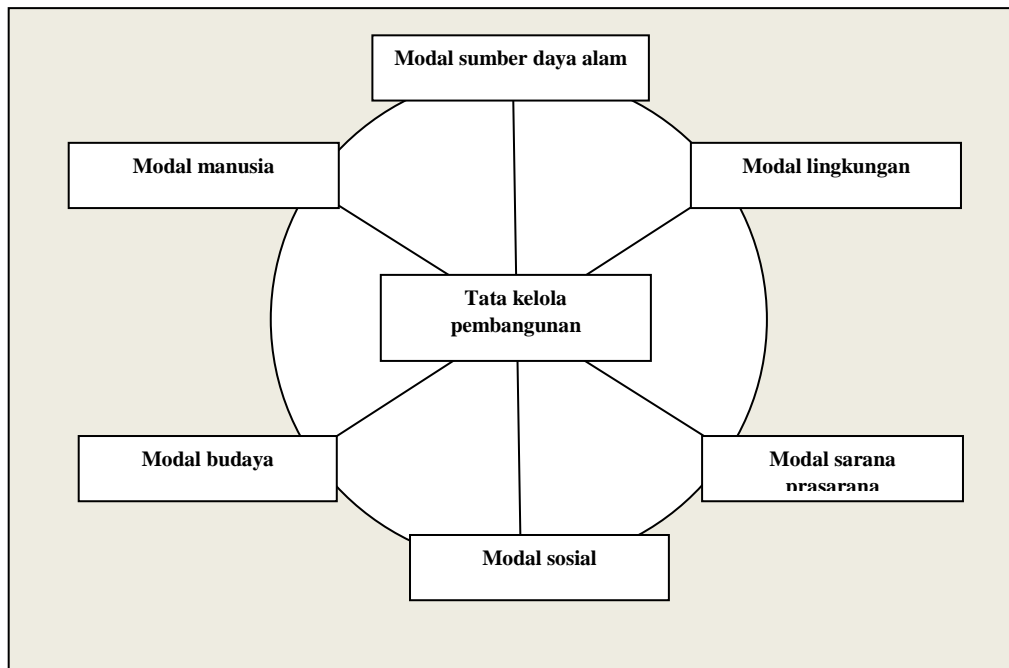
Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantaraan berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.

- d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamadan bersifat tangible berupa peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya, manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.
- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Gambar 4.1: Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan dengan demikian bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Dengan demikian permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai permasalahan yang dihadapi dimasa sekarang serta potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan dimasa depan. Permasalahan masa sekarang adalah berbagai kekurangan yang perlu diatasi. Potensi adalah berbagai sumberdaya yang bisa didayagunakan dengan optimal. Kebutuhan adalah berbagai hal yang perlu dipenuhi sebagai konsekuensi mengatasi masalah atau mengembangkan potensi. Peluang adalah situasi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten yang belum lama berkembang sebagai hasil pemekaran wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dengan latar belakang identitas sejarah dan budaya beragam. Tetapi dalam pembangunannya masih perlu didukung oleh pengembangan sumberdaya alam yang optimal bernilai tambah tinggi, sumberdaya manusia yang berkualitas, sumber daya infrastruktur fisik yang memadai, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan perangkat manajemen dan teknologi informasi yang andal.

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada Bab 2 dan kondisi yang ada saat ini antara lain :

1. Relatif rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat □ kaitkan dengan IPM
2. Bidang pendidikan : angka melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi masih rendah. Hal ini dapat dilihat data APK dan APM untuk setiap jenjang pendidikan
3. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah
4. Masih tingginya jumlah kematian bayi
5. Masih terjadinya Kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular
6. Belum adanya rumah sakit yang representatif
7. Belum terkelolanya khasanah budaya Dharmasraya
8. Masih terdapatnya balita gizi buruk. Tahun 2015 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 14 orang.
9. Tidak adanya pembinaan atlit usia dini
10. Distribusi tenaga pengajar tidak merata
11. Masih rendahnya proporsi jalan kondisi mantap
12. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
13. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
14. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
15. Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan
16. Belum tuntasnya tapal batas
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan kematian
18. Masih terdapatnya kasus KDRT
19. Masih rendahnya penyelesaian kasus perempuan dan anak
20. Masih rendahnya kesadaran PUS menjadi akseptor KB
21. Belum tuntasnya penanganan PMKS oleh pemerintah
22. Masih terjadinya alih fungsi lahan
23. Belum tertatanya fungsi pasar secara optimal
24. Masih rendahnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah
25. Belum berkembangnya sektor pariwisata

Permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka isu pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal daerah yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan penduduk dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga sejahtera sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal manusia.
- b. Pengembangan pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan dengan optimal serta bernilai tambah besar di Kabupaten Dharmasraya sebagai wujud pengembangan modal alam.

- c. Pemberdayaan nagari dan kelompok masyarakat sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal sosial dan modal ekonomi.
- d. Reorientasi peran adat dalam perkembangan sosial ekonomi merupakan isu dalam modal budaya serta pelestarian peninggalan budaya bekas Kerajaan Dharmasraya.
- e. Terjaganya kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian Sub DAS Batanghari hulu dan tengah dengan pengendalian kualitas air sungai, pelestarian hutan, atau pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik lahan sebagai wujud pemeliharaan modal lingkungan.
- f. Ketersediaan berbagai prasarana (sanitasi lingkungan, prasarana sumberdaya air, energi, telekomunikasi dan transportasi) serta sarana pelayanan (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olah raga) merupakan bentuk dari pengembangan modal sarana prasarana wilayah.
- g. Untuk mendukung pengembangan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung oleh sistem informasi pengelolaan pembangunan sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pembangunan yang andal.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan isu pembangunan yang telah dirumuskan pada sub bab 4.1 maka perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertajam pernyataan kondisi permasalahan yang ada saat ini sehingga diperoleh fokus isu yang benar-benar terdengar dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini dan 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut meliputi :

1. Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil bagi seluruh penduduk menjadi dasar pembangunan yang penting bagi daerah. Produksi bahan pangan daerah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangan karbohidrat maupun protein. Intensifikasi dan ekstensifikasi padi sawah perlu terus dilakukan dengan dukungan pembangunan dan peningkatan irigasi. Selain itu program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan juga menjadi bagian diversifikasi ekonomi petani.

2. Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi kerakyatan

Pasar-pasar tradisional sebagai tempat perdagangan yang terdapat di kawasan perkotaan maupun pedesaan yang masih banyak dalam kondisi kurang memenuhi standar fisik perlu ditingkatkan secara fisik dengan melakukan rehabilitasi pasar. Pasar khusus agribisnis hasil perkebunan, peternakan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek rantai distribusinya dan dicari upaya pembelian bersama dalam partai besar sehingga harga yang diterima pedagang bisa lebih murah.

3. Pemerataan Infrastruktur daerah

Kabupaten Dharmasraya masih memiliki daerah pinggiran yang relatif tertinggal dan sarana kesehatan dan pendidikan yang kurang terjangkau. Oleh karena itu program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor kalau pembangunan dilakukan tidak terkendali. Oleh karena peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Pengembangan identitas daerah

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang ada dan menjadikannya sebagai identitas daerah yang membanggakan bagi generasi sekarang dan akan datang.

6. Peningkatan kualitas SDM

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu program di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan perlu dipacu peningkatannya.

7. Pembangunan berbasis nagari

Nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berupa profil nagari berbasis teknologi informasi yang *selalu up to date* dan terpercaya. Institusi

pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.

8. Transparansi dan Informasi pembangunan

Pembangunan perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan. Oleh karena program pelayanan satu pintu perlu dioptimalkan, demikian juga transparansi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi perlu dibangun dengan membuat unit pengumpulan dan pengoahan data tersendiri agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).

9. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi penting untuk Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada wilayah terluar Provinsi Sumatera Barat dengan jarak pencapaian menuju Kota Padang memakan waktu lebih kurang 5 jam. Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan (public safety center) sepanjang jalan lintas Sumatera. Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi jga preventif perlu dilakukan oleh berbagai instansi bukan hanya Dinas Kesehatan tetapi melibatkan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan sanitasi lingkungan dan instansi lain yang terkait dengan pemberdayaan dan penyehatan masyarakat. Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya preventif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.

Tabel 4.1. Persandingan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

| Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya | Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi |
|--|---|
| <p>Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani perlu menjadi fokus pembangunan.</p> <p>Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil; program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan</p> | <p>Pemanfaatan potensi untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan tercantum dalam prioritas nasional dan isu strategis provinsi perlu terus dioptimalkan.</p> |
| <p>Peningkatan kegiatan perdagangan dengan rehabilitasi pasar; peningkatan jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan membangun sektor pertanian perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan dan industri</p> | <p>Isu strategis provinsi Sumbar yaitu bagaimana menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah dari agribisnis agroindustri serta</p> <p>Usaha mikro kecil sebagai penggerak perekonomian masih memerlukan perhatian antara lain promosi usaha, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, jaringan bisnis.</p> |
| <p>Pemerataan infrastruktur daerah program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal dalam hal transportasi, sanitasi dan air bersih.</p> | <p>Perlu ditingkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dengan mempertimbangkan pengembangan wilayah dan integrasi moda. Pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu termasuk air minum dan sanitasi untuk mencapai target universal Access secara nasional (100 % Akses air minum, dan sanitasi). Demikian juga penanganan kawasan kumuh sesuai target nasional 0 % kawasan kumuh pada Tahun 2019.</p> |
| <p>Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor. Peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang</p> | <p>Salahsatu isu strategis pembangunan daerah Sumbar adalah kerawanan terhadap bencana. Dalam RPJM Provinsi terdapat rumusan isu pembangunan untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.</p> |
| <p>Pengembangan identitas daerah Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut.</p> | <p>Dalam RPJM Nasional ditekankan isu pembentukan karakter nasional. Pembangunan identitas adalah salahsatu cara untuk membangun karakter.</p> |
| <p>Peningkatan kualitas SDM. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat masih rendah maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja.</p> | <p>Dalam RPJM Nasional salah satu isu penting adalah bagaimana Ppembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Isu pembangunan RPJM Provinsi adalah perlu</p> |

| Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya | Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi |
|---|--|
| | terus ditingkatkannya pemerataan dan kualitas pendidikan masih sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang belum mendapat pelayanan pendidikan dan tercapai wajib belajar 9 tahun dan rintisan belajar 12 tahun. Isu lainnya, kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan. |
| Pembangunan berbasis nagari karena nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berbasis teknologi informasi yang selalu up to date dan terpercaya. Membangun institusi pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari. | Selaras dengan isu pelaksanaan pembangunan nasional dan provinsi yang belum merata dan seimbang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis nagari akan mempercepat pembangunan dari bawah dan pinggiran seperti diamanatkan dalam RPJM Nasional |
| <p>Transparansi dan Informasi pembangunan.</p> <p>Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan</p> <p>Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).</p> | Membangun tatakelola dan reformasi birokrasi menjadi isu pembangunan nasional. Dalam RPJM provinsi Sumbar terdapat rumusan isu: Kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik |
| <p>Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan.</p> <p>Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan sepanjang jalan lintas Sumatera (<i>public safety center</i>); Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi juga preventif Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya preventif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.</p> | Bagian dari isu nasional menjadikan manusia Indonesia unggul melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam isu strategis provinsi terdapat isu perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. |

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016- 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

| |
|---|
| Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya |
|---|

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

5.2 MISI

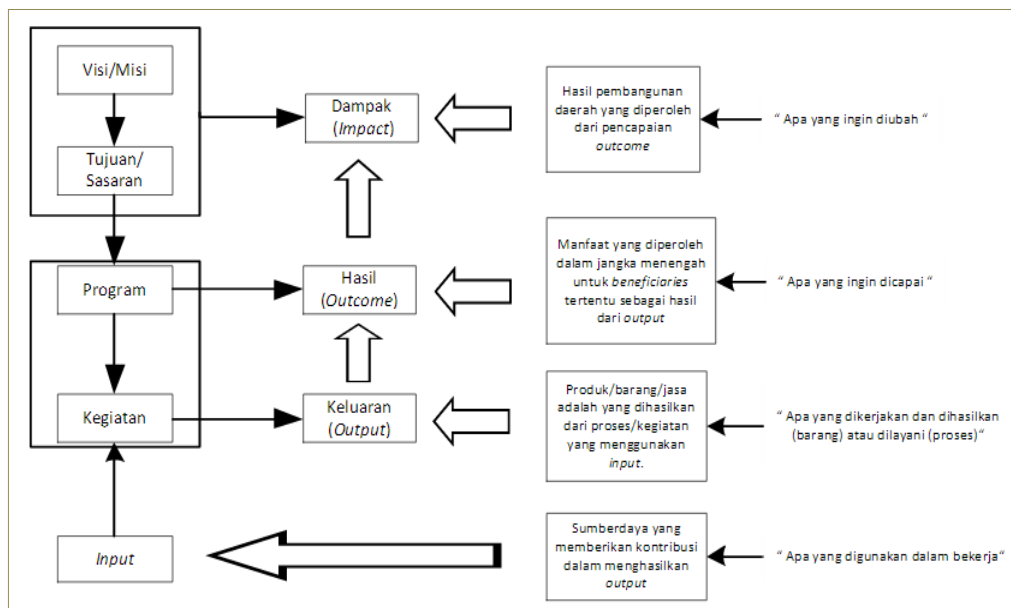
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis atau prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 5.1
Skematik Keterkaitan Antara Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan
Dan Sasaran, Program



Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021

| VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA" | | |
|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat. | 1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan | 1. Meningkatnya akses kesehatan |
| | | 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |
| | | 3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan |
| | | 4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat |
| | 2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan | 1. Meratanya akses pendidikan |
| | | 2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel |
| | | 3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca |
| | | 4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan |
| | | 5. Meningkatnya tingkat pendidikan |
| | 3. Penyiapan dan penyaluran tenaga | 1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja |

| VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA" | | |
|---|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| | kerja terlatih | 2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari |
| | 4. Peningkatan kesejahteraan sosial | 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat |
| Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi. | 1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari | 1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung. 2. Revitalisasi los kios pasar nagari |
| | 2. Membangun ruang publik untuk masyarakat | 1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk 2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten |
| | 3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat | 1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran 2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar |
| | 4. Peningkatan penyediaan Air Minum | Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan |
| | 5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat | 1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan |
| | | 2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan |
| | | 3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin |
| | 1. Mewujudkan ketahanan pangan | 1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan |
| | | 2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak |
| | | 3. Meningkatkan produksi perikanan |
| | | 4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian |
| Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. | 2. Peningkatan ekonomi petani | 1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian |
| | | 2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian |

| VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA" | | |
|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| | | 3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat |
| | 3. Peningkatan produksi industri lokal | Meningkatnya nilai produksi industri |
| | 4. Peningkatan kegiatan perdagangan | 1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi |
| Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. | 1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial | Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial |
| | 2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah | 1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten |
| | | 2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah |
| | 3. Penghijauan lahan kritis | Berkurangnya lahan kritis |
| | 4. Pelestarian keanekaragaman hayati | Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan |
| | 5. Pengendalian pencemaran lingkungan | Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari |
| | 6. Penanggulangan bencana | Peningkatan tanggap bencana |
| Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. | 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi |
| | 2. Memantapkan sistem pembangunan daerah | 1. Peningkatan Profesionalitas aparatur |
| | | 2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah |
| | 3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah | 1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan |
| | | 2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi |
| | 4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan | Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan |

| VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA" | | |
|---|--|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. | 1. Membangun BUM Nagari | Adanya BUMNagari |
| | 2. Melakukan pembangunan berbasis nagari | Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan |
| Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun | 1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama | 1. Meningkatnya kehidupan beragama |
| | | 2. Meningkatkan peran adat |
| | 2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya | 1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya |
| | | 2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya |

5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan *sustainable development*)

5.5 TEMA PEMBANGUNAN PER TAHUN

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (hastha utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran. Tema pembangunan setiap tahun periode 2016-2021 adalah :

- 2016 : Menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan SDM dan kemandirian daerah
- 2017 : Mengembangkan kemandirian dan identitas budaya melalui pembangunan berbasis nagari
- 2018 : Menyiapkan perangkat daerah yang tanggap terhadap kebutuhan daerah dalam rangka menciptakan kemandirian dan pengembangan budaya lokal
- 2019 : Mengembangkan kemandirian diberbagai bidang berlandaskan budaya daerah
- 2020 : Memperkuat sistem pemerintahan, sistem budaya masyarakat untuk memperkuat kemandirian daerah
- 2021 : Terbentuknya Kemandirian dan kebudayaan yang bernilai positif sebagai modal dasar pembangunan Dharmasraya berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

| Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat. | | | |
|---|--|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan | 1. Meningkatnya akses kesehatan | Melanjutkan pembangunan sarana kesehatan dan memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan; | 1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk |
| | | | 2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin |
| | 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1. Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja. | meningkatkan jumlah peserta KB dan sosialisasi kesehatan reproduksi. |
| | | 2. Memberikan pelayanan KB kepada rumah tangga yang “unmet need” (tidak terjangkau pelayanan) dan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah; Menambah kader KB; membentuk desa KB | meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|--|---|---|
| | | 3. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif. Sosialisasi, pembentukan siaga penyakit di lingkungan dan perbaikan sanitasi lingkungan | Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk |
| | | 4. Menambah ketersediaan obat dan vaksin; Menambah sumberdaya manusia dan pos pelayanan | Meningkatkan cakupan dan jenis obat dan imunisasi. |
| | 3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan | Menambah dan meningkatkan sumberdaya manusia bidang kesehatan | Meningkatkan mutu pelayanan (kompetensi dokter, tenaga medis, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan) |
| | 4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat | Memanfaatkan RTH dan sarana olahraga serta event olahraga | Menggiatkan kegiatan olah raga |
| 2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan | 1. Meratanya akses pendidikan | Melengkapi sarana prasarana sekolah khususnya di daerah yang pinggiran | Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah sesuai standar nasional |
| | 2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel | 1. Mengembangkan sekolah model untuk percontohan akreditasi A yang bisa diduplikasi ke sekolah lain. | Mengadakan sekolah percontohan akreditasi A sebagai acuan pengembangan sekolah lainnya di setiap kecamatan |
| | | 2. Assesment pengelola sekolah khususnya kepala sekolah yang dilakukan secara transparan | Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah |
| | | 3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah sesuai aturan dan tepat waktu | Meningkatkan Pelatihan dan MGMP |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|---|
| | 3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca | Pembangunan pustaka nagari secara bertahap yang dimulai pada beberapa nagari percontohan | Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat |
| | 4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan | Mengadakan kegiatan harian keagamaan, mingguan dan pesantren ramadhan | Mengintensifkan waktu untuk kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan. |
| | 5. Meningkatnya tingkat pendidikan | Pelayanan pendidikan untuk anak miskin; pendidikan keorngtuaan dan siswa berprestasi | Mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorngtuaan dan pemberian beasiswa |
| 3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih | 1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja | Revitalisasi sarana prasarana balai latihan kerja yang memadai untuk mencetak tenaga trampil siap kerja | Memfungsikan dengan optimal balai latihan kerja; |
| | 2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari | 1. Membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang memerlukan tenaga kerja) | Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari |
| | | 2. Menseleksi pemuda yang memenuhi syarat untuk dilatih di balai latihan kerja. | Mengirimkan pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja |
| 4. Peningkatan kesejahteraan sosial | 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 1. Meningkatkan kesetaraan gender | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala bidang. |
| | | 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak | Menyediakan lingkungan ramah anak. |
| | 2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat | Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial | Menangani masalah penyandang masalah sosial dan masyarakat marjinal |
| Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari | 1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung. | Menciptakan kawasan pasar yang menarik sebagai bagian identitas daerah dengan peningkatan sarana prasarana pendukung lingkungan pasar | Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | 2. Revitalisasi los kios pasar nagari | Memperbaiki sarana prasarana pasar-pasar nagari sehingga memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan | Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap |
| 2. Membangun ruang publik untuk masyarakat | 1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk | 1. Membangun RTH taman yang mudah dijangkau masyarakat | Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan. |
| | | 2. Menyediakan RTH olahraga pada pusat pelayanan kecamatan | Tersedianya sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini |
| | 2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten | Mengembangkan kawasan dan objek wisata berdasarkan prioritas | Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap |
| 3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat | 1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran | Membangun dan meningkatkan jalan berdasarkan prioritas kesulitan akses | Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan permukiman ke pusat kecamatan dan kabupaten; |
| | | | Pembangunan terminal Type B dan type C; Peningkatan transportasi sungai; |
| | 2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar | 1. Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas kesulitan akses; | Membangun dan meningkatkan jalan poros tani. |
| 4. Peningkatan penyediaan Air Minum | Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan | Melayani kebutuhan air minum perpipaan sebagai pendukung perkembangan ekonomi | Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai |
| 5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat | 1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan | Menyediakan pelayanan persampahan sesuai dengan standar area pelayanan | Optimalisasi TPA, pembangunan TPA bagian selatan dan penyediaan sarana TPS |
| | 2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan | Peningkatan sanitasi rumah pada daerah prioritas rawan penyakit akibat sanitasi buruk dan permukiman minim jamban sehat | Sosialisasi dan bantuan sarana MCK; Peningkatan pengolahan limbah; pembangunan drainase; perbaikan perumahan kampung; |
| | 3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin | Penanganan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) | Pembangunan rumah layak huni. |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|---|---|
| Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Mewujudkan ketahanan pangan | 1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan | Intensifikasi dan ekstensifikasi sawah dan produk pangan lainnya di kabupaten; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | 1. Meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; |
| | | | 2. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; |
| | | | 3. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; |
| | 2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak | Memberi bantuan stimulus bibit kepada kelompok masyarakat; membuat lembaga pembibitan ternak; pengembangan sentra atau kampung ternak; memberi bantuan ternak, pakan sarana dan prasarananya; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | 1. Bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat; |
| | | | 2. Pengembangan sentra peternakan rakyat/ kampung ternak; |
| | | | 3. Pengembangan integrasi sawit- sapi potong; |
| | | | 4. Bantuan ternak, pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan; |
| | | | 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan |
| | 3. Meningkatkan produksi perikanan | 1. Memberibantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut kawasan minapolitan. | • Meningkatkan produksi perikanan; |
| | | 2. Meningkatkan fungsi penyuluh perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | • Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan |
| | 4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian | Mengolah dan pemasaran lebih lanjut hasil pertanian | 1. Pembangunan industri olahan berbasis bahan baku lokal; |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|--|
| | | | 2. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani; 3. Membangun jaringan pemasaran hasil pertanian |
| 2. Peningkatan ekonomi petani | 1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian | 1. Memberi bantuan stimulus bibit dan peningkatan fungsi balai pembibitan | 1. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun. |
| | | | 2. Mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. |
| | 2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian | 2. Memfasilitasi peningkatan kinerja kelompok pengolahan hasil pertanian. | Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao, dll). |
| | | 1. Mengaktifkan pengadaan bibit padi dan saprodi ditingkat petani; Pengadaan bibit sawit dan karet bermutu. | 1. Intensifikasi padi sawah, hortikultura, palawija |
| | | | 2. Peremajaan tanaman perkebunan. |
| | | 2. Meningkatkan peran penyuluh pertanian | Pemberdayaan penyuluh pertanian |
| | 3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat | Mempermudah pendirian dan kerjasama pengolahan hasil tambang rakyat | Mengolah bahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya untuk memberi nilai tambah |
| 3. Peningkatan produksi industri lokal | Meningkatnya nilai produksi industri | Bantuan modal usaha, fasilitasi kemitraan, pembinaan produksi, pelatihan manajemen industri, promosi, penyediaan wadah promosi UMKM (UMKM center) | Meningkatnya kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UMKK komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar. |
| 4. Peningkatan kegiatan perdagangan | 1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi | 1. Membuat aturan perlindungan pasar, menata pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern | 1. Meningkatkan perlindungan pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|---|--|
| | | 2. Memperkuat perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai soko guru | 2. Meningkatkan peran koperasi |
| Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial | 1. Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial | Mengaktifkan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan membuat pilot project perhutanan sosial | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial |
| 2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah | 1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten | Melengkapi rencana tata ruang daerah dan meningkatkan fungsi BKPRD sebagai lembaga koordinasi penataan ruang. | Menyusun dan merevisi rencana tata ruang; mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan. |
| | 2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah | Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang | Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah |
| 3. Penghijauan lahan kritis | Berkurangnya lahan kritis | Penghijauan lahan kritis dengan melibatkan masyarakat | Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomisdalam rangka penghijauan lahan kritis. |
| 4. Pelestarian keanekaragaman hayati | Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan | Sosialisasi, fasilitasi kegiatan, menyusun peraturan dan percontohan penangkaran | Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan |
| 5. Pengendalian pencemaran lingkungan | Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari | Pengendalian perijinan; mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang | Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tata ruang |
| 6. Penanggulangan bencana | Peningkatan tanggap bencana | 1. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; | Menyediakan sarana dan prasarana bencana |
| | | 2. Pemetaan daerah rawan bencana | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bencana |
| Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas | 1. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah | 1. Penguatan tugas dan fungsi PPID |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|--|
| | dari praktek korupsi | 2. melimpahkan seluruh kewenangan perizinan ke PTSP | 2. Penguatan tugas dan fungsi PTSP |
| | | 3. Mentransparankan pengadaan barang dan jasa | 3. Penguatan Tugas dan fungsi dan transparansi pengadaan barang dan jasa |
| 2. Memantapkan sistem pembangunan daerah | 1. Peningkatan Profesionalitas aparatur | Peningkatan kompetensi aparatur | Pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional |
| | 2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan (perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi) | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi. |
| | | 2. Menggali potensi keuangan daerah | Pemetaan potensi keuangan daerah |
| 3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah | 1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan | Adanya unit yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas perangkat daerah | Menyatukan informasi pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas perangkat daerah |
| | 2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi | Membangun sistem informasi pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi | Menyimpan data pembangunan dalam sistem teknologi informasi pembangunan daerah |
| 4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan | Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan | Membuat sistem pendataan informasi pembangunan yang relevan dan menyatu antara kecamatan dan nagari. | Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan |
| Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Membangun BUM Nagari | 1. Adanya BUMNagari | Jumlah BUMNag yang diberdayakan | Terbentuknya BUM Nagari |
| 2. Melakukan pembangunan berbasis nagari | 1. Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan | Dimulai dari pilot project pembangunan nagari pada 1 nagari per kecamatan Dari pilot project kemudian setelah evaluasi dapat diteruskan menjadi format seluruh nagari | Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan nagari on-line). |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|--|---|
| Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama | 1. Meningkatnya kehidupan beragama | Meningkatkan kegiatan keagamaan pesantren ramadhan, didikan subuh, pengajian di masjid dan sekolah | Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid, sekolah dan selama ramadhan |
| | 2. Meningkatkan peran adat | Fasilitasi kegiatan lembaga adat LKAM | Memperkuat peran lembaga adat |
| 2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya | 1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya | 1. Perlindungan warisan budaya | 1. Membentuk tim ahli cagar budaya; Melakukan inventarisasi warisan budaya; |
| | | | 2. Menyusun profil budaya nagari; |
| | | | 3. Menyusun peraturan daerah cagar budaya; |
| | | | 4. Menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya. |
| | | 2. Pengembangan warisan budaya | Fasilitasi penelitian warisan budaya. |
| | | 3. Pemanfaatan warisan budaya | Menyediakan sarana dan prasarana wisata sejarah |
| | 2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya | 1. Revitalisasi budaya Kabupaten Dharmasraya | 1. Memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya. |
| | | | 2. Merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu |
| | | | 3. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan |
| | | 2. Apresiasi budaya | 1. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya |
| | | | 2. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya |
| | | 3. Promosi budaya | 1. Menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmasraya 2. Melakukan kegiatan seminar budaya Dharmasraya |

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum diperoleh landasan untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibagi berdasarkan tematik misi pembangunan daerah.

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Aspek kesehatan

1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana kesehatan lainnya
2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin
3. meningkatkan pelayanan KB

4. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja
5. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif.
6. Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk melalui peningkatan sosialisasi kesehatan bersifat preventif dan perbaikan sanitasi lingkungan
7. Meningkatkan cakupan dan jenis imunisasi.
8. Meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan pelayanan prima bagi seluruh penduduk. Untuk upaya ini perlu dibangun sistem informasi kesehatan.
9. Meningkatkan mutu pelayanan sumberdaya manusia bidang kesehatan melalui peningkatan kompetensi dan jumlah dokter, tenaga medis, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
10. Menggiatkan kegiatan olah raga masyarakat dengan memanfaatkan RTH dan sarana olahraga serta mengadakan event-event olahraga.

Aspek pendidikan

11. Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah sesuai standar nasional
12. Mengadakan sekolah model sebagai acuan pengembangan sekolah lainnya dengan mengembangkan sekolah percontohan akreditasi A di setiap kecamatan yang dapat diduplikasi ke sekolah lain
13. Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah. Standarisasi prosedur pengangkatan pengelola sekolah yang transparan dan akuntabel
14. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan Pelatihan dan MGMP.
15. Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat. Dimulai dengan pembangunan pustaka nagari percontohan
16. Mengintensifkan kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan melalui: program peningkatan iman dan taqwa di sekolah; program remaja masjid; program pesantren ramadhan.
17. Pelayanan pendidikan untuk anak miskin melalui mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorantuaan.

Aspek ketenagakerjaan

18. Memfungsikan dengan optimal balai latihan kerja didukung instruktur yang andal dengan jumlah mencukupi.

19. Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari dengan membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja).
20. Perekrutan pemuda nagari dengan mengirim pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja.

Aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial

21. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penyediaan lingkungan ramah anak.
22. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat marjinal.

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah

23. Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan.
24. Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap.
25. Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan.
26. Menyediakan sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini.
27. Menyediakan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai
28. Meningkatkan wilayah pelayanan persampahan dan ketersediaan sarana persampahan melalui peningkatan sistem pengumpulan, pengangkutan, optimalisasi TPA, serta kegiatan 3R (Reduce, Reuse, recycle)
29. Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dengan peningkatan pengolahan limbah; peningkatan pelayanan drainase; dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan;
30. Meningkatkan perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin.
31. Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap.
32. Pembangunan dan peningkatan sistem transportasi wilayah dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan; pembangunan terminal; pembangunan sistem transportasi sungai.

3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata

Aspek pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan

33. Membangun dan meningkatkan jalan produksi pendukung kegiatan ekonomi.
34. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan kapasitas SDM kelompok tani. Upaya yang dilakukan seperti meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; revitalisasi sawah; memberikan bantuan peningkatan produksi (bibit, alat dan mesin pertanian)
35. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktifitas peternakan melalui berbagai upaya seperti: bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat; pengembangan sentra peternakan rakyat/kampung ternak; pengembangan integrasi sawit- sapi potong; bantuan pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan; peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan; peningkatan kapasitas SDM kelompok.
36. Meningkatkan produksi perikanan;
37. Pengembangan kawasan minapolitan; memberi bantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut sarana prasarana kawasan minapolitan;
38. meningkatkan fungsi penyuluh perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok.
39. Hilirisasi produk hasil pertanian tanaman pangan melalui pembangunan industri olahan berbasis bahan baku lokal; pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan usaha rakyat;
40. membangun jaringan pemasaran hasil pertanian
41. Peningkatan keragaman komoditi tanaman kebun masyarakat melalui meragamkan jenis tanaman kebun di tingkat petani dengan stimulasi seperti bantuan bibit, alat dan mesin pertanian
42. Mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan dan hortikultura seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah.
43. Intensifikasi tanaman hortikultura, palawija dan peremajaan tanaman perkebunan melalui upaya seperti bantuan benih unggul tanaman perkebunan dan pemberdayaan penyuluh pertanian

Aspek industri

44. Pemberdayaan pengolahan hasil tambang rakyat Dharmasraya untuk memberi nilai tambah
45. Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan hasil pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao, dll).
46. Meningkatkan kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UMKK komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar. Upaya yang dilakukan seperti: Bantuan modal usaha UMKK; fasilitasi kemitraan; pembinaan produksi; pelatihan manajemen industri.

Aspek pemasaran

47. Penguatan fungsi pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi

Aspek Sarana Pendukung Pertanian

48. Mengfungsikan dengan optimal aset sarana pendukung kegiatan ekonomi daerah (seperti balai benih, balai pembibitan, labor tanah dan daun, pasar ternak, pasar komoditi).

Aspek Pengelolaan Kehutanan Oleh Masyarakat

49. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial.

4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya

Aspek Penataan ruang

50. Menyusun dan merevisi rencana tata ruang
51. Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan.
52. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah

Aspek ekologis

53. Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomis dalam rangka penghijauan lahan kritis.
54. Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan
55. Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan DAS Batanghari sesuai dengan rencana tata ruang

Aspek Penanganan Bencana

56. Meningkatkan kemampuan penanganan bencana melalui peningkatan sarana dan prasarana tanggap bencana serta
57. peningkatan kapasitas dan jumlah SDM mitigasi dan penanggulangan bencana

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju

- 58. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah dan pelimpahan seluruh kewenangan perijinan ke PTSP. Upaya yang dilakukan yaitu: penguatan tugas dan fungsi PPID; penguatan tugas dan fungsi PTSP; serta penguatan tugas dan fungsi dan transparansi pengadaan barang dan jasa
- 59. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
- 60. Penataan kebutuhan ASN Struktural dan fungsional
- 61. Penghargaan (reward) terhadap ASN berprestasi
- 62. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi
- 63. Pemetaan potensi keuangan daerah
- 64. Menyatukan informasi pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas perangkat daerah
- 65. Menyimpan data pembangunan secara terintegrasi dalam sistem teknologi informasi pembangunan daerah
- 66. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan.

6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat

- 67. Mendirikan BUM Nagari pada sektor prioritas pembangunan ekonomi.
- 68. Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan aspek pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan sistem informasi nagari berbasis Teknologi Informasi).

7. Menjadikan agama, adat dan identitas budaya sebagai landasan pembangunan Dharmasraya

Aspek Keagamaan

- 69. Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid selama ramadhan.

Aspek Adat

- 70. Memperkuat peran lembaga adat.

Aspek Budaya

71. Mempersiapkan kerangka pelestarian warisan budaya Dharmasraya melalui: fasilitasi kegiatan lembaga adat; membentuk tim ahli cagar budaya; melakukan inventarisasi warisan budaya; menyusun profil budaya nagari; menyusun peraturan daerah cagar budaya; dan menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya; fasilitasi penelitian warisan budaya.
72. Memanfaatkan warisan budaya melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata sejarah.
73. Revitalisasi budaya Dharmasraya melalui upaya memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya; merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu; menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan; mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya; menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmasraya; melakukan kegiatan seminar budaya Dharmasraya.

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program prioritas berhubungan dengan sasaran dan kebijakan umum yang menjadi penghubung antara indikator kinerja sasaran dengan bidang urusan. Dalam tabel berikut ini terlihat uraian program prioritas Kabupaten Dharmasraya yang disandingkan dengan kebijakan umum pembangunan.

Dalam rangka mencapai target kinerja pemerintahan daerah sebagai tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan visi, misi kepala daerah, maka ditetapkan program prioritas RPJMD berdasarkan kebijakan umum. Adapun Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan RPJMD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.1. Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | Indikator Sasaran baru | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | URUSAN |
|--|---|---|---|---|-----------------|--------|---|---|
| | | | | | (2015) | (2021) | | |
| Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat. | | | | | | | | |
| 1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan | 1. Meningkatnya akses kesehatan | Melanjutkan pembangunan sarana kesehatan dan memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan; | 1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk | Angka usia harapan hidup | 69,78 | 69,9 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Bidang kesehatan |
| | | | | unit RSUD terakreditasi versi 2012 | 0 | 1 | | |
| | | | | PSC yang reprresentatif | 0 | 1 | program penerapan Public safety | |
| | | | | Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) | 12,75 | 9,62 | Program peningkatan pelayanan | |
| | | | | Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 12,750 | 9,620 | | |
| | | | 2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 173 | 140 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | |
| | 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1. Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja. | meningkatkan jumlah peserta KB dan sosialisasi kesehatan reproduksi. | Rasio akseptor KB | 65,3 | 80 | Program Keluarga Berencana | Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| | | | meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0,004 | 0,004 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | Bidang kesehatan |
| | | 2. Memberikan pelayanan KB kepada rumah tangga yang “unmet need” (tidak terjangkau pelayanan) dan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah; Menambah kader KB; membentuk desa KB | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 3. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif. Sosialisasi, pembentukan siaga penyakit di lingkungan dan perbaikan sanitasi lingkungan | Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 100 | 100 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular | |
| | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | | |
| | | 4. Menambah ketersediaan obat dan vaksin; Menambah sumberdaya manusia dan pos pelayanan | Meningkatkan cakupan dan jenis obat dan imunisasi. | Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan | 100 | 100 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | |
| | | | | | | | | |
| | 3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan | Menambah dan meningkatkan sumberdaya manusia bidang kesehatan | Meningkatkan mutu pelayanan (kompetensi dokter, tenaga medis, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan) | Rasio dokter per satuan penduduk | 0,27 | 0,34 | | |
| | | | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 2,63 | 2,63 | | |
| | 4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat | Memanfaatkan RTH dan sarana olahraga serta event olahraga | Menggiatkan kegiatan olah raga | Jumlah Lapangan olahraga | | | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Bidang kepemudaan dan olah raga |
| | | | | Jumlah event olah raga yang terlaksana | | | Program Peningkatan Sarana dan | |
| 2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan | 1. Meratanya akses pendidikan | Melengkapi sarana prasarana sekolah khususnya didaerah yang pinggiran | Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dan pendidikan dasar sesuai standar nasional | - APK SD/MI/Paket A | 110,23 | 109,92 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Bidang pendidikan |
| | | | | - APK SMP/MTs/Paket B | 77,5 | 84,2 | | |
| | | | | - APM SD/MI | 90,05 | 99,74 | | |
| | | | | - APM SMP/MTs | 60,22 | 83,65 | | |
| | | | | Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 72,406 | 85,02 | | |
| | | | | Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | 78,803 | 90,01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu | 1. Mengembangkan sekolah model untuk percontohan | Mengadakan sekolah percontohan akreditasi A | Jumlah yang terakreditasi A SD | 8 | 90 | | |
| | | | | Jumlah yang terakreditasi A SMP | 9 | 30 | | |
| | | | | | | | | |

| | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ADAK KEBUTUHAN | Indikator Sasaran kerja | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel | 2. Assesment pengelola sekolah khususnya kepala sekolah yang dilakukan secara transparan | Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah | Persentase kepala sekolah bersertifikat; tersedianya SOP pemilihan kepala sekolah; pemilihan kepala sekolah berdasarkan SOP | 0 | 100 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | 3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah sesuai aturan dan tepat waktu | Meningkatkan Pelatihan dan MGMP | #REF! | #REF! | #REF! | | |
| | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | |
| | | 3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca | Pembangunan pustaka nagari secara bertahap yang dimulai pada beberapa nagari percontohan | Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat | Jumlah Perpustakaan Binaan | 0 | 52 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Bidang perpustakaan |
| | | 4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan | Mengadakan kegiatan harian keagamaan, mingguan dan pesantren ramadhan | Mengintensifkan waktu untuk kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan. | persentase kegiatan keagamaan harian, mingguan, tahunan di sekolah | n/a | 100% | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Bidang pendidikan |
| | | | | | meningkatnya siswa melek baca alquran | n/a | 100% | | |
| | | | | | 5. Meningkatnya tingkat pendidikan | Pelayanan pendidikan untuk anak miskin; pendidikan keorangtuaan dan siswa berprestasi | Mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorangtuaan dan pemberian beasiswa | | Angka rata-rata lama sekolah |
| | 3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih | 1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja | Revitalisasi sarana prasarana balai latihan kerja yang memadai untuk mencetak tenaga trampil siap kerja | Memfungsikan dengan optimal balai latihan kerja; | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 65,88 | 68,29 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Bidang tenaga kerja |
| | | | | | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 45,0 | 70,0 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | |
| | | 2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari | 1. Membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang memerlukan tenaga kerja) | Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 65,88 | 68,29 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | |
| | | | | | 2. Menseleksi pemuda yang memenuhi syarat untuk dilatih di balai latihan kerja. | Mengirimkan pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 44,98 | 70 |
| | 4. Peningkatan kesejahteraan sosial | 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 1. Meningkatkan kesetaraan gender | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala bidang. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 67,66 | 69,37 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak | Menyediakan lingkungan ramah anak. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 12,5 | 85 | | |
| | | 2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat | Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial | Menangani masalah penyandang masalah sosial dan masyarakat marjinal | Jumlah panti asuhan yang dibina | 3 | 3 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo | Bidang sosial. |
| | | | | | Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu | 9.539 | 9.539 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | |
| Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi. | | | | | | | | | |
| | 1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari | 1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung. | Menciptakan kawasan pasar yang menarik sebagai bagian identitas daerah dengan peningkatan sarana prasarana pendukung lingkungan pasar | Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan | Jumlah kawasan pasar yang direvitalisasi | 0 | 3 | Program peningkatan sarana dan prasarana pasar | Bidang perdagangan |

| TUJUAN | | SASARAN | STRATEGI | ADAK KEBUTUHAN | Indikator Sasaran baru | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | URUTAN |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--|
| | | 2. Revitalisasi los kios pasar nagari | Memperbaiki sarana prasarana pasar-pasar nagari sehingga memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan | Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap | Persentase pasar dalam kondisi baik | 19,44 | 36,11 | | |
| 2. Membangun ruang publik untuk masyarakat | | 1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk | 1. Membangun RTH taman yang mudah dijangkau masyarakat | Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan. | Kawasan RTH terbangun | 0 | 3 kawasan | Program Pemanfaatan Ruang | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | | 2. Menyediakan RTH olahraga pada pusat pelayanan kecamatan | Tersedianya sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini | | | | | |
| | | 2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten | Mengembangkan kawasan dan objek wisata berdasarkan prioritas | Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap | jumlah kawasan wisata yang dikembangkan | n/a | 5 kawasan | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Bidang pariwisata |
| 3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat | | 1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran | Membangun dan meningkatkan jalan berdasarkan prioritas kesulitan akses | Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan permukiman ke pusat kecamatan dan kabupaten; Pembangunan terminal type C; Peningkatan transportasi sungai; | Panjang jalan dalam kodisi mantap | 66,70 | 87,05 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | | | | Banyaknya Jembatan Permanen | 118 | 250 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |
| | | | | | Panjangnya jalan yang diperbaiki | 1035,72 | 2.236 | | |
| | | | | | Jumlah Jembatan Yang diperbaiki | 66 | 191 | | |
| | | | | | jumlah terminal tipe C terbangun | 0 | 1 | | |
| | | 2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar | Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas kesulitan akses | Membangun dan meningkatkan jalan poros tani. | Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan (km) | 101.9 | 200 | Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan | Bidang pertanian |
| | | | | Panjang jalan usaha tani | 106 | 164 | Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan | | |
| 4. Peningkatan penyediaan Air Minum | | Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan | Melayani kebutuhan air minum perpipaan sebagai pendukung perkembangan ekonomi | Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai | Jumlah intake air baku yang dibangun; tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/orang/hari. | n/a | | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat | | 1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan | Menyediakan pelayanan persampahan sesuai dengan standar area pelayanan | Optimalisasi TPA, pembangunan TPA bagian selatan dan penyediaan sarana TPS | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 1,43 | 9,69 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | 2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan | Peningkatan sanitasi rumah pada daerah prioritas rawan penyakit akibat sanitasi buruk dan permukiman minim jamban sehat | Sosialisasi dan bantuan sarana MCK; Peningkatan pengolahan limbah; pembangunan drainase; perbaikan perumahan kampung. | Jumlah Desa/Nagari Yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) | 8 | 18 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | |
| | | 3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin | Penanganan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) | Pembangunan rumah layak huni. | Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu | | | Program Pengembangan Perumahan | Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman |
| | | | | | | | | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | |
| Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. | | | | | | | | | |
| 1. Mewujudkan ketahanan pangan | | 1. Meningkatkan ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan | Intensifikasi dan ekstensifikasi sawah dan produk pangan lainnya di kabupaten; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | 1. Meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; 2. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; | Produksi Padi | 70.169 | 80.898 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Bidang pertanian |
| | | | | | Produksi Jagung | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ADAK KEBUTUHAN | Indikator Sasaran baru | Capaian Kinerja | | Program Pengembangan Daerah | LOKUSAN |
|--------|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| | 2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak | Memberi bantuan stimulus bibit kepada kelompok masyarakat; membuat lembaga pembibitan ternak; pengembangan sentra atau kampung ternak; memberi bantuan ternak,pakan sarana dan prasarananya; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | 3. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; | populasi sapi | 40.785 | 45.931 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | |
| | | | 1. Bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat; | | | | | |
| | | | 2. Pengembangan sentra peternakan rakyat/ kampung ternak; | | | | | |
| | | | 3. Pengembangan integrasi sawit- sapi potong; | | | | | |
| | | | 4. Bantuan ternak, pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan; | | | | | |
| | 3. Meningkatkan produksi perikanan | 1. Memberibantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut kawasan minapolitan. 2. Meningkatkan fungsi penyuluh perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok. | • Meningkatkan produksi perikanan; | Produksi Perikanan | 19.909 | 20.809 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Bidang kelautan dan perikanan |
| | | | • Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya perairan | |
| | 4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian | Mengolah dan pemasaran lebih lanjut hasil pertanian | 1. Pembangunan industri olahan berbasis bahan baku lokal; | NTP | 100,94 (kondisi tahun 2013) | 109,65 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura | Bidang pertanian |
| | | | 2. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani; | | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan di lapangan | |
| | | | 3. Membangun jaringan pemasaran hasil pertanian | | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura | |
| | 2. Peningkatan ekonomi petani | 1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian | 1. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun. | | | | Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan | |
| | | | 2. Mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. | | | | | |
| | | | 2. Memfasilitasi peningkatan kinerja kelompok pengolahan hasil pertanian. | | | | Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan | |
| | | 2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian | 1. Intensifikasi padi sawah, hortikultura, palawija | Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian) | padi : 70.169 Ton, jagung = 0 Ton , luas areal hortikultura = 0 | padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan | |
| | | | 2. Peremajaan tanaman perkebunan. | | | | Program peningkatan produksi Perkebunan | |
| | 3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat | Mempermudah pendirian dan kerjasama pengolahan hasil tambang rakyat | Pemberdayaan penyuluh pertanian | | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan di lapangan | |
| | | | Mengolah bahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya untuk memberi nilai tambah | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBERHAJARAN | Indikator Sasaran Kerja | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | LOKASI | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------|-------|--|--|-----------|--|-------------------------|---|
| 3. Peningkatan produksi industri lokal | Meningkatnya nilai produksi industri | Bantuan modal usaha, fasilitasi kemitraan, pembinaan produksi, pelatihan manajemen industri, promosi, penyediaan wadah promosi UMKM (UMKM center) | Meningkatnya kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UMKM komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 5,97 | 4,28 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Bidang perindustrian | | | | |
| 4. Peningkatan kegiatan perdagangan | 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi | 1. Membuat aturan perlindungan pasar, menata pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern | 1. Meningkatkan perlindungan pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 13,14 | 12,92 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | Bidang perdagangan | | | | |
| | | 2. Memperkuat perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai soko guru | 2. Meningkatkan peran koperasi | Jumlah koperasi aktif | 113 | 123 | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi | Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah | | | | |
| Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial | 1. Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial | Mengaktifkan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan membuat pilot project perhutanan sosial | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial | Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation) | 4 | 9 | | Bidang kehutanan | | | | |
| 2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah | 1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten | Melengkapi rencana tata ruang daerah dan meningkatkan fungsi BKPRD sebagai lembaga koordinasi penataan ruang. | Menyusun dan merevisi rencana tata ruang; mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan. | | | | Program Perencanaan Tata Ruang | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | | | | |
| | 2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah | Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang | Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah | | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | | | | |
| 3. Penghijauan lahan kritis | Berkurangnya lahan kritis | Penghijauan lahan kritis dengan melibatkan masyarakat | Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomis dalam rangka penghijauan lahan kritis. | | | | Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi | 0 | 7 kawasan | Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam | Bidang lingkungan hidup | |
| 4. Pelestarian keanekaragaman hayati | Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan | Sosialisasi, fasilitasi kegiatan, menyusun peraturan dan percontohan penangkaran | Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan | | | | | | | | | |
| 5. Pengendalian pencemaran lingkungan | Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari | Pengendalian perijinan; mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang | Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tata ruang | | | | | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | |
| 6. Penanggulangan bencana | Peningkatan tanggap bencana | 1. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; 2. Pemetaan daerah rawan bencana | Menyediakan sarana dan prasarana bencana Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bencana | | | | | | | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | | Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat |
| Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi | 1. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah | 1. Penguatan tugas dan fungsi PPID | Perangkat Daerah kabupaten menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | n/a | 100% | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | - Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan perangkat daerah | | | | |
| | | 2. melimpahkan seluruh kewenangan perizinan ke PTSP | 2. Penguatan tugas dan fungsi PTSP | | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | | |
| | | 3. Mentransparankan pengadaan barang dan jasa | 3. Penguatan Tugas dan fungsi dan transparansi pengadaan barang dan jasa | | | | | | | | | |
| 2. Memantapkan sistem pembangunan daerah | 1. Peningkatan Profesionalitas aparatur | Peningkatan kompetensi aparatur | Pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional | persentase ASN terlatih | n/a | 95% | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ADAPTASI KEBUTUHAN | Indikator Sasaran baru | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | INDUKSI |
|---|--|---|---|--|-----------------|------------------------|--|--|
| | 2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan (perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi) | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi. | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Bidang perencanaan |
| | | 2. Menggali potensi keuangan daerah | Pemetaan potensi keuangan daerah | | | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Bidang keuangan |
| 3. Pembangunan sistem informasi pemerintahan daerah | 1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan | Adanya unit yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas SKPD | Menyatukan informasi pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas SKPD | e-planning | belum | ada | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Bidang perencanaan |
| | 2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi | Membangun sistem informasi pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi | Menyimpan data pembangunan dalam sistem teknologi informasi pembangunan daerah | e-budgetting | belum | ada | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Bidang keuangan |
| | | | | perangkat daerah memiliki website | 3 | semua perangkat daerah | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Bidang komunikasi dan informatika |
| 4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan | Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan | Membuat sistem pendataan informasi pembangunan yang relevan dan menyatu antara kecamatan dan nagari. | Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan | nagari memiliki website | 3 | 52 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa |
| Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. | | | | | | | | |
| 1. Membangun BUM Nagari | 1. Adanya BUMNagari | Jumlah BUMNag yang diberdayakan | Terbentuknya BUM Nagari | Jumlah BUM Nagari | 0 | 52 | Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan | Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 2. Melakukan pembangunan berbasis nagari | 1. Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan | Dimulai dari pilot project pembangunan nagari pada 1 nagari per kecamatan Dari pilot project kemudian setelah evaluasi dapat diteruskan menjadi format seluruh nagari | Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan nagari on-line) | persentase nagari yang memiliki pemerintahan yang terstandar | 0 | 100% | Program Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari | |
| Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama | 1. Meningkatnya kehidupan beragama | Meningkatkan kegiatan keagamaan pesantren ramadhan, didikan subuh, pengajian di masjid dan sekolah | Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid, sekolah dan selama ramadhan | persentase sekolah melakukan kegiatan keagamaan | 100% | 100% | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Bidang pendidikan |
| | 2. Meningkatkan peran adat | Fasilitasi kegiatan lembaga adat LKAM | Memperkuat peran lembaga adat | | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya | - Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan perangkat daerah |
| 2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya | 1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya | 1. Perlindungan warisan budaya | 1. Membentuk tim ahli cagar budaya; Melakukan inventarisasi warisan budaya; | Terbentuknya tim ahli cagar budaya; | 0 | 1 tim | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Bidang kebudayaan |
| | | | 2. Menyusun profil budaya nagari; | Kegiatan penelitian warisan budaya. | 0 | 5 kegiatan | Program Pengembangan Nilai Budaya | |
| | | | 3. Menyusun peraturan daerah cagar budaya; | Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah | 0 | 5 paket | | |
| | | | 4. Menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya. | Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu; | 0 | 5 paket | | |
| | | 2. Pengembangan warisan budaya | Fasilitasi penelitian warisan budaya. | Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya | 0 | 5 paket | | |
| | | 3. Pemanfaatan warisan budaya | Menyediakan sarana dan prasarana wisata sejarah | | | | | |

| TUJUAN | | SASARAN | STRATEGI | ADAK KEBUTUHAN | Indikator Sasaran kerja | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | INDUKSIAN | | |
|--------|--|--|---|---|--|-----------------|---------|----------------------------|-----------|--|--|
| | | 2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmastraya | 1. Revitalisasi budaya Kabupaten Dharmastraya | 1. Memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya. | Inventarisasi warisan budaya; | 0 | 6 unit | | | | |
| | | | | 2. Merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu | | | | | | | |
| | | | | 3. Menyediakan dan menembangkan sarana dan prasarana perpustakaan | | | | | | | |
| | | | 2. Apresiasi budaya | 1. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmastraya | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 3 event | 5 event | | | | |
| | | | | 2. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmastraya | | | | | | | |
| | | | 3. Promosi budaya | 1. Menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmastraya | Gedung promosi budaya | 0 | 1 unit | | | | |
| | | | | 2. Melakukan kegiatan seminar budaya Dharmastraya | | | | | | | |

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab ini berbagai perumusan sebelumnya diterjemahkan ke dalam penyusunan program prioritas. Program prioritas dilengkapi dengan indikator kinerja serta pencapaian kinerja awal dan akhir dari RPJMD pada setiap bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawabnya. Uraian bab ini menghubungkan urusan pemerintah dengan perangkat daerah yang terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi program prioritas disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya memisahkan antara aspek strategis dan operasional dari suatu program prioritas, sehingga dalam memikirkan program pembangunan daerah perlu kita pisahkan antara program prioritas yang bersifat strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Sementara suatu urusan menjadi strategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan. Suatu urusan yang bersifat strategis berpengaruh sangat luas dan mendesak untuk mencapai kinerja pembangunan daerah. Ketika suatu urusan atau program menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi nilainya dibanding program yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu program prioritas yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah. Namun untuk program prioritas yang dikategorikan bersifat strategis maka menjadi tanggung jawab Kepala perangkat daerah dan juga kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Setelah program prioritas dirumuskan maka kemudian dibuat alokasi pagu anggaran untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berisi program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun yang secara tidak langsung terkait dengan pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Dharmasraya

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|---|---|---------------------|-------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | | | 358.412.711.919 | | 505.621.856.410 | | 532.981.161.732 | | 468.348.248.826 | | 683.913.496.507 | | 820.823.949.705 | | 2.892.965.245.979 | |
| 1 A | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 333.407.598.436 | | 455.738.551.900 | | 481.221.373.564 | | 419.079.064.968 | | 632.701.092.898 | | 762.496.996.716 | | 2.621.093.499.361 | |
| 1 1 | BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 37.453.768.000 | | 46.212.752.000 | | 47.898.302.000 | | 72.000.727.000 | | 117.915.264.500 | | 120.045.095.750 | | 241.438.069.250 | |
| 1 1 05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah Pelatihan dan Bimtek | 0 | orang | 0 | 30.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 78.000.000 | 5 | 78.000.000 | 5 | 78.000.000 | 5 | 78.000.000 | 25 | 402.000.000 | Dinas Pendidikan |
| 1 1 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK PAUD | 52,83 | % | 56,13 | 3.085.101.500 | 59,43 | 4.287.000.000 | 62,73 | 4.855.200.000 | 66,03 | 5.379.900.000 | 69,33 | 12.395.600.000 | 72,63 | 16.834.500.000 | 72,63 | 29.837.301.500 | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Ruang Kelas/Siswa | 1:28 | kelas/siswa | 1:25 | | 1:22 | | 1:20 | | 1:18 | | 1:16 | | 1:15 | | 1:15 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Guru/Siswa | 1:18 | kelas/siswa | 1:16 | | 1:15 | | 1:12 | | 1:12 | | 1:12 | | 1:12 | | 1:12 | | Dinas Pendidikan |
| 1 1 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | - APM SD/MI | 100 | % | 90,05 | 26.553.742.000 | 93,21 | 28.523.252.000 | 95,34 | 28.682.002.000 | 97,65 | 61.570.127.000 | 98,76 | 99.889.064.500 | 99,74 | 96.925.395.750 | 99,74 | 162.143.583.250 | Dinas Pendidikan |
| | | - APM SMP/MTs | 78,33 | % | 61,32 | | 62,87 | | 64,78 | | 75,89 | | 80,53 | | 83,65 | | 83,65 | | Dinas Pendidikan |
| | | - APK SD/MI/Paket A | 108,61 | % | 111,76 | | 112,87 | | 113,62 | | 114,96 | | 115,71 | | 116,12 | | 116,12 | | Dinas Pendidikan |
| | | - APK SMP/MTs/Paket B | 90,93 | % | 77,5 | | 78,6 | | 81,2 | | 82,4 | | 83 | | 84,2 | | 84,2 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah yang terakreditasi A SD | 8 | Sekolah | 8 | | 25 | | 40 | | 70 | | 90 | | 120 | | 120 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah yang terakreditasi A SMP | 9 | Sekolah | 9 | | 12 | | 17 | | 23 | | 26 | | 30 | | 30 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Guru dan Siswa SD | 14,65 | % | 14,65 | | 15,95 | | 16,25 | | 17 | | 18,25 | | 20,21 | | 116,96 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Guru dan Siswa SMP | 15,65 | % | 15,65 | | 16,25 | | 17,35 | | 18,15 | | 18,95 | | 19,12 | | 121,12 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Ruang Kelas / Siswa SD | 1,49 | % | 1,49 | | 2,18 | | 3,45 | | 4,11 | | 4,87 | | 5,24 | | 22,83 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio Ruang Kelas / Siswa SMP | 2,12 | % | 2,12 | | 2,89 | | 3,34 | | 4,23 | | 4,92 | | 4,98 | | 24,6 | | Dinas Pendidikan |
| 1 1 17 | Program Pendidikan Menengah | APK SMA | 72,98 | | | 410.750.000 | | 9.800.000.000 | | 9.800.000.000 | | 9.950.000.000 | | 9.970.000.000 | | 10.000.000.000 | | 49.930.750.000 | Dinas Pendidikan |
| | | APM | 57,21 | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Siswa Putus Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| 1 1 18 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Melek Huruf | 97,53 | persen | 98 | 527.840.000 | 98 | 370.000.000 | 98,2 | 480.000.000 | 98,3 | 560.000.000 | 98,4 | 620.000.000 | 98,5 | 690.000.000 | 98,6 | 2.955.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah PKBM / LKP Terakreditasi | 0 | Lembaga | 0 | 0 | 3 | 75.000.000 | 5 | 125.000.000 | 7 | 210.000.000 | 8 | 320.000.000 | 9 | 360.000.000 | 32 | 1.090.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Tutor yang Bersertifikasi | 0 | Orang | 0 | 0 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 7 | 175.000.000 | 7 | 175.000.000 | 29 | 575.000.000 | Dinas Pendidikan |
| 1 1 19 | Program Pendidikan Luar Biasa | Jumlah SLB | 3 | Sekolah | 3 | 235.000.000 | 3 | 270.000.000 | 3 | 480.000.000 | 4 | 580.000.000 | 5 | 600.000.000 | 6 | 630.000.000 | 6 | | Dinas Pendidikan |
| 1 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SD | 31 | Orang | 59 | 1.589.834.000 | 51 | 1.968.500.000 | 71 | 2.117.100.000 | 91 | 2.231.700.000 | 125 | 2.366.600.000 | 145 | 2.496.200.000 | 145 | 12.769.934.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SMP | 28 | orang | 28 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Guru Sertifikasi SD | 853 | Orang | 853 | | 600 | | 420 | | 390 | | 250 | | 150 | | 2663 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Guru Sertifikasi SMP | 311 | Orang | 311 | | 270 | | 220 | | 200 | | 150 | | 50 | | 1201 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Pengawas Sekolah yang berkualifikasi S2 | 1 | Orang | 1 | 0 | 2 | | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 11 | 400.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Kepala Sekolah yang berkualifikasi S2 | 77 | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah guru yang berkualifikasi S1 | 2817 | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat | 70 | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dinas Pendidikan |
| 1 1 22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Tingkat Capaian SPM | 60 | Persen | 60 | 5.432.250.500 | 65 | 10.734.000.000 | 75 | 11.206.000.000 | 80 | 1.601.000.000 | 95 | 1.966.000.000 | 100 | 2.391.000.000 | | 33.330.250.500 | Dinas Pendidikan |
| 1 2 | BIDANG KESEHATAN | | | | | 38.650.042.750 | | 191.816.799.900 | | 138.247.279.314 | | 95.384.121.890 | | 119.879.607.164 | | 122.193.400.966 | | 610.989.134.783 | |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|--|--|---------------------|-----------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 2 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS | 25 | % | 25 | 1.119.931.150 | 25,5 | 1.397.782.240 | 26 | 1.567.310.464 | 26,5 | 1.779.041.510 | 27 | 1.958.695.661 | 27,5 | 2.154.565.228 | 27,5 | 8.561.561.253 | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio posyandu per satuan balita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Nagari Siaga Aktif | 63 | % | 64 | 619.931.150 | 65 | 1.397.782.240 | 66 | 1.567.310.464 | 67 | 1.779.041.510 | 68 | 1.958.695.661 | 69 | 2.154.565.228 | 69 | 9.477.326.253 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Posyandu Strata mandiri | 57 | % | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 63 | | Dinas Kesehatan |
| 1 2 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Jumlah Desa/Nagari Yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) | 8 | Nagari | 0 | 317.130.150 | 10 | 1.227.531.185 | 12 | 845.743.727 | 14 | 894.382.745 | 16 | 733.484.104 | 18 | 998.995.600 | 18 | 4.917.267.511 | Dinas Kesehatan |
| 1 2 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | | | | 753.365.000 | | 1.190.100.000 | | 1.325.500.000 | | 2.090.400.000 | | 1.574.300.000 | | 2.015.400.000 | | 8.949.065.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prevalensi HIV (persen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi | 70 | % | 91 | | 91,5 | | 92 | | 92,5 | | 93 | | 93,5 | | 93,5 | | |
| | | penemuan penderita pneumonia balita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | penemuan penderita diare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | AKI (/ 100.000 KH) | 153 | | 330 | 654.000.000 | 325 | 1.040.000.000 | 310 | 1.010.000.000 | 305 | 1.000.000.000 | 300 | 1.000.000.000 | 280 | 420.000.000 | 280 | 5.124.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Angka kematian bayi (AKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 29 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | AKABA (/ 1000 KH) | 24 | | 30 | 175.000.000 | 28 | 245.000.000 | 25 | 245.000.000 | 24 | 70.000.000 | 23 | 70.000.000 | 22 | - | 22 | 805.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase balita gizi buruk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 30 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Persentase Kelompok kesehatan lansia yang dilayani | 70 | % | 70 | 74.087.250 | 71 | 44.000.000 | 72 | 50.000.000 | 73 | 55.000.000 | 74 | 6.000.000 | 75 | 62.000.000 | 75 | 291.087.250 | Dinas Kesehatan |
| 1 2 xx | Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja | Persentase kesehatan Anak sekolah baru | 95 | % | 95 | 173.000.000 | 96 | 189.800.000 | 97 | 208.480.000 | 98 | 230.128.000 | 0,99 | 252.840.800 | 1 | 277.724.880 | 1 | 1.331.973.680 | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah kesehatan anak sekolah baru | 5092 | orang | 5112 | 173.000.000 | 5258 | 189.800.000 | 5258 | 208.480.000 | 5258 | 230.128.000 | 5258 | 252.840.800 | 5258 | 277.724.880 | 5258 | 1.331.973.680 | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan PKPR | 4 | Puskesmas | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,09 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah nagari yang melaksanakan kesehatan remaja | | Nagari | | | 10 | | 10 | | 10 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | Dinas Kesehatan |
| 1 2 25 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | 100 | % | 100 | 21.969.250.000 | 100 | 20.800.000.000 | 100 | 19.500.000.000 | 100 | 13.750.000.000 | 100 | 29.450.000.000 | 100 | 27.550.000.000 | 100 | 84.019.250.000 | Dinas Kesehatan |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|---|---|---------------------|--------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Rasio puskesmas, klinik, poliklinik,ustu per satuan penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Puskesmas yang statusnya ditingkatkan menjadi RS | 0 | unit | | - | 1 | 25.000.000.000 | 0 | 29.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 23.000.000.000 | 0 | 25.000.000.000 | 1 | 69.000.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1 2 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan | 100 | % | 100 | 4.984.494.250 | 100 | 6.750.000.000 | 100 | 7.250.000.000 | 100 | 7.800.000.000 | 100 | 8.900.000.000 | 100 | 9.400.000.000 | | 44.084.494.250 | Dinas Kesehatan |
| | Program Jaminan Persalinan | AKI (/ 100.000 KH) | 153 | | 330 | 1.800.000.000 | 325 | 1.800.000.000 | 310 | 1.800.000.000 | 305 | 1.800.000.000 | 300 | 1.800.000.000 | 280 | 1.800.000.000 | 280 | 10.800.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | AKB (/ 1000 KH) | 20 | | 22 | | 22 | | 21 | | 21 | | 20 | | 20 | | 20 | | Dinas Kesehatan |
| | Program Kesehatan Prioritas Nasional | Cakupan Puskesmas yang mendapatkan BOK | 100 | % | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | | 25.698.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100 | % | 100 | 1.483.442.250 | 100 | 1.631.786.475 | 100 | 1.794.965.123 | 100 | 1.974.461.635 | 100 | 2.171.907.798 | 100 | 2.389.098.578 | | 11.445.661.859 | Dinas Kesehatan |
| 1 2 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas Terakreditasi | 1 | Unit | 3 | 971.990.500 | 4 | 1.640.000.000 | 5 | 2.999.000.000 | 5 | 3.070.000.000 | 5 | 3.221.000.000 | 5 | 3.723.000.000 | 5 | 13.783.990.500 | Dinas Kesehatan |
| 1 2 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas 3,5 | 2,8 | | 2,8 | 623.352.200 | 2,85 | 303.000.000 | 2,9 | 322.000.000 | 2,9 | 418.000.000 | 3,2 | 132.000.000 | 3,5 | 683.000.000 | | - | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase KLB ditangani <24 Jam | 100 | kasus | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Kesehatan |
| 1 2 24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | | | | - | | 200.000.000 | | 208.000.000 | | 288.000.000 | | 568.000.000 | | 652.000.000 | | 572.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | | jiwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin | | jiwa | | | 220 | 200.000.000 | 230 | 208.000.000 | 288 | 288.000.000 | 338 | 568.000.000 | 350 | 652.000.000 | | 1.916.000.000 | |
| 1 2 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | cakupan sarana yang dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya | | % | 60 | | 65 | | 65 | | 70 | | 70 | | 75 | | | - | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dibina | | | 90 | | 90 | | 115 | | 120 | | 120 | | 120 | | | - | Dinas Kesehatan |
| 1 2 xx | Program Peningkatan keterampilan SDM dengan mengikutkan pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam penanganan kasus trauma | Jumlah tenaga medis dan para medis yang mengikuti pelatihan (Dokter, Perawat, Petugas Radiologi, Petugas Terkait) | 262 | orang | 25 | 180.000.000 | 25 | 198.000.000 | 25 | 217.800.000 | 20 | 239.580.000 | 20 | 263.538.000 | 13 | 289.891.800 | 262 | 1.388.809.800 | RSUD |
| 1 2 xx | program penerapan Public safety centre (PSC) | PSC yang reprresentatif | 0 | unit | 0 | - | 1 | 470.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 25.000.000 | | - | 1 | 885.000.000 | RSUD |
| | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | unit RSUD terakreditasi versi 2012 | 0 | Unit | 0 | - | 1 | 123.000.000.000 | 0 | 65.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 40.000.000.000 | 1 | 40.000.000.000 | 1 | 318.000.000.000 | RSUD |
| | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | u | | | | | | | | | | | | | | - | Setda ekbang |
| 1 3 | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 244.698.800.000 | | 204.234.000.000 | | 279.115.542.000 | | 235.668.466.078 | | 376.721.221.234 | | 503.295.000.000 | | 1.675.451.808.078 | |
| 1 3 A | - PEKERJAAN UMUM | | | | | 242.688.800.000 | | 200.884.000.000 | | 275.515.542.000 | | 233.068.466.078 | | 372.811.221.234 | | 502.335.000.000 | | 1.672.771.808.078 | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif | | Unit | | 19.800.000.000 | | 37.300.000.000 | | 72.000.000.000 | | 17.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 170.100.000.000 | Dinas PU |
| 1 3 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Panjang jalan dalam kodisi mantap | 787,92 | KM | 40 | 171.300.000.000 | 40 | 91.850.000.000 | 45 | 99.150.000.000 | 45 | 122.195.466.078 | 45 | 254.650.000.000 | 50 | 293.900.000.000 | 265 | 1.033.045.466.078 | Dinas PU |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|---|---|--|-------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | panjang jalan baru yang dibangun | | km | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah jembatan yang dibangun | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Banyaknya Jembatan Permanen | 118 | Unit | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | 15 | | 16 | | 66 | | Dinas PU | | |
| 1 | 3 | 16 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun | 15 ribu | M | 14.286 | 20.400.000.000 | 69 | 25.300.000.000 | 75 | 31.300.000.000 | 75,000 | 31.300.000.000 | 75,000 | 31.000.000.000 | 75,000 | 30.400.000.000 | 14655 | 154.700.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 3 | 18 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Panjangnya jalan yang diperbaiki | 1035,72 | Km | 200 | 10.904.000.000 | 200 | 11.304.000.000 | 200 | 13.104.000.000 | 200 | 24.105.000.000 | 200 | 29.436.221.234 | 200 | 113.505.000.000 | | 72.827.000.000 | Dinas PU |
| | | Jumlah Jembatan Yang diperbaiki | 66 | Unit | 20 | | 25 | | 25 | | 25 | | 20 | | 10 | | | | Dinas PU | | |
| 1 | 3 | 27 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | Cakupan Pleayanan Air Minum | | % | | 3.750.000.000 | | 4.100.000.000 | | 4.250.000.000 | | 4.450.000.000 | | 4.650.000.000 | | 14.650.000.000 | | 25.850.000.000 | Dinas PU |
| | | Cakupan (Pleayanan Air Limbah | | % | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PU | | |
| 1 | 3 | 30 | Program pembangunan infrastruktur perdesaaan | Cakupan atau Persentase Infrastruktur Perdesaan yang layak | | | | 8.000.000.000 | | 11.850.000.000 | | 12.600.000.000 | | 13.850.000.000 | | 13.850.000.000 | | 13.850.000.000 | | 74.000.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 3 | 24 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan | 800 | Ha | 750 | 8.534.800.000 | 850 | 12.980.000.000 | 700 | 36.511.042.000 | 825 | 16.268.000.000 | 650 | 21.525.000.000 | 700 | 18.930.000.000 | 4475 | 114.748.842.000 | Dinas PU |
| 1 | 3 | 26 | Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnva | Luas cadangan air yang terkonversi | | Ha | | - | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 400.000.000 | | 250.000.000 | | 700.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 3 | 28 | Program pengendalian banjir | Pengamanan terhadap bantaran sungai dan pengamanan dari banjir pada musim hujan | | | | - | | 3.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 2.300.000.000 | | 4.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 17.300.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 3 | B | - PENATAAN RUANG | | | | | 2.010.000.000 | | 3.350.000.000 | | 3.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | 3.910.000.000 | | 960.000.000 | | 2.680.000.000 | |
| 1 | 1 | 15 | Program Perencanaan Tata Ruang | persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation) | | % | | 1.500.000.000 | | 2.350.000.000 | | 2.500.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.360.000.000 | | 360.000.000 | | 2.480.000.000 | Dinas PU |
| | | Program Pemanfaatan Ruang | persentase izin pemanfaatan ruang | | | | | 410.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.450.000.000 | | 500.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | persentase kasus penataan ruang terselesaikan | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 1 | 4 | | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | 11.880.000.000 | |
| 1 | 4 | 15 | Program Pengembangan Perumahan | Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. | | Unit | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 120 | 1.800.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 4 | 17 | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | Prasarana dan sarana dasar pemukiman. | | | 4 | 1.680.000.000 | 4 | 1.680.000.000 | 4 | 1.680.000.000 | 4 | 1.680.000.000 | 4 | 1.680.000.000 | 4 | 1.680.000.000 | 24 | 10.080.000.000 | Dinas PU |
| 1 | 5 | | BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 8.529.987.686 | | 9.040.000.000 | | 11.583.250.250 | | 11.648.750.000 | | 13.808.000.000 | | 12.586.500.000 | | 67.196.487.250 | |
| | | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | jumlah kemitraan dengan lembaga lain (sekolah, ormas, parpol, LSM, TNI Polri, Pol PP) | 7 | lembag a | | 7 | 133.786.000 | 7 | 370.000.000 | 7 | 385.000.000 | 7 | 385.000.000 | 7 | 405.000.000 | 7 | 405.000.000 | 7 | 2.083.786.000 | Kantor Kesbangpol |
| | | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Jumlah kasus pekat tertangani (PSK, miras, Narkoba, judi, penrtiban ASN, Pedagang kaki lima | | | | | 212.736.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 1.337.736.000 | Kantor Kesbangpol |
| | | | jumlah peserta penyuluhan dan pencegahan pekat (kesbangpol) - miras, narkoba | 11 | kegiata n | | 16 | 212.736.000 | 16 | 225.000.000 | 16 | 225.000.000 | 16 | 225.000.000 | 16 | 225.000.000 | 16 | 225.000.000 | 96 | 1.337.736.000 | Kantor Kesbangpol |
| | | | jumlah penindakan kasus pekat (pol PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantor Kesbangpol | |
| | | Program pendidikan politik masyarakat | jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina | 50 | organis asi | 50 | | 79.465.000 | 50 | 225.000.000 | 50 | 225.000.000 | 55 | 235.000.000 | 55 | 235.000.000 | 60 | 235.000.000 | 320 | 1.234.465.000 | Kantor Kesbangpol |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya Kemampuan Personil | | | 2 org | | 50.000.000 | 4 org | 50.000.000 | 4 org | 50.000.000 | 4 org | 50.000.000 | 4 org | 50.000.000 | 18 org | 250.000.000 | | 500.000.000 | Kantor Satpol PP |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Cakupan Wilayah yang meningkat keamanan dan kenyamanan lingkungan | | nagari | 52 | 614.000.000 | 52 | 625.000.000 | 52 | 630.000.000 | 52 | 632.500.000 | 52 | 735.000.000 | 52 | 2.136.500.000 | | 5.373.000.000 | Kantor Satpol PP |
| | PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TIDAK KRIMINAL | cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal | | kabupaten | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 42.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 50.000.000 | | 260.000.000 | Kantor Satpol PP |
| | | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) | Jumlah Kasus pekat yang tertangani | | kasus | 36 | 1.800.000.000 | 32 | 2.000.000.000 | 30 | 2.200.000.000 | 28 | 2.200.000.000 | 26 | 2.300.000.000 | 24 | 2.300.000.000 | | 12.800.000.000 | Kantor Satpol PP |
| | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Tingkat Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 30 | Persentase | 10 | 3.550.000.000 | 1 | 2.200.000.000 | 20 | 4.505.000.000 | 25 | 3.700.000.000 | 20 | 6.020.000.000 | 15 | 4.345.000.000 | 100 | 24.320.000.000 | BPBD |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Tingkat pelayanan penanggulangan bencana alam | 25 | Persentase | 10 | 990.000.000 | 10 | 1.140.000.000 | 20 | 1.601.250.000 | 25 | 1.701.250.000 | 20 | 1.460.000.000 | 15 | 1.460.000.000 | 100 | 8.352.500.000 | BPBD |
| | Program Penanganan dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam | Tingkat Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana alam | 0 | Persentase | 0,05 | 350.000.000 | 0,1 | 350.000.000 | 0,15 | 405.000.000 | 0,2 | 460.000.000 | 0,25 | 465.000.000 | 0,25 | 465.000.000 | 1 | 2.495.000.000 | BPBD |
| | Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat | Jumlah kafilah,jemaah haji yang terbina | | Orang | | 686 | | 225.000.700 | | 1.020 | | 1.120 | | 1.250 | | - | | 225.004.776 | Setda Kesra, 11 kecamatan |
| | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa | 400 | orang | | 715.000.000 | 520 | 1.815.000.000 | 520 | 1.315.000.250 | 1 Paket | 2.015.000.000 | 1 Paket | 1.865.000.000 | | 715.000.000 | | 8.440.000.250 | Setda Kesra |
| 1 6 | BIDANG SOSIAL | | | | | 2.095.000.000 | | 2.455.000.000 | | 2.397.000.000 | | 2.397.000.000 | | 2.397.000.000 | | 2.397.000.000 | | 14.138.000.000 | |
| | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu | 9539 | Jiwa | 9539 | 975.000.000 | 9539 | 1.080.000.000 | 9539 | 1.180.000.000 | 9539 | 1.180.000.000 | 9539 | 1.180.000.000 | 9539 | 1.180.000.000 | 9539 | 6.775.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial | 47 | Orang | 70 | 975.000.000 | 70 | 1.220.000.000 | 70 | 1.062.000.000 | 70 | 1.062.000.000 | 70 | 1.062.000.000 | 70 | 1.062.000.000 | 420 | 6.443.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| | Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo | Jumlah panti asuhan yang dibina | 3 | Orsos | 3 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 350.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah orsos yang diberdayakan | 7 | orsos | 5 | 95.000.000 | 5 | 95.000.000 | 5 | 95.000.000 | 5 | 95.000.000 | 5 | 95.000.000 | 5 | 95.000.000 | 5 | 570.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| 1 B | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR. | | | | | 25.005.113.483 | | 49.883.304.510 | | 51.759.788.168 | | 49.269.183.859 | | 51.212.403.609 | | 58.326.952.989 | | 271.871.746.619 | |
| 1 7 | BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 1.293.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.761.000.000 | | 3.295.000.000 | | 3.415.000.000 | | 3.745.000.000 | | 16.809.000.000 | |
| | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 65,88 | % | 66,5 | 850.000.000 | 66,64 | 1.740.000.000 | 67,03 | 2.300.000.000 | 67,44 | 2.800.000.000 | 67,86 | 2.880.000.000 | 68,29 | 3.160.000.000 | 68,29 | 13.730.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Angkatan kerja yang tersalurkan | 168 | Orang | 200 | 188.000.000 | 250 | 275.000.000 | 300 | 205.000.000 | 300 | 230.000.000 | 350 | 250.000.000 | 400 | 280.000.000 | 1800 | 1.428.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Jumlah kasus ketenagakerjaan yang tertangani | 7 | Kasus | 7 | 255.000.000 | 7 | 285.000.000 | 10 | 256.000.000 | 10 | 265.000.000 | 10 | 285.000.000 | 10 | 305.000.000 | 54 | 1.651.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| 1 8 | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK | | | | | - | | 485.000.000 | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 590.000.000 | | 630.000.000 | | 2.755.000.000 | |
| | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan | 0 | Jenis Program | 0 | - | 3 | 60.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 70.000.000 | 3 | 310.000.000 | BPML2NPPKB |
| | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan | 0 | SKPD | 0 | - | 6 | 150.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 155.000.000 | 6 | 165.000.000 | 6 | 170.000.000 | 6 | 790.000.000 | BPML2NPPKB |
| | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 25 | kasus | 0 | - | 22 | 150.000.000 | 17 | 150.000.000 | 13 | 155.000.000 | 10 | 160.000.000 | 5 | 165.000.000 | 3 | 780.000.000 | BPML2NPPKB |
| | | Rasio KDRT | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------|----------------|--|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan | 0 | persen (%) | 0 | - | 10 | 125.000.000 | 20 | 150.000.000 | 30 | 175.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 225.000.000 | 30 | 875.000.000 | BPML2NPPKB |
| 1 9 | BIDANG PANGAN | | | | | 1.100.000.000 | | 1.347.000.000 | | 1.404.000.000 | | 1.528.000.000 | | 1.648.500.000 | | 1.809.000.000 | | 8.836.500.000 | |
| | Program peningkatan ketahanan pangan | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita. | | | | 630.000.000 | | 747.000.000 | | 724.000.000 | | 793.000.000 | | 858.500.000 | | 944.000.000 | | 4.696.500.000 | BKP3 |
| | | - Energi | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | | - Protein | 133 | | 136 | | 140 | | 143 | | 150 | | 151 | | 154 | | 154 | | |
| | | Penguatan Cadangan Pangan. | - | | - | | 30 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 80 | | |
| | | Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. | 70 | | 75 | | 80 | | 83 | | 83 | | 85 | | 85 | | 85 | | |
| | | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. | 70 | | 75 | | 80 | | 83 | | 83 | | 85 | | 85 | | 85 | | |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH). | 76 | | 77 | | 79 | | 81 | | 81 | | 83 | | 83 | | 83 | | |
| | | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | - | | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 85 | | 85 | | |
| | | Penanganan Daerah Rawan Pangan. | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | - Rawan Ketersediaan Pangan | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | |
| | | - Rawan Rumah Tangga Miskin | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | |
| | | - Rawan gizi kurang | 13 | | 22 | | 22 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| | | Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | |
| | Program peningkatan diversifikasi pangan | Pola konsumsi pangan beragam (konsumsi beras per tahun) | | kg/ tahun | | 470.000.000 | | 600.000.000 | 48 | 680.000.000 | 53 | 735.000.000 | 58 | 790.000.000 | 63 | 865.000.000 | 222 | 4.140.000.000 | BKP3 |
| 1 10 | BIDANG PERTANAHAN | | | | | 518.820.000 | | 631.949.200 | | 584.766.152 | | 701.372.121 | | 591.874.448 | | 627.386.915 | | 3.656.168.837 | |
| | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan | | | | 518.820.000 | | 551.949.200 | | 584.766.152 | | 621.372.121 | | 591.874.448 | | 627.386.915 | | 3.496.168.837 | Setda-Tapem |
| | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Terlaksananya keteraturan dalam administrasi pertanahan dan pengoptimalan penggunaan tanah | | | | - | | 80.000.000 | | - | | 80.000.000 | | - | | - | | 160.000.000 | Setda-Tapem |
| 1 11 | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 7.308.680.000 | | 10.095.817.560 | | 9.537.248.216 | | 7.954.559.238 | | 8.834.935.161 | | 9.718.428.675 | | 53.449.668.849 | |
| 1 08 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah kelompok peduli sampah | 11 | Kelompok | 14 | 1.810.000.000 | 16 | 3.238.000.000 | 30 | 3.278.600.000 | 33 | 1.183.646.200 | 42 | 1.302.010.820 | 46 | 1.432.211.902 | #NAME? | 12.244.468.922 | |
| 1 08 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Jumlah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan yang dibina dan diawasi | 10 | Usaha/Kegiatan | 13 | 3.095.000.000 | 18 | 2.262.850.410 | 18 | 1.264.384.351 | 18 | 1.277.222.786 | 18 | 1.496.520.065 | 18 | 1.646.172.070 | #NAME? | 11.042.149.682 | BLH |
| 1 08 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam | Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi | 0 | Kawasan | 2 | 650.000.000 | 4 | 1.252.960.700 | 6 | 1.408.256.770 | 7 | 1.549.082.447 | 7 | 1.703.990.691 | 7 | 1.874.389.760 | #NAME? | 8.438.680.368 | BLH |
| 1 08 | Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam | Luas lahan konservasi yang telah direhabilitasi | 0 | Ha | 100 | 1.155.000.000 | 100 | 1.332.000.000 | 100 | 1.375.000.000 | 100 | 1.512.500.000 | 100 | 1.663.750.000 | 100 | 1.830.125.000 | #NAME? | 8.868.375.000 | BLH |
| 1 08 | Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup | Jumlah dokumen terkait dengan SDA dan LH | 14 | Dokumen | 4 | 368.680.000 | 4 | 284.006.450 | 4 | 312.407.095 | 4 | 343.647.805 | 4 | 371.357.585 | 4 | 408.493.343 | #NAME? | 2.088.592.277 | BLH |
| 1 08 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Jumlah kelompok sasaran pengendalian polusi | 0 | Klp | 2 | 200.000.000 | 2 | 1.696.000.000 | 2 | 1.865.600.000 | 2 | 2.052.160.000 | 2 | 2.257.376.000 | 2 | 2.483.113.600 | #NAME? | 10.554.249.600 | BLH |
| 1 08 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kelompok pengelola RTH | 0 | klp | 1 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 36.300.000 | 2 | 39.930.000 | 2 | 43.923.000 | #NAME? | 213.153.000 | BLH |
| | | Luas RTH yang terbangun | 25 | % | 5% | | 12% | | 12% | | 20% | | 28% | | 20% | | 97% | | Dinas PU |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|---|---|---------------------|------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 12 | BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 104.051.000 | | 145.000.000 | | 190.000.000 | | 210.000.000 | | 230.000.000 | | 250.000.000 | | 1.129.051.000 | |
| | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga | 100 | Persentase | 100 | 104.051.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 230.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 1.129.051.000 | Disdukcapil |
| | | Rasio bayi berakte kelahiran | 13 | persibu | 100 | 80.820.000 | 100 | 82.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 52.000.000 | 100 | 59.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 383.820.000 | Disdukcapil |
| | | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 90,93 | Persentase | 91 | 122.775.000 | 93 | 235.000.000 | 95 | 246.000.000 | 96 | 250.000.000 | 97 | 262.000.000 | 98 | 270.000.000 | 98 | 1.385.775.000 | Disdukcapil |
| | | Rasio penerbitan akta kematian | 12 | Persentase | 26 | 56.323.000 | 48 | 65.000.000 | 56 | 72.000.000 | 62 | 79.000.000 | 70 | 85.000.000 | 78 | 90.000.000 | 78 | 447.323.000 | Disdukcapil |
| 1 13 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 1.085.835.450 | | 5.469.837.500 | | 6.447.737.500 | | 7.290.337.500 | | 7.598.837.500 | | 7.332.400.000 | | 21.939.985.450 | |
| | Program Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari | Optimalisasi pelaksanaan managemen pemerintahan nagari | | % | 50 | 150.000.000 | 55 | 131.000.000 | 60 | 112.000.000 | 65 | 113.000.000 | 70 | 89.000.000 | 75 | 85.000.000 | 80 | 680.000.000 | Setda-Tapem |
| | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah kader pemberdayan masyarakat yang Dibina | 0 | Orang | 0 | 135.594.950 | 1238 | 1.399.500.000 | 1238 | 1.522.400.000 | 1238 | 1.641.500.000 | 1238 | 1.752.500.000 | 1238 | 1.752.500.000 | 1238 | 8.203.994.950 | BPML2NPPKB |
| | Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan | 0 | Lembaga | 22 | 172.449.500 | 36 | 610.837.500 | 36 | 704.837.500 | 36 | 742.337.500 | 36 | 773.837.500 | 36 | 781.400.000 | 36 | 3.785.699.500 | BPML2NPPKB |
| | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari | 52 | Kelompok | 0 | 203.500.000 | 52 | 203.500.000 | 52 | 203.500.000 | 52 | 203.500.000 | 52 | 203.500.000 | 52 | 203.500.000 | 52 | 1.221.000.000 | BPML2NPPKB, Setda Tapem, 11 Kecamatan |
| | Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan/Nagari | Jumlah nagari dengan pelayanan prima | 1 | Nagari | 1 | 274.291.000 | 5 | 2.745.000.000 | 52 | 3.545.000.000 | 52 | 4.205.000.000 | 52 | 4.395.000.000 | 52 | 4.080.000.000 | 52 | 5.959.291.000 | BPML2NPPKB |
| | Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pamarintahan Desa | Jumlah aparatur pemerintah nagari yang dilatih | 0 | Orang | 0 | 150.000.000 | 156 | 380.000.000 | 210 | 360.000.000 | 210 | 385.000.000 | 210 | 385.000.000 | 210 | 430.000.000 | 210 | 2.090.000.000 | BPML2NPPKB |
| 1 14 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 2.062.815.200 | | 5.014.000.250 | | 5.518.636.300 | | 6.039.500.000 | | 6.635.900.000 | | 6.327.500.000 | | 31.598.351.750 | |
| | Program Keluarga Berencana | Rasio akseptor KB | 65,3 | persen | 66 | 1.844.764.200 | 67 | 4.267.335.850 | 70 | 4.558.639.000 | 72 | 4.812.000.000 | 75 | 5.105.400.000 | 80 | 4.380.500.000 | 80 | 24.968.639.050 | |
| | | Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya | 52503 | Orang | 359 | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | | BPML2NPPKB |
| | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M | 25 | Kelompok | 25 | 48.531.500 | 25 | 53.164.400 | 35 | 63.797.300 | 45 | 68.000.000 | 60 | 72.000.000 | 70 | 80.000.000 | 70 | 385.493.200 | BPML2NPPKB |
| | Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU | Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi | 0 | Kelompok | 0 | - | 11 | 396.000.000 | 33 | 543.200.000 | 66 | 698.500.000 | 99 | 879.500.000 | 150 | 1.165.000.000 | 359 | 3.682.200.000 | BPML2NPPKB |
| | | Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) | 40 | Lembar | 0 | 0 | 5500 | | 6000 | | 6500 | | 7000 | | 7600 | | 7600 | | BPML2NPPKB |
| | | Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi | 7 | Kelompok | 0 | 0 | 10 | | 20 | | 35 | | 45 | | 65 | | 175 | | BPML2NPPKB |
| | | Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina | 165 | Kelompok | 0 | 0 | 165 | | 170 | | 240 | | 276 | | 340 | | 1191 | | BPML2NPPKB |
| | | Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan Keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) | 28 | Kelompok | 0 | 0 | 28 | | 30 | | 35 | | 40 | | 56 | | 189 | | BPML2NPPKB |
| | Program Pelayanan Kontrasepsi | Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi | 0,65 | akseptor | 6292 | 169.519.500 | 6695 | 236.000.000 | 6797 | 260.000.000 | 6881 | 285.000.000 | 7048 | 320.000.000 | 7221 | 355.000.000 | 7271 | 1.625.519.500 | BPML2NPPKB |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|---|---|---------------------|---------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat | Jumlah kelompok yang telah mendapatkan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat tentang program KB / KS | 0 | kelompok | 0 | - | 180 | 61.500.000 | 260 | 93.000.000 | 280 | 176.000.000 | 300 | 259.000.000 | 335 | 347.000.000 | 350 | 936.500.000 | BPML2NPPKB |
| 1 15 | BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 5.377.275.233 | | 8.086.000.000 | | 4.291.000.000 | | 4.741.000.000 | | 2.356.000.000 | | 7.279.870.249 | | 32.131.145.483 | |
| 2 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | jumlah pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan | 6 | | 2 | 795.000.000 | 4 | 2.766.000.000 | | 666.000.000 | | 366.000.000 | | 166.000.000 | | 166.000.000 | 11 | 4.925.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | jumlah kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ | 2 | | 2 | - | 2 | 200.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 800.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 17 | Program peningkatan pelayanan angkutan | jumlah angkutan darat | 6.049 | unit | 7000 | 495.000.000 | 8000 | 620.000.000 | 9000 | 525.000.000 | 10.000 | 575.000.000 | 11.000 | 590.000.000 | 12.000 | 570.000.000 | ##### | 3.375.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah jenis pembangunan sarana da prasarana perhubungan | | jenis | 1 | 1.437.275.233 | 4 | 3.300.000.000 | 4 | 1.800.000.000 | 4 | 2.900.000.000 | 4 | 800.000.000 | 4 | 5.143.870.249 | 21 | 15.381.145.483 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 19 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | jumlah kasus kecelakaan di kabupaten dharmasraya | 53 | kasus | 50 | 1.050.000.000 | 45 | 1.050.000.000 | 40 | 1.050.000.000 | 35 | 550.000.000 | 30 | 550.000.000 | 25 | 1.050.000.000 | 225 | 5.300.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 20 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Kepemilikan KIR | 3738 | unit | 4000 | 1.600.000.000 | 4200 | 150.000.000 | 4400 | 150.000.000 | 4600 | 150.000.000 | 4800 | 150.000.000 | 5000 | 150.000.000 | 5000 | 2.350.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 1 16 | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 171.132.000 | | 1.795.000.000 | | 4.065.000.000 | | 3.235.000.000 | | 3.445.000.000 | | 3.475.000.000 | | 16.186.132.000 | |
| 2 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | meningkatnya kualitas jaringan dan aplikasi pengembangan e - government | | | 0 | - | 3 | 240.000.000 | 55 | 2.890.000.000 | 35 | 1.890.000.000 | 15 | 1.890.000.000 | 15 | 1.890.000.000 | 123 | 8.800.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 17 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Terwujudnya peningkatan kualitas SDM | | | 2 | 36.228.000 | 1006 | 235.000.000 | 1006 | 235.000.000 | 3007 | 255.000.000 | 5007 | 300.000.000 | 5007 | 310.000.000 | 5 | 1.371.228.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| 2 18 | Program kerjasama informasi dan media massa | terwujudnya Master Plan Penataan Menara telekomunikasi (BTS) dan Monitoring Sarana dan Prasarana telekomunikasi | 0 | | 4 | 42.772.000 | 5 | 605.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 85.000.000 | 4 | 95.000.000 | 25 | 977.772.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| | Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayan Informasi | | | 54 | 92.132.000 | 139 | 610.000.000 | 197 | 750.000.000 | 197 | 880.000.000 | 196 | 1.030.000.000 | 979 | 1.030.000.000 | | 4.392.132.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| | Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi | Terwujudnya pengendalian dan pembinaan bidang pos dan telekomunikasi | 0 | | 0 | | 6 | 105.000.000 | 6 | 120.000.000 | 6 | 130.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 150.000.000 | 30 | 645.000.000 | Dinas HubkominfoParbud |
| | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | meningkatkan sinergitas program kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas HubkominfoParbud | |
| 1 17 | BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 1.075.000.000 | | 1.365.000.000 | | 1.568.000.000 | | 1.765.000.000 | | 1.962.000.000 | | 2.114.000.000 | | 9.849.000.000 | |
| | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi aktif | 113 | koperasi | 114 | 245.000.000 | 115 | 375.000.000 | 116 | 458.000.000 | 117 | 535.000.000 | 120 | 602.000.000 | 123 | 664.000.000 | 54,27 | 2.879.000.000 | Dinas Kopperindag |
| | Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM | Jumlah kopeasi berkualitas | 8 | koperasi | 10 | 415.000.000 | 12 | 495.000.000 | 14 | 555.000.000 | 16 | 615.000.000 | 18 | 680.000.000 | 20 | 725.000.000 | 20 | 3.485.000.000 | Dinas Kopperindag |
| | | Jumlah koperasi sehat | 5 | koperasi | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 11 | | Dinas Kopperindag |
| | | Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha | 335 | UMKM | 377 | | 402 | | 427 | | 452 | | 477 | | 502 | | 502 | | |
| | | UMKM mikro naik kelas | 0 | | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | | |
| 1 18 | BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 665.000.000 | | 1.666.500.000 | | 1.336.400.000 | | 1.440.415.000 | | 2.057.356.500 | | 1.533.367.150 | | 8.699.038.650 | |
| | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 137 | miliar rupiah | 150 | 165.000.000 | 150 | 746.500.000 | 150 | 351.650.000 | 150 | 384.615.000 | 150 | 918.576.500 | xxx | 305.734.150 | | 2.872.075.650 | BP2MPBJ |
| | | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 50 | buah | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 90 | | |
| | Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi | Promosi dan kerjasama yang dilaksanakan | 5 | kali | 0 | 500.000.000 | 2 | 920.000.000 | 2 | 984.750.000 | 2 | 1.055.800.000 | 2 | 1.138.780.000 | 2 | 1.227.633.000 | 10 | 5.826.963.000 | BP2MPBJ |
| 1 19 | BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | 3.780.035.600 | | 8.344.200.000 | | 9.455.000.000 | | 7.275.000.000 | | 7.430.000.000 | | 10.035.000.000 | | 46.319.235.600 | |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---------------------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Jumlah cabang olah raga yang dibina | 23 | Cabor | 24 | 2.089.671.800 | 0 | 5.229.200.000 | 24 | 4.990.000.000 | 0 | 5.110.000.000 | 24 | 5.265.000.000 | 0 | 7.570.000.000 | 24 | 30.253.871.800 | Dinas Pendidikan, 11 kecamatan |
| | | Peringkat tingkat Propinsi / Nasional | 8 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | Dinas Pendidikan |
| | Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda | Jumlah Paskibraka Tingkat Provinsi / Nasional | 2 | Orang | 2 | 675.550.000 | 2 | 700.000.000 | 2 | 700.000.000 | 2 | 700.000.000 | 2 | 700.000.000 | 2 | 700.000.000 | 12 | 4.175.550.000 | Dinas Pendidikan |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah Lapangan olahraga | 23 | Unit | 23 | 779.813.800 | 23 | 2.150.000.000 | 24 | 3.500.000.000 | 24 | 1.200.000.000 | 25 | 1.200.000.000 | 25 | 1.500.000.000 | 144 | 10.329.813.800 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Sarana Olahraga | 1 | Unit | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | Dinas Pendidikan |
| | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang dilatih | 65 | Orang | 65 | 145.000.000 | 65 | 145.000.000 | 65 | 145.000.000 | 65 | 145.000.000 | 65 | 145.000.000 | 65 | 145.000.000 | 390 | 870.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Pemuda produktif berprestasi | 0 | Orang | 50 | 90.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 300 | 690.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina | | | | | | | | | | | | | | | | | Setda Kesra |
| | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | Setda Kesra |
| 1 20 | BIDANG STATISTIK | | | | | 75.000.000 | | 78.000.000 | | 81.000.000 | | 84.000.000 | | 87.000.000 | | 90.000.000 | | 495.000.000 | |
| | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Ketersediaan data statistik sektoral | 43 | persen | 57 | 75.000.000 | 63 | 78.000.000 | 72 | 81.000.000 | 81 | 84.000.000 | 88 | 87.000.000 | 91 | 90.000.000 | 95 | 495.000.000 | |
| 1 21 | BIDANG PERSANDIAN | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | Program persandian daerah | Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. | 0 | kegiatan | 0 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 6 | 300.000.000 | Kominfo |
| | | Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota. | 0 | persen | 0 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | | |
| 1 22 | BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 150.000.000 | | 2.230.000.000 | | 2.840.000.000 | | 1.960.000.000 | | 3.070.000.000 | | 2.080.000.000 | | 12.330.000.000 | |
| 2 15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | jumlah event pengembangan budaya nilai lokal | 2 | event | | | 9 | 300.000.000 | 10 | 410.000.000 | 13 | 330.000.000 | 11 | 340.000.000 | 14 | 350.000.000 | 57 | 1.730.000.000 | Dinas Hubkominfoparbud |
| 2 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 3 | jenis | | - | 2 | 500.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 1.100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 14 | 2.700.000.000 | Dinas Hubkominfoparbud |
| 2 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah sanggar seni yang dibina | 35 | sanggar | 40 | 50.000.000 | 45 | 900.000.000 | 50 | 1.100.000.000 | 55 | 1.100.000.000 | 60 | 1.200.000.000 | 65 | 1.100.000.000 | 315 | 5.450.000.000 | Dinas Hubkominfoparbud |
| 2 18 | Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | kerjasama dengan kelembagaan budaya | | buah | | | 4 | 280.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 280.000.000 | 20 | 1.100.000.000 | Dinas Hubkominfoparbud |
| | Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya | Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan | 0 | Lembaga (LKAAM, KAN,AB S-SBK, Hukum Adat) | 1 Lembaga (LKAAM) | 100.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 1.350.000.000 | BPML2NPPKB |
| 1 23 | BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 148.469.000 | | 730.000.000 | | 1.040.000.000 | | 1.060.000.000 | | 1.120.000.000 | | 1.155.000.000 | | 5.253.469.000 | |
| | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Binaan | 27.788 | orang | 14.000 | 148.469.000 | 14.000 | 730.000.000 | 50.000 | 1.040.000.000 | 60.000 | 1.060.000.000 | 70.000 | 1.120.000.000 | 80.000 | 1.155.000.000 | | 5.253.469.000 | KPAD |
| | | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 24 | BIDANG KEARSIPAN. | | | | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 75.000.000 | | 435.000.000 | |
| | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | Jumlah JRA substantif yang tersusun | - | urusan | - | 40.000.000 | 3 | 50.000.000 | 15 | 90.000.000 | 15 | 90.000.000 | 15 | 90.000.000 | 10 | 75.000.000 | | 435.000.000 | KPAD |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | 73.991.865.871 | | 78.502.439.063 | | 126.020.839.600 | | 233.233.499.112 | | 183.840.104.574 | | 236.557.270.384 | | 773.028.671.253 | |
| 2 1 | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 3.215.069.750 | | 3.230.795.000 | | 3.720.000.000 | | 4.174.000.000 | | 4.531.000.000 | | 4.979.000.000 | | 23.849.864.750 | |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---|-----------------|-------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi Perikanan | 19.909 | Ton | 20.109 | 2.455.795.000 | 20.209 | 2.525.795.000 | 20.409 | 2.930.000.000 | 20.609 | 3.384.000.000 | 20.809 | 3.711.000.000 | 20.809 | 4.209.000.000 | ##### | 19.215.590.000 | Dinas Nakkam |
| | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan | Jml kelompok binaan yg berbadan hukum | 3 | klpk | 0 | 616.000.000 | 10 | 430.000.000 | 40 | 480.000.000 | 60 | 480.000.000 | 60 | 480.000.000 | 60 | 480.000.000 | 231 | 2.966.000.000 | Dinas Nakkam |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya perairan | Produksi Perikanan Tangkap | 235,4 | Ton | 231 | 56.274.750 | 226 | 65.000.000 | 220 | 70.000.000 | 210 | 70.000.000 | 199 | 70.000.000 | 197 | 70.000.000 | 197 | 401.274.750 | Dinas Nakkam |
| | Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Produksi olahan perikanan | 2.112 | Kg | 2.500 | 87.000.000 | 3.000 | 210.000.000 | 3.000 | 240.000.000 | 3.000 | 240.000.000 | 3.500 | 270.000.000 | 3.500 | 220.000.000 | 3.500 | 1.267.000.000 | Dinas Nakkam |
| 2 2 | BIDANG PARIWISATA | | | | | 645.000.000 | | 2.450.000.000 | | 3.500.000.000 | | 4.080.000.000 | | 2.780.000.000 | | 2.580.000.000 | | 16.035.000.000 | |
| 15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi wisata | 23 | lokasi | 23 | 495.000.000 | 25 | 1.800.000.000 | 26 | 2.000.000.000 | 26 | 2.100.000.000 | 26 | 2.150.000.000 | 26 | 2.150.000.000 | 152 | 10.695.000.000 | Dinas Hubkominforparbud |
| 16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah kawasan wisata yang dikembangkan | 0 | kawasa n | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 1.430.000.000 | 3 | 130.000.000 | 3 | 130.000.000 | 16 | 2.890.000.000 | Dinas Hubkominforparbud |
| 17 | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah SDM pariwisata yang dibina | 0 | MOU | - | - | 402 | 500.000.000 | 404 | 600.000.000 | 403 | 550.000.000 | 402 | 500.000.000 | 300 | 300.000.000 | 1911 | 2.450.000.000 | Dinas Hubkominforparbud |
| 2 3 | BIDANG PERTANIAN | | | | | 39.627.448.650 | | 38.293.843.670 | | 41.226.039.200 | | 44.034.498.705 | | 47.659.104.160 | | 59.733.970.150 | | 236.412.904.535 | |
| | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Meningkatnya SDM dan Kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (penyuluh Pertanian) | 124 | Org | 258 | 320.000.000 | 462 | 631.000.000 | 317 | 398.000.000 | 317 | 408.000.000 | 322 | 425.000.000 | 322 | 425.000.000 | 1.998 | 2.607.000.000 | BKP3 |
| | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya ketrampilan petugas dan petani dalam penerapan teknologi | 0 | org | 40 | 42.000.000 | 0 | - | 40 | 50.000.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 60.000.000 | 200 | 262.000.000 | BKP3 |
| | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan di lapangan | Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat lapangan | 287 | | 176 | 2.496.000.000 | 241 | 6.895.000.000 | 203 | 6.455.000.000 | 146 | 5.162.000.000 | 217 | 6.020.000.000 | 158 | 6.178.000.000 | 1.141 | 33.206.000.000 | BKP3 |
| | Program peningkatan kelembagaan petani | Jumlah kelompok tani tarlatih | 12 | kelomp ok | 4 | 55.000.000 | 24 | 165.000.000 | 26 | 180.000.000 | 36 | 210.000.000 | 36 | 230.000.000 | | 300.000.000 | 122 | 1.140.000.000 | Dinas Pertanian |
| | Sub Sektor tanaman pangan dan hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan | Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian pada kawasan pertanian tanaman pangan | 11 | Kecam atan | 11 | 15.210.000.000 | 11 | 10.470.000.000 | 11 | 11.290.000.000 | 11 | 13.575.000.000 | 11 | 14.325.000.000 | | 22.057.000.000 | 11 | 64.870.000.000 | Dinas Pertanian |
| | Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura | Jumlah produksi beras teregister dan terpacking yang dipasarkan | 0 | ton | 3 | 60.000.000 | 10 | 700.000.000 | 10 | 700.000.000 | 10 | 850.000.000 | 10 | 870.000.000 | | 1.475.000.000 | 50 | 3.180.000.000 | Dinas Pertanian |
| | Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura | Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian) | padi : 70.169 Ton, jagung = 0 Ton , luas areal hortikultura = 0 | Ton dan hektar | padi : 66.555 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 41 Ha | 5.882.000.000 | padi : 69.883 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | 7.680.000.000 | padi : 73.377 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | 6.865.000.000 | padi : 77.046 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | 7.595.000.000 | padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | 8.280.000.000 | padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha | 10.320.000.000 | padi : 367.760 ton, jagung : 30 ton, luas hortikultura : 209 Ha | 36.302.000.000 | Dinas Pertanian |
| | Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian | Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang dipamerkan | 5 | komodit i | 5 | 80.000.000 | 6 | 280.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 350.000.000 | 6 | 160.000.000 | | 310.000.000 | 6 | 1.010.000.000 | Dinas Pertanian |
| | Sub Sektor Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------|------------|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode PRIMA | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | populasi ternak sapi | 40.785 | Ekor | 41.601 | 595.654.000 | 42.433 | 1.395.654.000 | 43.281 | 4.050.000.000 | 44.147 | 3.950.000.000 | 45.030 | 4.200.000.000 | 45.931 | 4.500.000.000 | ##### | 18.691.308.000 | Dinas Nakkan |
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Kasus penyakit ternak yang tertangani | 950/4.000 | kasus/ekor | 900/3.892 | 580.850.150 | 855/3.697 | 626.050.150 | 837/3.623 | 1.075.899.700 | 728/3.514 | 1.257.259.205 | 706/3.409 | 1.001.454.660 | 685/3.307 | 1.156.569.650 | 685/3.307 | 5.698.083.515 | Dinas Nakkan |
| | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) | cakupan Pangan Asal Hewan (PAH) higienis yang diawasi | 5 | jenis | 3 | 166.139.500 | 6 | 206.139.500 | 6 | 231.139.500 | 6 | 251.139.500 | 6 | 275.139.500 | 6 | 327.139.500 | 6 | 1.456.837.000 | Dinas Nakkan |
| | Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan | Produksi olahan Peternakan | 112.360 | Ton | 120.000 | 150.000.000 | 150.000 | 565.000.000 | 175.000 | 410.000.000 | 175.000 | 205.000.000 | 180.000 | 205.000.000 | 180.000 | 205.000.000 | 6 | 1.740.000.000 | Dinas Nakkan |
| | Program Penigkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan distribusi hasil peternakan dan Perikanan | 8 | Unit | 1 | 340.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 240.000.000 | 0 | 120.000.000 | 1 | 420.000.000 | 0 | 120.000.000 | 12 | 1.490.000.000 | Dinas Nakkan |
| | Program Peningkatan kemampuan Kelompok Peternakan dan Pokdakan | Jml kelompok binaan yg berbadan hukum | 3 | klpk | 0 | - | 10 | 220.000.020 | 20 | 110.000.000 | 30 | 117.000.000 | 30 | 260.000.000 | 30 | 280.000.000 | 128 | 987.000.020 | Dinas Nakkan |
| | Sub sektor perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Hutbun |
| | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan | Luas lahan yang dikendalikan hama penyakitnya (Ha) | 30 | ha | 50 | 100.000.000 | 50 | 400.000.000 | 50 | 440.000.000 | 50 | 484.000.000 | 50 | 532.400.000 | 50 | 585.640.000 | #NAME? | 2.542.040.000 | Dinas Hutbun |
| | Program peningkatan produksi Perkebunan | Jumlah bantuan bibit unggul | 37500 | batang | 32.150 | 2.022.821.000 | 30.000 | 2.810.000.000 | 30.000 | 3.091.000.000 | 30000 | 3.400.100.000 | 30000 | 3.740.110.000 | 30000 | 4.114.121.000 | #NAME? | 19.178.152.000 | Dinas Hutbun |
| | Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan | Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan (km) | 75 | km | 100 | 11.526.984.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 5.500.000.000 | 50 | 6.050.000.000 | 50 | 6.655.000.000 | 50 | 7.320.500.000 | #NAME? | 42.052.484.000 | Dinas Hutbun |
| 2 4 | BIDANG KEHUTANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 5 | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | 7.610.347.350 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemantauan dan Monitoring Bidang Pertambangan | Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi pemantauan dan monitoring | | IUP | 15 IUP | 57.584.100 | 17 | 62.000.000 | 18 | 65.000.000 | 20 | 68.000.000 | 22 | 70.000.000 | 23 | 75.000.000 | 100 | 397.584.100 | Dinas ESDM |
| | Program Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan jaringan listrik pada daerah -daerah terpencil. | | | - | 1.305.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.305.000.000 | Dinas ESDM |
| | Program Fasilitas Penerangan Jalan Umum | Terlaksananya Pengadan dan pemasangan PJU stang dan | | unit | | 6.134.022.350 | 2 | 700.000.000 | 4 | 1.400.000.000 | 6 | 1.800.000.000 | 8 | 2.400.000.000 | 10 | 3.000.000.000 | 30 | 15.434.022.350 | Dinas ESDM |
| | Program Pemantauan dan Monitoring Pendistribusian BBM dan Gas | Tersedianya data pendistribusian Migas di Dharmasraya | | | | 60.079.900 | 75 | 63.000.000 | 75 | 65.000.000 | 75 | 67.000.000 | 75 | 70.000.000 | 75 | 75.000.000 | 75 | 400.079.900 | Dinas ESDM |
| | Program Pemantauan dan Monitoring pengelolaan air tanah dan bencana alam geologi | Meningkatnya mutu pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha air tanah komersial serta bertambahnya | | | | 53.661.000 | 15 | 107.000.000 | 15 | 113.000.000 | 15 | 122.000.000 | 15 | 130.000.000 | 15 | 140.000.000 | 293 | 665.661.000 | Dinas ESDM |
| 2 6 | BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 21.144.000.121 | | 30.312.800.393 | | 74.714.800.400 | | 170.165.000.407 | | 125.670.000.414 | | 161.319.300.234 | | 467.175.901.968 | |
| | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | jumlahl alat UTTP yang ditera ulang | 2000 | UTTP | 2500 | 450.000.000 | 2510 | 450.000.000 | 2515 | 500.000.000 | 2520 | 500.000.000 | 2525 | 500.000.000 | 2530 | 550.000.000 | 2530 | 2.950.000.000 | Dinas Kopperindag |
| | | Jumlah kasus barang tidak layak edar/ tidak layak konsumsi | | kasus | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | Persentase distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK | 100 | persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana pasar | Persentase pasar dalam kondisi baik | 19,44 | persen | 22,22 | 20.694.000.121 | 25 | 29.862.800.393 | 27,78 | 74.214.800.400 | 30,56 | 169.665.000.407 | 33,33 | 125.170.000.414 | 36,11 | 160.769.300.234 | 36,11 | 464.225.901.968 | Dinas Kopperindag |
| 2 7 | BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 1.475.000.000 | | 3.840.000.000 | | 2.385.000.000 | | 10.205.000.000 | | 2.525.000.000 | | 7.170.000.000 | | 26.405.000.000 | |
| | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | jumlah IKM yang dikembangkan | 85 | IKM | 125 | 1.395.000.000 | 165 | 3.610.000.000 | 205 | 1.885.000.000 | 245 | 2.125.000.000 | 285 | 2.445.000.000 | 325 | 6.850.000.000 | 325 | 17.115.000.000 | Dinas Kopperindag |
| | Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro | Jumlah industri produk olahan hasil pertanian/ perkebunan | 10 | industri | 20 | 80.000.000 | 20 | 155.000.000 | 20 | 250.000.000 | 20 | 4.080.000.000 | 20 | 80.000.000 | 20 | 320.000.000 | 120 | 4.965.000.000 | Dinas Kopperindag |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|------|---|--|---------------------|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | Jumlah IKM dengan keragaman produk olahan industri hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan | 10 | IKM | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 120 | | Dinas Kopperindag |
| 2 8 | BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | 275.000.000 | | 375.000.000 | | 475.000.000 | | 575.000.000 | | 675.000.000 | | 775.000.000 | | 3.150.000.000 | |
| | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan | 1 | UPT | 1 | 275.000.000 | 2 | 375.000.000 | 2 | 475.000.000 | 2 | 575.000.000 | 2 | 675.000.000 | 2 | 775.000.000 | 2 | 2.575.000.000 | Dinas Sosnakertrans |
| 3 | URUSAN PENUNJANG | | | | | 32.908.186.300 | | 41.317.840.225 | | 24.756.749.425 | | 29.688.829.057 | | 30.785.418.606 | | 54.426.040.493 | | 161.585.317.287 | |
| 3 1 | BIDANG PERENCANAAN | | | | | 6.673.841.000 | | 1.855.213.150 | | 2.103.273.808 | | 5.254.437.498 | | 5.850.759.373 | | 7.806.613.341 | | 22.444.138.170 | |
| | Program Pengembangan data/informasi | Cakupan data pembangunan tersedia | 43 | persen | 60 | 392.058.000 | 65 | 211.000.000 | 75 | 215.000.000 | 80 | 220.000.000 | 83 | 230.000.000 | 85 | 235.000.000 | | 1.203.058.000 | Bappeda, Setda Ekbang |
| | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 90 | dokumen | 95 | 2.608.621.000 | 97 | 954.213.150 | 100 | 1.196.273.808 | 100 | 2.839.437.498 | 100 | 3.220.759.373 | 100 | 4.986.297.341 | | 9.005.602.170 | Bappeda, Setda-organisasi/tapem |
| | Program perencanaan pembangunan ekonomi | cakupan kebijakan bidang ekonomi | 60 | persen | 65 | 1.173.162.000 | 70 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | 85 | 600.000.000 | 85 | 650.000.000 | 85 | 650.766.000 | | 3.373.928.000 | Bappeda |
| | Program perencanaan sosial budaya | cakupan kebijakan bidang Sosial Budaya | 65 | persen | 70 | 1.250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 85 | 700.000.000 | 90 | 750.000.000 | 90 | 864.000.000 | | 4.064.000.000 | Bappeda |
| | Program Perencanaan Fisik dan prasana | cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana | 80 | persen | 85 | 1.250.000.000 | 85 | 250.000.000 | 90 | 250.000.000 | 90 | 850.000.000 | 90 | 950.000.000 | 95 | 1.070.550.000 | | 4.620.550.000 | Bappeda, Setda-Ekbang |
| | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | - | | 40.000.000 | | 42.000.000 | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | - | | 177.000.000 | Setda ekbang |
| 3 2 | BIDANG KEUANGAN | | | | | 4.601.171.000 | | 5.532.888.000 | | 4.245.017.000 | | 4.687.207.000 | | 4.864.229.000 | | 6.048.066.000 | | 29.978.578.000 | |
| | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | jumlah dokumen pengelola keuangan setiap tahun | 496 | Dok | | 2.890.283.000 | 496 | 3.346.888.000 | 496 | 3.471.167.000 | 496 | 3.851.449.000 | 496 | 3.961.613.000 | 496 | 5.073.241.000 | | 22.594.641.000 | DPPKD/ Setda _ase |
| | | persentase pelaks,pengelolaan keuangan daerah | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | program peningkatan dan pengembangan PAD | persentase capaian PAD | 80 | | | 1.710.888.000 | | 2.186.000.000 | | 773.850.000 | | 835.758.000 | | 902.616.000 | | 974.825.000 | | 7.383.937.000 | |
| 3 3 | BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 1.395.346.300 | | 4.175.000.000 | | 4.138.000.000 | | 3.570.000.000 | | 3.560.000.000 | | 3.188.000.000 | | 20.026.346.300 | |
| | Program Pendidikan Kedinasan | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan | 369 | orang | 31 | 328.943.000 | 110 | 2.075.000.000 | 110 | 2.075.000.000 | 67 | 1.475.000.000 | 67 | 1.475.000.000 | 60 | 1.075.000.000 | 639 | 8.503.943.000 | BKD |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah peningkatan kapasitas ASN | 1070 | orang | 80 | 54.964.000 | 250 | 870.000.000 | 245 | 840.000.000 | 245 | 840.000.000 | 245 | 840.000.000 | 260 | 855.000.000 | 2395 | 4.299.964.000 | BKD |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Jumlah ASN yang dibina dan dikembangkan serta terdata | 11794 | orang | 1539 | 1.011.439.300 | 1832 | 1.230.000.000 | 1675 | 1.223.000.000 | 1920 | 1.255.000.000 | 1750 | 1.245.000.000 | 1731 | 1.258.000.000 | 19584 | 7.222.439.300 | BKD |
| 3 4 | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 300.000.000 | |
| | Program peningkatan penelitian dan pengembangan | peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK | 0 | persen | 0 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | ##### | 50.000.000 | ##### | 50.000.000 | 5E+07 | 300.000.000 | Bappeda |
| 3 5 | FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | | 20.187.828.000 | | 29.704.739.075 | | 14.220.458.618 | | 16.127.184.559 | | 16.460.430.233 | | 37.333.361.152 | | 88.836.254.818 | |
| | - BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, DAN PERANGKAT DAERAH | | | | | 20.187.828.000 | | 29.704.739.075 | | 14.220.458.618 | | 16.127.184.559 | | 16.460.430.233 | | 37.333.361.152 | | 88.836.254.818 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 90 | persen | 90 | 7.281.087.000 | 90 | 7.776.930.700 | 90 | 6.884.205.350 | 95 | 8.874.572.427 | 95 | 8.818.173.909 | 95 | 9.193.526.616 | 95 | 4438954182 | 11 kecamatan |
| | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan | | persen | | 274.923.000 | | 610.000.000 | | 1.380.000.000 | | 825.000.000 | | 890.000.000 | | 1.080.000.000 | | 5.059.923.000 | Setda Hukum&ORG |
| | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | (koordinasi dengan inspektorat) | | | | 33.205.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 600.000.000 | | - | Setda Hukum&ORG |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | 180.000.000 | | 210 | | 225 | | 240 | | 365 | | 215 | | 180.001.255 | Setda Hukum&ORG |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | 150.000.000 | | 165 | | 175 | | 185 | | 230 | | - | | 150.000.755 | Setda Hukum&ORG |
| | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | tertatanya administrasi wilayah di Kab. Dharmasraya | | | | 1.416.829.000 | | 681.829.000 | | 551.829.000 | | 576.829.000 | | 775.000.000 | | 740.000.000 | | 4.742.316.000 | Setda-Tapem |

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program) | Kondisi Awal (2015) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|--|---------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan | Meningkatnya pelayanan di Kecamatan | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 240.000.000 | Setda-Tapem |
| | Program Pengembangan manajemen Pelayanan Publik | | | | | 90.061.000 | | 90.061.000 | | 90.061.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 570.183.000 | Setda-Tapem |
| | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | Meningkatnya koordinasi Pemda dengan berbagai unsur | | | | 145.000.000 | | 370.000.000 | | 376.000.000 | | 382.000.000 | | 390.000.000 | | 400.000.000 | | 2.063.000.000 | Setda-Tapem |
| | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 921.583.000 | | 1.222.922.000 | | 1.181.894.000 | | 1.363.117.000 | | 1.226.646.000 | | 1.469.045.000 | | 7.385.207.000 | Setda-Aset |
| | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Peningkatan kapasitas kompetensi Anggota DPRD | | Perda | 15 | 6.946.830.000 | 11 | 15.406.119.500 | 9 | - | 9 | - | 10 | - | 54 | 22.352.949.500 | | 44.705.899.000 | |
| | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten | 92,86 | % | 94 | 137.635.000 | 95 | 158.520.000 | 96 | 166.446.000 | 97 | 174.768.300 | 98 | 183.506.715 | 98 | - | 98 | 820.876.015 | Inspektorat |
| | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten | 85 | % | 85 | 1.066.189.000 | 85 | 1.175.924.000 | 90 | 1.234.720.200 | 90 | 1.296.456.210 | 90 | 1.361.279.021 | 90 | - | 90 | 6.134.568.431 | Inspektorat |
| | Program Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH | Prosentase akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah | 0 | % | 50 | 268.313.000 | 50 | 715.288.650 | 50 | 751.053.083 | 60 | 788.605.737 | 60 | 828.036.023 | 70 | - | | 3.351.296.493 | Inspektorat |
| | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Prosentase peningkatan kemampuan SDM | 82,85 | persen | 83 | 475.495.000 | 83 | 475.495.000 | 85 | 499.269.750 | 85 | 524.233.238 | 85 | 550.444.899 | 85 | - | 85 | 2.524.937.887 | Inspektorat |
| | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Prosentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah | 100 | persen | 100 | 31.678.000 | 100 | 33.178.000 | 100 | 35.661.900 | 100 | 38.352.495 | 100 | 41.268.370 | 100 | 24.157.650 | 100 | 204.296.415 | Inspektorat |
| | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik | 100 | persen | 100 | 729.000.000 | 100 | 908.470.850 | 100 | 989.317.935 | 100 | 1.098.249.729 | 100 | 1.206.074.701 | 100 | 1.333.682.171 | 100 | 6.264.795.386 | BP2MPBJ |
| TOTAL | | | | | | 465.312.764.090 | 625.442.135.698 | 683.758.750.757 | 731.270.576.995 | 898.539.019.687 | 1.111.807.260.582 | 3.827.579.234.520 | | | | | | | |

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari pelaksanaan kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) mencakup akumulasi keluaran dan berbagai efek pembangunan.

Pengukuran kinerja pembangunan mengukur kinerja daerah secara berkelanjutan sebagai umpan balik untuk mencapai target kinerja di masa mendatang. Dengan adanya informasi terukur pencapaian kinerja maka pemerintah daerah dapat mengukur kinerjanya secara obyektif dalam periode waktu tertentu sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator hasil program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

9.1. PENENTUAN INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target dihasilkan dari pencapaian kegiatan atau program tertentu dengan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan terdapat juga yang merupakan pencapaian akumulasi lintas perangkat daerah. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan dari indikator kinerja perangkat daerah. Akan tetapi meskipun menjadi acuan oleh perangkat daerah, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan dari perangkat daerah.

Indikator kinerja dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator tahun sebelumnya. Pencapaian pembangunan yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, DPRD dan masyarakat umumnya yang tentunya tidak akan terlaksana secara baik tanpa adanya dukungan kemampuan perangkat daerah, partisipasi masyarakat serta potensi pembiayaan pembangunan yang dimiliki oleh daerah.

9.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan

dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2016 sampai 2021. Sebagai referensi atau analisis dapat digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai pembandingan.

Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART). Spesifik dapat diterjemahkan sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah. Relevan (*relevant*) karena telah menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*time bond*) kedalam batasan periode tahun 2016 - 2021 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continously improve*) karena merupakan akumulasi pencapaian target bertahap setiap tahunnya selama lima tahun RPJMD.

Berikut ini ditampilkan matriks penetapan indikator kinerja daerah terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

| Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Proyeksi | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| | IPM | 70,23 | 70,42 | 70,66 | 70,71 | 70,88 | 71,20 |
| | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Nilai LAKIP | CC | B | B | B | BB | BB |
| A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1. | Indikator Ekonomi Makro (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian) | | | | | | |
| 1.1. | Pertumbuhan PDRB | 6,00 | 6,15 | 6,27 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| 1.2. | Laju inflasi provinsi | 6,87 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 4,92 |
| 1.3. | PDRB per kapita | 38.773.765 | 41.909.780 | 45.225.388 | 48.757.581 | 52.499.873 | 56.494.730 |
| 1.4. | Indeks Gini * | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan) | 5,66 | 5,03 | 4,43 | 3,86 | 3,32 | 2,81 |
| | Laju pertumbuhan penduduk | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | |
| 1.2. | Angka rata-rata lama sekolah | 8,06 | 8,10 | 8,13 | 8,18 | 8,26 | 8,35 |
| 1.3. | Angka partisipasi kasar | - | - | - | - | - | - |
| | - APK SD/MI/Paket A | 110,19 | 110,12 | 110,07 | 110,03 | 109,98 | 109,92 |
| | - APK SMP/MTs/Paket B | 77,50 | 78,60 | 81,20 | 82,40 | 83,00 | 84,20 |
| 1.5. | Angka Partisipasi Murni | - | - | - | - | - | - |
| | - APM SD/MI | 90,05 | 93,21 | 95,34 | 97,65 | 98,76 | 99,74 |
| | - APM SMP/MTs | 61,32 | 62,87 | 64,78 | 75,89 | 80,53 | 83,65 |
| | | | | | | | |
| 2. | Kesehatan | | | | | | |
| 2.1. | Angka kematian bayi (AKB) | 18,75 | 17,24 | 15,78 | 14,29 | 12,94 | 11,63 |
| | Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) | 330 | 325 | 310 | 305 | 300 | 280 |
| | Akaba | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 2.2. | Angka usia harapan hidup | 69,80 | 69,82 | 69,84 | 69,86 | 69,88 | 69,90 |
| 2.3. | Persentase balita gizi buruk | 0,44 | 0,41 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,15 |
| 4. | Ketenagakerjaan | | | | | | |
| 4.1. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| 1. | Kebudayaan | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | |
| B. ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 1 | Urusan pemerintahan wajib | | | | | | |
| 1.A | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | | | | | | |
| 1 | Bidang pendidikan | | | | | | |
| | - Rasio guru/murid SD/MI* | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 |
| | - Rasio guru/murid SMP/MTs* | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 |
| | - Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)* | 707 | 684 | | | | |
| | - Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)* | 1.508 | 1.542 | | | | |
| 1.3. | Fasilitas Pendidikan: | - | - | - | - | - | - |
| | cakupan akses/jangkauan SMP sesuai standar | | | | | | |
| 1.3.1. | Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 74,21 | 76,01 | 77,81 | 79,61 | 81,42 | 85,02 |
| 1.3.2. | Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | 80,40 | 82,01 | 83,61 | 85,21 | 86,81 | 90,01 |
| 1.4. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): | | | | | | |
| 1.4.1. | APK PAUD | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 73 |
| 1.5. | Angka Putus Sekolah: | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Jumlah siswa Putus Sekolah (APS) SD/MI* | | | | | | |
| 1.5.2. | Jumlah siswa Sekolah (APS) SMP/MTs* | | | | | | |
| 1.6. | AngkaKelulusan: | | | | | | |
| 1.6.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.6. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV* | | | | | | |
| 2 | Bidang kesehatan | | | | | | |
| 2.1. | Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) | 9,88 | 9,76 | 9,70 | 9,70 | 9,65 | 9,62 |
| 2.2. | Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,348 | 0,245 | 0,246 | 0,243 | 0,240 | 0,236 |
| | cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| | unit RSUD terakreditasi versi 2012 | | | | | 1 | 1 |
| | PSC yang reprresentatif | | | | | 1 | 1 |
| | Jumlah Puskesmas rawat inap | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4. | Rasio dokter per satuan penduduk | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| 2.5. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 2,63 | 2,55 | 2,61 | 2,65 | 2,70 | 2,66 |
| 2.6. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 |
| 2.7. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| 2.8. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 2.9. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Prevalensi HIV (persen)* | - | - | - | - | - | - |
| | Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)* | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 116,31 | 105 | 120 | 119 | 128 | 140 |
| 3 | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | | | | | | |
| | - Pekerjaan umum | | | | | | |
| | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | 70,09 | 73,48 | 76,87 | 80,27 | 83,66 | 87,05 |
| | Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan | 750 | 850 | 700 | 825 | 650 | 700 |
| | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 1,97 | 2,71 | 3,73 | 5,13 | 7,05 | 9,69 |
| 4.1. | Rumah tangga pengguna air bersih | - | - | - | - | - | - |
| | rasio penduduk perkotaann terlayani layanan persampahan* | | | | | | |
| | rasio rumah tangga bersanitasi baik* | | | | | | |
| | - Penataan ruang | | | | | | |
| | Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman | | | | | | |
| | Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu* | | | | | | |
| 5 | Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Proyeksi | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| | Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 6 | Bidang sosial. | | | | | | |
| | Jumlah panti asuhan yang dibina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu | 9.539 | 9.539 | 9.539 | 9.539 | 9.539 | 9.539 |
| 1.B | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. | | | | | | |
| 7 | Bidang tenaga kerja | | | | | | |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 67 | 67 | 67 | 68 | 68,29 | 68,29 |
| | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 46 | 50 | 54 | 62 | 68 | 70 |
| 8 | Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | | | |
| | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 67,94 | 68,23 | 68,51 | 68,80 | 69,09 | 69,37 |
| | Rasio KDRT | menurun | menurun | menurun | menurun | menurun | menurun |
| | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | terselesaikan | terselesaikan | terselesaikan | terselesaikan | terselesaikan | terselesaikan |
| 9 | Bidang pangan | | | | | | |
| | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita. | | | | | | |
| | Energi | 5,51 | 5,66 | 5,81 | 5,96 | 6,11 | 6,25 |
| | Protein | 136,15 | 139,80 | 143,45 | 149,70 | 150,75 | 154,40 |
| | Penguatan Cadangan Pangan. | - | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. | 75 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. | 75 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| | Skor Pola Pangan Harapan (PPH). | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 83,00 | 83,00 |
| | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| | Penanganan Daerah Rawan Pangan. | | | | | | |
| | Rawan Ketersediaan Pangan | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | Rawan Rumah Tangga Miskin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | Rawan gizi kurang | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Konsumsi beras per tahun* | | | | | | |
| 10 | Bidang pertanahan | | | | | | |
| 11 | Bidang lingkungan hidup | | | | | | |
| | Pencemaran status mutu air | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Penegakan hukum lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | | | | | |
| | Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rasio penduduk berakte kelahiran | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rasio penerbitan akta kematian | 26 | 48 | 56 | 62 | 70 | 78 |
| 15 | Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | | | | | | |
| | LPM Berprestasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | PKK aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Posyandu aktif | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 |
| | Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Badan Usaha Nagari (BUMNag) | | 4 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| | Jumlah Nagari memiliki database berbasis IT | | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Jumlah aparatur nagari pengelola IT | | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 16 | Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | | | | | |
| | Rasio akseptor KB | 66,00 | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| 16 | Bidang perhubungan | | | | | | |
| | Jumlah Terminal Bis | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Kepemilikan KIR | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | Pemasangan Rambu-rambu | 100 | 81 | 78 | 75 | 73 | 71 |
| | jumlah kasus kecelakaan | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 17 | Bidang komunikasi dan informatika | | | | | | |
| | JumlahSKPD yang memiliki website/ e-government yang terintegrasi | 4 | seluruh SKPD | seluruh SKPD | seluruh SKPD | seluruh SKPD | seluruh SKPD |
| 18 | Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah | | | | | | |
| | Jumlah koperasi aktif | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 123 |
| | UMKM terlatih* | | | | | | |
| 19 | Bidang penanaman modal | | | | | | |
| | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)* | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah izin yang dikeluarkan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | investasi dan peyertaan modal masyarakat/pemda dan swasta | | ada | ada | ada | ada | ada |
| 20 | Bidang kepemudaan dan olah raga | | | | | | |
| | Jumlah cabang olah raga yang dibina | - | 24 | - | 24 | - | 24 |
| | Jumlah Pemuda yang dilatih | | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 21 | Bidang statistik | | | | | | |
| | Ketersediaan data statistik sektoral* | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 22 | Bidang persandian | | | | | | |
| 23 | Bidang kebudayaan | | | | | | |
| | Terbentuknya tim ahli cagar budaya; | 1 tim | | | | | |
| | Inventarisasi warisan budaya; | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| | Kegiatan penelitian warisan budaya. | | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg |
| | Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| | Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu; | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| | Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| 24 | Bidang perpustakaan | | | | | | |
| | Jumlah perpustakaan daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Perpustakaan Binaan | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Jumlah pengunjung perpustakaan | - | - | - | - | - | - |
| | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 10.175 | 10.275 | 10.375 | 10.475 | 10.575 | 10.675 |
| 25 | Bidang kearsipan. | | | | | | |
| 2 | Urusan pemerintahan pilihan | | | | | | |
| 1 | Bidang kelautan dan perikanan | | | | | | |
| | Produksi perikanan | 20.109 | 20.209 | 20.409 | 20.609 | 20.809 | 20.809 |
| | Konsumsi ikan* | | | | | | |
| 2 | Bidang pariwisata | | | | | | |
| | Jumlah Destinasi wisata | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | jumlah kawasan wisata yang dikembangkan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah event wisata yang dilaksanakan | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bidang pertanian | | | | | | |
| | Kelembagaan/ ekonomi pertanian | | | | | | |
| | NTP | | | | | | |
| | kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 28,98 | 28,58 | 28,22 | 27,81 | 27,42 | 27,04 |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Proyeksi | | | | | |
|----|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Jumlah kelompok tani teregister* | | | | | | |
| | Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) | | | | | | |
| | - Pertanian | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| | - Kehutanan | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| | - Perikanan | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| | Tanaman Pangan dan hortikultura | | | | | | |
| | produksi padi | 66.555 | 69.883 | 73.377 | 77.046 | 80.898 | 84.000 |
| | produktivitas padi | 4,75 | 4,82 | 4,87 | 4,93 | 4,97 | 5,10 |
| | produksi jagung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | luas sawah* | | | | | | |
| | produksi duku* | | | | | | |
| | produksi salak* | | | | | | |
| | luas areal hortikultura | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Perkebunan | | | | | | |
| | produksi karet* | | | | | | |
| | produktivitas karet* | 5.04 | 5.29 | 5.55 | 5.83 | 6.12 | 6.43 |
| | produksi sawit* | | | | | | |
| | produktivitas sawit* | 14.92 | 15.67 | 16.45 | 17.27 | 18.33 | 19.23 |
| | produksi coklat* | | | | | | |
| | produktivitas coklat* | 0.84 | 0.842 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| | Peternakan | | | | | | |
| | populasi sapi | 41.601 | 42.433 | 43.281 | 44.147 | 45.030 | 45.931 |
| | populasi ayam potong* | | | | | | |
| 4 | Bidang kehutanan | | | | | | |
| 5 | Bidang energi dan sumber daya mineral | | | | | | |
| 6 | Bidang perdagangan | | | | | | |
| | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 12,83 | 12,86 | 12,88 | 12,92 | 12,93 | 12,92 |
| | Persentase pasar dalam kondisi baik | 22,50 | 25,00 | 27,78 | 30,56 | 33,33 | 36,11 |
| 7 | Bidang perindustrian | | | | | | |
| | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 5,54 | 5,26 | 5,02 | 4,77 | 4,53 | 4,28 |
| | Jumlah produk olahan hasil perkebunan * | | | | | | |
| | Jumlah produk olahan yang menembus pasar propinsi* | | | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | Bidang transmigrasi | | | | | | |
| | jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Urusan penunjang | | | | | | |
| 1 | Bidang perencanaan | | | | | | |
| | persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | Cakupan data pembangunan tersedia | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 |

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkatdaerah, lintas perangkatdaerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

10.1. PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat (2) huruf j, menyatakan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan peraturan tersebut maka RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan RKPD, akan dipergunakan untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada tahun 2021. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh bupati dan Wakil bupati periode selanjutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dharmasraya Tahun 2005-2025, Tahap 4 (tiga) yakni Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan perubahan RPJMD, hanya dilakukan bila terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Yang dimaksud perubahan mendasar untuk merubah RPJMD berdasarkan kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis/ Renstra PD Tahun 2016-2021.

Setelah dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 ini disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah, dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya Renstra PD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

2. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan (RKPD). Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja PD harus konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

3. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJMD

Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 tidak hanya menggunakan pendekatan *top down*, politis, dan teknokratis tapi juga melalui pendekatan partisipatif dan *bottom up*. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan *stakeholders*, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah lainnya, serta Dunia Usaha untuk mendukung pelaksanaan RPJMD.

Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara pendapatan asli daerah sangat terbatas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Dunia Usaha juga menjadi hal strategis dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

5. RPJMD merupakan dasar pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Dengan adanya dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang memuat indikator yang jelas dan terukur, akan membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, baik target indikator kinerja lima tahunan maupun tahunan.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA